



SOSIOLOGI

DARI RUANG KELAS

Dr. Tappil Rambe, S.Pd., M.Si.
Taufik Hidayat, S.Pd., M.Si.

SOSIOLOGI

DARI RUANG KELAS

THE
Character of
UNIVERSITY



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

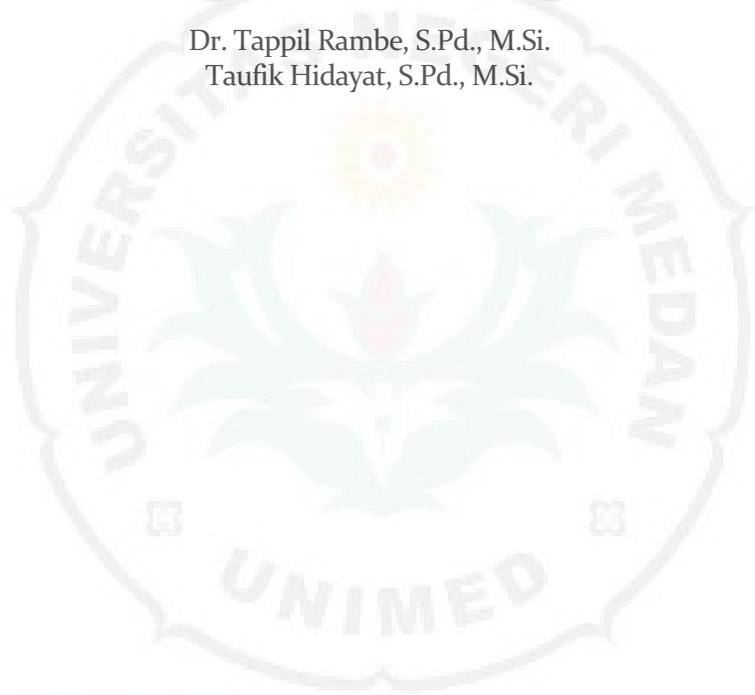
Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sosiologi dari Ruang Kelas

Dr. Tappil Rambe, S.Pd., M.Si.

Taufik Hidayat, S.Pd., M.Si.



THE
Character Building
UNIVERSITY



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Sosiologi dari Ruang Kelas

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Dr. Tappil Rambe, S.Pd., M.Si.

Taufik Hidayat, S.Pd., M.Si.

Editor: Janner Simarmata

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

IKAPI: 044/SUT/2021

Mariana Simanjuntak., dkk.

Sosiologi dari Ruang Kelas

Yayasan Kita Menulis, 2021

xii; 200 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-320-5

Cetakan 1, November 2021

I. Sosiologi dari Ruang Kelas

II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa

izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya yang telah dilimpahkan-Nya, atas terbitnya buku Sosiologi dari Ruang Kelas. Buku ini sangat diharapkan dapat menjadi referensi untuk menyikapi realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai dinamikanya, baik dalam ruang lingkup kebudayaan, maupun relasi manusia antar lintas bidang kehidupan yang terkait peranannya dalam melakukan fungsi sosial, baik secara individu maupun secara kolektif dalam komunitas dan antar komunitas.

Sosiologi dari Ruang Kelas ini, terdiri dari beberapa bab pembahasan yang memfokuskan terhadap ide-ide perilaku sosial dalam melihat berbagai dinamika perilaku manusia, dan dibahas secara terkini, berdasarkan fenomena yang ada, diantaranya: Permasalahan Dalam Kehidupan Sehari-hari, Konsep Dasar dan Implementasi Keluarga dan Perkawinan dalam Masyarakat Modern, Seksualitas dan Masyarakat Modern di Indonesia, Sistem Sosial dan Perilaku Menyimpang, Pranata Agama dan Pranata Politik, Gender dan Kajian Tentang Perempuan.

Semua materi kajian tersebut, penulis rangkum sebagai suatu penyajian yang terkini dengan melihat perkembangan masyarakat, baik secara tradisional maupun modern. Karya ini sangat diharapkan mampu menjadi referensi bagi kaum akademisi dan praktisi sosial, untuk dapat merangkum sebagian kajian kontemporer sebagai wawasan lokal dan nasional, dalam menyikapi Bonus Demografi 2025-2035 untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

Medan, 11 November 2021

Penulis



THE
Character Building
UNIVERSITY

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi

Bab 1 Permasalahan Dalam Kehidupan Sehari-Hari

A. Kemiskinan	1
1. Kriteria Kemiskinan	2
2. Masalah Kemiskinan	4
3. Faktor Penyebab Terjadinya Masalah Kemiskinan dan Penyelesaiannya....	5
B. Kenakalan Remaja	6
1. Contoh Kenakalan Remaja Yang Sering Terjadi	7
2. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Kenakalan Remaja	9
3. Akibat-Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Kenakalan Remaja	11
4. Solusi Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja	12
C. Pendidikan Rendah Dan Pengangguran	14
1. Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia	14
2. Ciri-ciri Pendidikan di Indonesia	15
3. Kualitas Pendidikan di Indonesia	16
4. Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia	17
5. Solusi dari Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Indonesia	23
D. Pengangguran	24
1. Pengertian Pengangguran	24
2. Macam-Macam Pengangguran	26
3. Penyebab Pengangguran	28
4. Tingkat Pengangguran Di Indonesia	28
5. Cara-cara Mengatasi Pengangguran	29
6. Dampak Pengangguran Terhadap Ekonomi Masyarakat	29

7. Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP)	30
8. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran	31
9. Penjelasan Perubahan Estimasi Upah Buruh Rilis Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2020.....	33
10. Jumlah Data pengangguran di Indonesia dan Sumatera Utara	34
E. Kesehatan	36
1. Pengertian Kesehatan Masyarakat	36
2. Ruang Lingkup Kesehatan Masyarakat	36
3. Prinsip-Prinsip Kesehatan Masyarakat	37
4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Derajat Kesehatan Masyarakat.....	38
F. Pelecehan Seksual	45
1. Bentuk dan Jenis Pelecehan Seksual	46
2. Kasus Pelecehan Terhadap Anak	48
G. Perceraian Rumah Tangga	49
1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	50
2. Dampak Perceraian	50
3. Perubahan Nilai dan Tatanan Kehidupan di Kalangan Perempuan Pasca Bercerai	51
4. Data Kasus Perceraian.....	52
H. Kriminalitas	53
1. Bentuk-Bentuk Tindakan Kriminal.....	54
2. Sebab-Sebab Tindakan Kriminal	54
3. Cara penanganan tindakan kriminalitas	56
4. Manfaat dari terjadinya tindakan kriminal.....	57
I. Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga (Pendekatan Fungsionalisme) 57	
1. Bentuk-bentuk KDRT	58
2. Faktor-faktor Penyebab KDRT	58
3. Dampak KDRT	59
4. Penyelesaian Permasalahan/Solusi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di dalam Rumah Tangga	59
5. Data KDRT Di Indonesia	61
6. Angka KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19.....	63
J. Penyalahgunaan Narkoba	63
1. Faktor-faktor terjadinya Penyalahgunaan Narkoba	64
2. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.....	64
3. Data Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia	65
K. Kesenjangan Sosial.....	66
1. Pengertian Kesenjangan Sosial.....	66

2. Faktor Penyebab Kesenjangan Sosial	67
3. Dampak kesenjangan sosial.....	68
4. Solusi Kesenjangan Sosial	69
5. Data Kesenjangan Sosial Di Indonesia	70
Bab 2 Konsep Dasar dan Implementasi Keluarga dan Perkawinan dalam Masyarakat Modern	
A. Prosesi Pernikahan Suku Batak Toba Tradisional	73
B. Prosesi Pernikahan Suku Batak Toba Modern	87
C. Sikap Pelaksana Adat Terhadap Tamu Non-Kristen	90
D. Perubahan Antara Perkawinan Batak Toba Tradisional Dengan Modern ..	90
E. Perkawinan Adat Di Kota Sebagai Arena Solidaritas Kekeberabatan.....	99
Bab 3 Seksualitas dan Masyarakat Modern di Indonesia	
A. Masyarakat Tradisional	102
B. Masyarakat Modern.....	103
C. Ciri-Ciri Masyarakat Tradisional	104
D. Ciri-Ciri Masyarakat Modern	106
E. Fenomena Seks Pranikah.....	113
Bab 4 Sistem Sosial dan Perilaku Menyimpang	
A. Sistem Sosial	119
1. Pengertian Sistem Sosial Menurut Para Ahli.....	120
2. Ciri Sistem Sosial.....	121
3. Sistem Sosial Dalam Sosiologi	122
4. Unsur-unsur sistem sosial.....	123
5. Fungsi Sistem Sosial.....	123
6. Contoh Sistem Sosial	124
B. Perilaku Menyimpang	129
1. Definisi Menurut Para Ahli.....	131
2. Bentuk perilaku menyimpang.....	135
C. Kenakalan Remaja.....	138
Bab 5 Pranata Agama dan Pranata Politik	
A. Pranata Agama.....	146
1. Peran Pranata Agama	148
2. Fungsi Pranata Agama	151
3. Peran Pranata Agama Dalam Masyarakat Modern.....	152
B. Pranata Politik	153

Bab 6 Gender dan Kajian Tentang Perempuan	
A. Pengertian Gender	163
B. Kajian Tentang Perempuan.....	177
Daftar Pustaka	193
Biodata Penulis	197



Daftar Gambar

Gambar 1.1: Potret kemiskinan yang terjadi di Indonesia.....	3
Gambar 1.2: Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2007-2020.....	4
Gambar 1.3: Jumlah kasus anak sebagai pelaku dan korban menurut KPAI tahun 2018.....	7
Gambar 1.4: Contoh potret kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia.....	8
Gambar 1.5: Grafik Perkembangan Covid-19 (Per Juni 2020).....	44
Gambar 1.6: Tabel Per Provinsi	45
Gambar 1.7: Angka pernikahan dan perceraian 2015-2017.....	52
Gambar 1.8: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data formulir kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun..	61
Gambar 1.9: Data KTP Lembaga Layanan Menurut Provinsi.....	62
Gambar 1.10: Data Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia	65
Gambar 1.11: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006-Maret 2020.....	71
Gambar 1.12: Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin.....	71
Gambar 2.1: Mangalehon Tanda	77
Gambar 2.2: Marhusip.....	78
Gambar 2.3: Marhata Sinamot.....	79
Gambar 2.4: Pudun Saut	80
Gambar 2.5: Martumpol.....	80
Gambar 2.6: Martonggo Raja	81
Gambar 2.7: Pemberkatan Pernikahan.....	82
Gambar 2.8: Membagi Jambar (Daging).....	83
Gambar 2.9: Membagi Jambar (Ikan).....	83
Gambar 2.10: Daulat Ni Sipanganon	84
Gambar 2.11: Paulak Une	85
Gambar 2.12: Maningkir Tangga.....	86
Gambar 2.13: Paulak Une secara Modern	89
Gambar 6.1: Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi 2018	174



THE
Character Building
UNIVERSITY

Bab 1

Permasalahan Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Membahas tentang identifikasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan pendekatan sosiologi, tentunya sangat banyak permasalahan yang terjadi baik di Indonesia secara umum maupun di daerah-daerah kecil. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sangatlah beragam mulai dari permasalahan pribadi maupun kelompok.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang selalu terjadi di kehidupan sehari-hari, tentunya tidak luput diselesaikan dengan pendekatan sosiologi. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa cakupan kajian sosiologi secara umum membahas tentang segala aspek kehidupan manusia.

Dengan begitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari meliputi kemiskinan, kenakalan remaja, pendidikan rendah, pengangguran, kesehatan, pelecehan seksual, perceraian rumah tangga, kriminalitas, kekerasan, narkoba, serta kesenjangan sosial.

A. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

Beberapa konsep kemiskinan yang umum dikenal yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dapat digolongkan kedalam dua bagian yaitu: (a) kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan (b) kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kemiskinan relatif yaitu tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subjektif merupakan konsep pengukuran kemiskinan yang dilakukan secara statis. Sedangkan kemiskinan subjektif diukur berdasarkan persepsi dari penduduk atau rumah tangga itu sendiri. Kelebihan dari pendekatan kemiskinan subjektif ini adalah bahwa pengukuran kemiskinan dapat dilakukan secara mudah sehingga hasilnya dapat disajikan lebih cepat, lebih sering dan lebih teratur (Kriyantono Rachmat: 2012:36).

1. Kriteria Kemiskinan

Kemiskinan dapat dengan mudah diketahui dan ditandai dengan kondisi keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, serta banyaknya jumlah pengangguran penduduk, yang selanjutnya menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antargolongan penduduk. Berikut ini 14 kriteria keluarga miskin antara lain:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter perorang;
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/dinding tembok tidak diplester;

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Kayu bakar/arang/minyak tanah sebagai bahan bakar memasak sehari-hari;
8. Mengonsumsi daging/susu/ayam/ satu kali dalam 1 minggu;
9. Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan satu kali/dua kali dalam 1 hari;
11. Tidak sanggup membayar pengobatan dipuskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah Rp600.000 perbulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Indikator kemiskinan tersebut membutuhkan penyelesaian untuk mengatasinya baik dari aspek ekonomi maupun non ekonomi (Iryanti R, 2016:9). (Anita, Putri. Rahman,dkk. 2019 : 1545)



Gambar 1.1: Potret kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari https://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/2638/standar_garis_kemiskina_n_kita_terlalu_rendah diakses pada tanggal 23 November 2020, pukul 11.18 WIB.

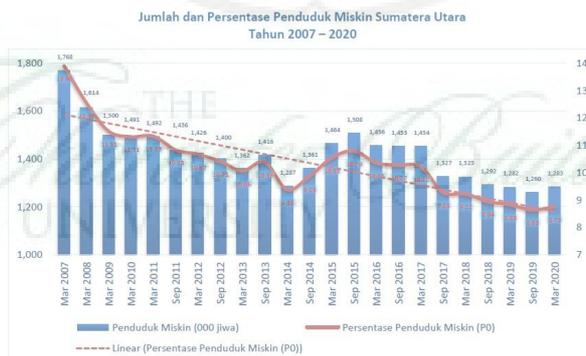
2. Masalah Kemiskinan

Masalah kemiskinan yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, di negara Indonesia ini ialah :

1. Tidak sanggup atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
2. Tingginya angka kelahiran.
3. Sikap menutup diri dari pengaruh luar.
4. Adanya ketidakadilan.
5. Tidak menerima hak yang semestinya.
6. Tingkat pendidikan yang rendah.
7. Kurang gizi.
8. Adanya wabah penyakit.
9. Faktor budaya.

Persoalan kemiskinan sudah bersifat multidimensi atau sangat kompleks. Sehingga angka kemiskinan hanya dapat diturunkan secara optimal apabila semua pihak termasuk masyarakat miskin itu sendiri ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Data persentase penduduk miskin menurut....



Catatan : Maret 2011 – September 2013 merupakan backcasting dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas)

Gambar 1.2: Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2007-2020. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5094573/bps-jumlah-penduduk-miskin-di-sumut-naik-jadi-128-juta-orang> diakses pada tanggal 23 November 2020, pukul 13.41 WIB.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Masalah Kemiskinan dan Penyelesaiannya

Adapun faktor penyebab terjadinya kemiskinan di antaranya ialah, sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pendidikan, yang mana hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik dan sarana pendidikan di daerah atau daerah terpencil serta tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan.
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran.
3. Malas bekerja, biasanya orang seperti ini memiliki anggapan bahwa miskin adalah takdir.
4. Beban hidup keluarga, maksudnya disini adalah banyaknya jumlah anggota keluarga maka banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi.
5. Keterbatasan sumber daya alam atau pun modal, di mana biasanya suatu daerah mengalami atau sedang ditimpa musibah bencana alam yang berdampak sumber daya alam yang ada tidak dapat diolah.
6. Rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana atau KB, kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.

Adapun cara penyelesaian dari masalah kemiskinan di antaranya sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur atau sarana dan prasarana.
2. Perlindungan sosial dengan cara memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria.
3. Peningkatan kesempatan berusaha, seperti program pengembangan kecamatan (PKK), Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP), program peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K), Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP), Program Kemitraan Dan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL), program pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan desa (PMPD), Pemberdayaan usaha mikro, program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.

B. Kenakalan Remaja

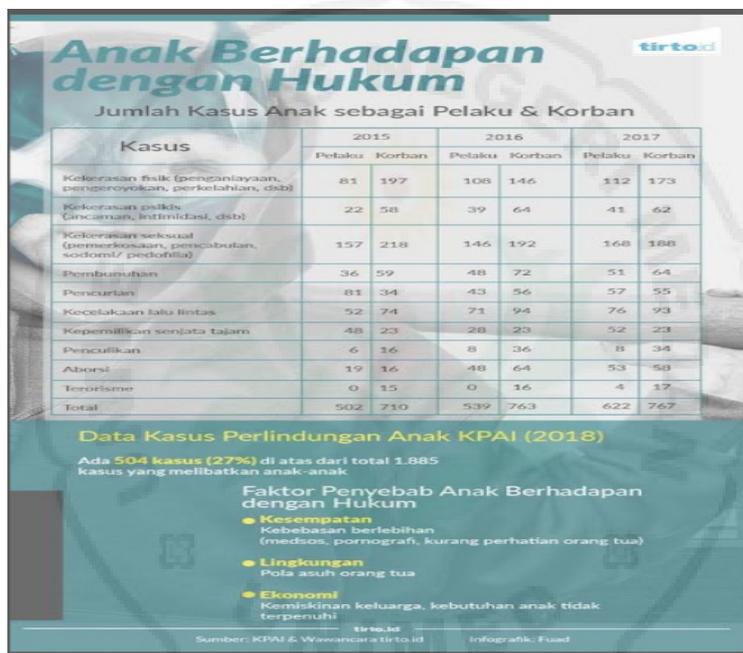
Permasalahan tentang kenakalan remaja merupakan suatu masalah sosial yang bisa merusak sistem sosial yang ada di dalam suatu masyarakat. Sistem sosial ini bisa menurun karena banyaknya masalah penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja. Selain itu permasalahan kenakalan remaja juga merupakan sesuatu hal yang dianggap sebagai penyimpangan. (Perilaku penyimpangan yang dimaksudkan adalah perilaku yang menyimpang atau keluar dari jalur aturan hukum, norma dan juga agama).

Dalam suatu masyarakat perilaku yang dianggap menyimpang adalah ketika seseorang sudah melanggar suatu norma yang ada. Norma yang ada di dalam suatu masyarakat hendaknya lebih ditekankan lagi agar para remaja bisa berperilaku baik). Menurut Soekanto (2009:12) norma adalah : “norma pada hakikatnya merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan. Norma yang ada di dalam masyarakat dibagi menjadi dua yakni norma tertulis dan tidak tertulis. Norma diharapkan dapat melindungi kepentingan semua masyarakat. Norma diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Ada empat jenis norma sosial yang kita kenal yakni norma kepercayaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum” Norma yang ada di dalam suatu masyarakat akan cenderung mempunyai suatu dampak yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat itu sendiri karena memang norma sengaja diciptakan untuk mengatur kehidupan individu maupun kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat.

Dengan adanya suatu norma yang ada di dalam masyarakat maka diharapkan masyarakat bisa berperilaku baik dan sesuai dengan norma yang ada. Permasalahan kenakalan remaja untuk saat ini memang tidak hanya dikenal di dalam suatu kalangan masyarakat perkotaan namun masalah kenakalan remaja saat ini sudah dikenal dalam seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Seharusnya masyarakat pedesaan tidak melakukan suatu penyimpangan karena masyarakat pedesaan cenderung mempunyai kontrol yang kuat.

Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku dan Korban Kekerasan



Gambar 1.3: Jumlah kasus anak sebagai pelaku dan korban menurut KPAI tahun 2018. Dikutip dari <https://mobile.twitter.com/tirtoid/status/102349333623222272> diakses pada tanggal 23 November 2020, pukul 13.59 WIB.

1. Contoh Kenakalan Remaja Yang Sering Terjadi

Adapun beberapa contoh kenakalan remaja yang sering terjadi di Indonesia di antaranya sebagai berikut :

1. Berkelahi dengan teman.
2. Bolos sekolah.
3. Pemakaian obat-obatan terlarang.
4. Tawuran.
5. Penipuan.
6. Pencurian.
7. Balapan liar.

8. Melihat atau menonton video dewasa.



Gambar 14: Contoh potret kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/kenakalan-remaja/> diakses pada tanggal 23 November 2020, pukul 11.28 WIB.

2. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Kenakalan Remaja

a Faktor Internal

Adapun faktor internal yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja, meliputi :

- a Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
- b Kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

b Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja, meliputi :

- a Kurangnya perhatian dari orang tua, orang tua sangat memiliki peran penting di dalam keluarga, kurangnya kasih sayang orang tua membuat anak dapat merusak pertumbuhan kepribadian dalam diri anak. Sebab perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan suatu dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seorang remaja dalam membentuk kepribadian serta sikap remaja sehari-hari. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken-home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memicu terjadinya kenakalan remaja.

- b. Minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu pembinaan moral pada permulaannya dilakukan di rumah tangga dengan latihan-latihan, nasehat-nasehat yang dipandang baik.

Maka pembinaan moral harus dimulai dari orang tua melalui teladan yang baik berupa hal-hal yang mengarah kepada perbuatan positif, karena apa yang diperoleh dalam rumah tangga remaja akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembinaan moral dan agama dalam keluarga penting sekali bagi remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan dan merupakan cara untuk mempersiapkan hari depan generasi yang akan datang, sebab kesalahan dalam pembinaan moral akan berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri. Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, yaitu melalui kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang keagamaan, agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilah baik buruk perbuatan yang ingin mereka lakukan sesuatu di setiap harinya. Kondisi masyarakat sekarang yang sudah begitu mengagungkan ilmu pengetahuan mengakibatkan kaidah-kaidah moral dan tata susila yang dipegang teguh oleh orang-orang dahulu menjadi tertinggal di belakang. Dalam masyarakat yang telah terlalu jauh dari agama, kemerosotan moral orang dewasa sudah lumrah terjadi. Kemerosotan moral, tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dewasa yang tidak baik menjadi contoh atau tauladan bagi anak-anak dan remaja sehingga berdampak timbulnya kenakalan remaja.

- c. Pengaruh dari lingkungan sekitar, Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering memengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling memengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang

buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang baik maka ia akan menjadi baik pula. Di dalam kehidupan bermasyarakat, remaja sering melakukan keonaran dan mengganggu ketentraman masyarakat karena terpengaruh dengan budaya barat atau pergaulan dengan teman sebayanya yang sering memengaruhi untuk mencoba. Sebagaimana diketahui bahwa para remaja umumnya sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa melihat faktor negatifnya, karena anggapan ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya.

- d Tempat pendidikan Tempat pendidikan, dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Belum lama ini bahkan kita telah melihat di media adanya kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini.

3. Akibat-Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Kenakalan Remaja

Adapun akibat yang ditimbulkan dari kenakalan remaja di antaranya, sebagai berikut :

1. Bagi diri remaja itu sendiri

Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental, walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berfikir tidak stabil dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dan hal itu kan terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkan.

2. Bagi keluarga

Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang serta menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dengan jalan minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Pada akhirnya keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh remaja. Padahal kesemuanya itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya.

3. Bagi lingkungan masyarakat

Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak, dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk merubah semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan).

4. Solusi Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja

Solusi dalam menanggulangi kenakalan remaja dapat dibagi ke dalam tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif dan rehabilitasi :

1. Tindakan Preventif

Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara berikut: Mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja, Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan.

Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui: Memperkuat sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan

keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etiket. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja.

2. Tindakan Represif

Usaha menindak pelanggaran norma norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut “jera” dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu.

Sebagai contoh, remaja harus mentaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Disamping itu perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orangtua terhadap pelanggaran tata tertib dan tata cara keluarga. Pelaksanaan tata tertib harus dilakukan dengan konsisten. Setiap pelanggaran yang sama harus dikenakan sanksi yang sama. Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan umur.

3. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi

Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain: Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri yang pernah sebelumnya gagal.

Adapun solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain:

1. Kegagalan mencapai identitas perandan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan.
2. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point pertama.
3. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif.
4. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.
5. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. (Sumara, Dadan. Sahadi, Humaedi,dkk. 2017: 347-352)

Segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditujukan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berpribadi kuat, sehat jasmani dan rohani, teguh dalam kepercayaan (iman) sebagai anggota masyarakat, bangsa dan tanah air.

C. Pendidikan Rendah Dan Pengangguran

1. Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia

Rendahnya kualitas pendidikan merupakan permasalahan yang sampai sekarang masih dihadapi oleh oleh Bangsa Indonesia. Salah satu faktor rendahnya pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kabutuhan, minat dan bakat siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka jarang menggali masalah dan potensi para siswa. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak bukan malah memaksakan sesuatu membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan

pada anak untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab gaya berpikir anak tidak bisa di arahkan.

Selain kurangnya kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum sentralistik membuat potret pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parahnya lagi, pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun.

2. Ciri-ciri Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa dan tindakan dapat di anggap pendidikan. Pendidikan umumnya di bagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang di maksud disini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan-pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar agama dan ketuhanan di televise, melalui radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa dan mahasiswa.

Pegembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi melalui bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa di asah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

3. Kualitas Pendidikan di Indonesia

Kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang ingin menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenal pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.

Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah. "Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007).

Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:

1. Meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi;
2. Menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta gender;
3. Meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional;
4. Pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan;
5. Pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah;

6. Pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun;
7. Penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan;
8. Pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan.

4. Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia

1. Efektivitas Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna.

Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survey ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektivitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita.

Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia.

2. Efisiensi Pengajaran Di Indonesia

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih ‘mudah’. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat

pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati.

Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahal biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik.

Masalah mahal biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relative lebih rendah jika kita bandingkan dengan Negara lain yang tidak mengambil sistem free cost education. Namun mengapa kita menganggap pendidikan di Indonesia cukup mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini jika penghasilan rakyat Indonesia cukup tinggi dan sepadan untuk biaya pendidikan.

Selain masalah mahal biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relatif lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarannya perhari dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00.. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat, bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang.

Selain itu, masalah lain efisiensi pengajaran yang akan kami bahas adalah mutu pengajar. Kurangnya mutu pengajar jugalah yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang juga membutuhkan uang lebih. Yang kami lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun di mengajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal-tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Hal lain adalah pendidik tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik.

Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-ubah sehingga membingungkan pendidik dan peserta didik. Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relative terhadap harganya. Apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka suatu program pendidikan yang efisien cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien. Program pendidikan yang efisien adalah program yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami hambatan.

3. Standardisasi Pendidikan Di Indonesia

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standardisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah apalagi di dalam dunia terbuka yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Peserta didik Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh, yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja. Hal seperti di atas sangat disayangkan karena berarti pendidikan seperti kehilangan makna saja karena terlalu menuntun standar kompetensi. Hal itu jelas salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

Selain itu, akan lebih baik jika kita mempertanyakan kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang

hampir selalu menjadi kontrofesi misalnya. Kami menilai adanya sistem evaluasi seperti UAN sudah cukup baik, namun yang kami sayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalu peserta didik yang telah menenpuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlangsung sekali, evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah didikuti oleh peserta didik. Selain beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di atas, berikut ini akan dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

2. Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

3. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan

dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas. Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.

4. Rendahnya Prestasi Siswa

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney, 1992), studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia). Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat

pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

6. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

7. Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya

penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk 'cuci tangan'.

5. Solusi dari Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Indonesia

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu:

1. Solusi sistemik

Yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan—seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan—berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam

dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintah-lah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara.

2. Solusi teknis

Yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

D. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Nanga (2005: 249) mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS, 2001: 8). Menurut Sukirno (2004: 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.

Selanjutnya International Labor Organization (ILO) memberikan definisi pengangguran yaitu:

1. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.
2. Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain/tambahan (BPS, 2001: 4).

Sedangkan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menyatakan bahwa:

1. Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.
2. Setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain (BPS, 2000: 14).

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketidadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan

keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah “pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

2. Macam-Macam Pengangguran

1. Berdasarkan Jam Kerja

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

- a Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu;
- b Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu;
- c Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

2. Berdasarkan Penyebab Terjadinya

Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam:

- a Pengangguran friksional (frictional unemployment)

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjanya yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki

kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya : Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, untuk sementara menganggur. Berhenti dari pekerjaan yang lama, mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik

b Pengangguran konjungtural (cycle unemployment)

Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi. Contohnya: Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan.

c Pengangguran struktural (structural unemployment)

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Contohnya: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.

Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti:

1. Akibat permintaan berkurang
2. Akibat kemajuan dan penggunaan teknologi
3. Akibat kebijakan pemerintah

Pengangguran musiman (seasonal Unemployment) Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur.

d Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Contoh, sebelum ada penggilingan padi, orang yang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja, setelah ada mesin penggilingan padi maka mereka tidak bekerja lagi.

e Pengangguran Politis

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran. Misalnya penutupan Bank-bank bermasalah sehingga menimbulkan PHK.

f Pengangguran Deflatoir

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

3. Penyebab Pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

4. Tingkat Pengangguran Di Indonesia

Sejak 1997 sampai 2003, angka pengangguran terbuka di Indonesia terus menaik, dari 4,18 juta menjadi 11,35 juta. Didominasi oleh penganggur usia muda. Selain usia muda, pengangguran juga banyak mencakup berpendidikan rendah, tinggal di pulau Jawa dan berlokasi di daerah perkotaan. Intensitas permasalahan juga lebih banyak terjadi pada penganggur wanita dan penganggur terdidik. Pengangguran dan setengah pengangguran merupakan

permasalahan di muara yang tidak bisa diselesaikan pada titik itu saja, tapi juga harus ditangani dari hulu. Sektor di hulu yang banyak berdampak pada pengangguran dan setengah pengangguran adalah sektor kependudukan, pendidikan dan ekonomi.

Ada tiga asumsi yang menjadi harapan untuk menurunkan pengangguran dan setengah pengangguran. Pertama, pertumbuhan tenaga kerja rata-rata pertahun dapat ditekan dari 2,0 persen pada periode 2000-2005 menjadi 1,7 persen pada periode 2005-2009. Demikian juga pertumbuhan angkatan kerja, dapat ditekan menjadi 1,9 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang mencapai 2,4 persen. Kedua, dapat ditingkatkannya pertumbuhan ekonomi menjadi 6,0 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 4,1 persen. Ketiga, transformasi sektor informal ke sektor formal dapat dipercepat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan terutama di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

5. Cara-cara Mengatasi Pengangguran

Untuk itu perlu diupayakan cara mengatasi pengangguran, antara lain sebagai berikut:

- a Meningkatkan mutu pendidikan,
- b Meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern,
- c Meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan,
- d Mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal,
- e Meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya,
- f Membuka kesempatan kerja ke luar negeri

6. Dampak Pengangguran Terhadap Ekonomi Masyarakat

Tingginya tingkat pengangguran dalam sebuah perekonomian akan mengakibatkan kelesuan ekonomi dan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat penurunan pendapatan masyarakat. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini:

1. Pendapatan Per Kapita

Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan sehingga hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Dampaknya adalah

terjadinya penurunan pendapatan per-kapita. Dengan kata lain, bila tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan menurun dan sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah pendapatan per kapita akan meningkat, dengan catatan pendapatan mereka yang masih bekerja tetap;

2. Pendapatan Negara

Orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah/gaji, Upah/gaji tersebut sebelum sampai di tangan penerima dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara sehingga bila tidak banyak orang yang bekerja maka pendapatan negara dari pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang;

3. Beban Psikologis

Semakin lama seseorang menganggur semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Orang yang memiliki pekerjaan berarti ia memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu lama akan merasa rendah diri (minder) karena statusnya yang tidak jelas;

4. Munculnya Biaya Sosial

Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas.

7. Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP)

Berdasarkan kondisi diatas perlu dilakukan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan mengerahkan semua unsur-unsur dan potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melaksanakan program penanggulangan pengangguran. Salah satu tolok ukur kebijakan nasional dan regional haruslah keberhasilan dalam perluasan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran dan setengah pengangguran.

Gerakan tersebut dicanangkan dalam satu Deklarasi GNPP yang diadakan di Jakarta 29 Juni 2004. Lima orang tokoh dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perwakilan pengusaha, perwakilan perguruan tinggi,

menandatangani deklarasi tersebut, mereka adalah H.M. Rusli Zainal, H. Zulkarnaen Karim, T. Setyawan, DR. J.P. Sitanggang dan Bambang Ismawan. mereka adalah sebagian kecil dari para tokoh yang memandang masalah ketenagakerjaan di Indonesia harus segera ditanggulangi oleh segenap komponen bangsa. Menurut para deklarator tersebut, bahwa GNPP ini dimaksudkan untuk membangun kepekaan dan kepedulian seluruh aparatur dari pusat ke daerah, serta masyarakat seluruhnya untuk berupaya mengatasi pengangguran. Dalam deklarasi itu ditegaskan, bahwa untuk itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebaiknya segera dibentuk Badan Koordinasi Perluasan Kesempatan Kerja.

Kesadaran dan dukungan sebagaimana diwujudkan dalam kesepakatan GNPP tersebut, menunjukkan suatu kepedulian dari segenap komponen bangsa terhadap masalah ketenagakerjaan, utamanya upaya penanggulangan pengangguran. Menyadari bahwa upaya penciptaan kesempatan kerja itu bukan semata fungsi dan tanggung jawab Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita semua, pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, maupun dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan dan program masing-masing pihak, baik pemerintah maupun swasta harus dikaitkan dengan penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

8. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran

Kondisi Indonesia masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu :

1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu

- mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya;
2. Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpinggirkan sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia;
 3. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci;
 4. Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja;
 5. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat;
 6. Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi

dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja;

7. Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah;
8. Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja;
10. Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif.

9. Penjelasan Perubahan Estimasi Upah Buruh Rilis Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2020

BRS dengan Nomor 86/11/Th. XXIII, 05 November 2020 tentang Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2020 telah dirilis pada 5 November lalu. Pada BRS dimaksud menjelaskan tentang rata-rata upah buruh yang terdapat pada bagian B. Dengan adanya revisi angka penimbang SUPAS 2015, kami sampaikan beberapa hal penting terkait perubahan angka BRS dimaksud:

1. Rata-rata upah buruh yang tersaji dalam BRS belum menggunakan angka penimbang SUPAS 2015 terbaru yang sudah mengalami revisi khususnya data Sakernas Agustus 2019.
2. Perubahan penimbang berimplikasi terhadap perubahan rata-rata upah buruh yang disajikan pada tabel BRS, khususnya data upah buruh menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama pada tahun 2019.
3. Setelah menggunakan penimbang SUPAS 2015 hasil revisi, terjadi perubahan angka rata-rata upah buruh Agustus 2019 yang tersaji dalam BRS.

10. Jumlah Data pengangguran di Indonesia dan Sumatera Utara

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,24 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (2,23 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan (1,30 persen poin). Sebanyak 77,68 juta orang (60,47 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 4,59 persen poin dibanding Agustus 2019.

Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 3,77 persen poin dan 3,42 persen poin. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).

Rata-rata upah buruh berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020 sebesar 2,76 juta rupiah Rata-rata upah buruh pada Agustus 2020 sebesar 2,76 juta rupiah per bulan. Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 2,98 juta rupiah dan rata-rata

upah buruh perempuan sebesar 2,35 juta rupiah. Rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 4,48 juta rupiah, sedangkan terendah berada di kategori Jasa Lainnya, yaitu sebesar 1,69 juta rupiah.

Terdapat 7 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih rendah daripada rata-rata upah buruh nasional. Rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar 4,24 juta rupiah, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar 1,65 juta rupiah. Menurut kelompok umur, rata-rata upah buruh tertinggi sebesar 3,62 juta rupiah pada kelompok umur 55-59 tahun, sedangkan terendah sebesar 1,56 juta rupiah pada kelompok umur 15-19 tahun. Rata-rata Upah Buruh setahun terakhir turun 5,20 persen dari 2,91 juta menjadi 2,76 juta rupiah. Penurunan tertinggi pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,28 persen.

Jumlah tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 7,29 juta orang, turun 156 ribu orang dibanding Februari 2019. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun 2,57 poin. Dalam setahun terakhir TPT turun 0,83 poin menjadi 4,73 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT paling tinggi adalah TPT dengan jenjang pendidikan SMK yaitu sebesar 7,51 persen. Penduduk bekerja di Sumatera Utara pada Februari 2020 sebanyak 6,95 juta orang, berkurang 87 ribu orang dari Februari 2019. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2020 penduduk paling banyak bekerja pada sektor pertanian (38,48 persen) disusul sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (16,66 persen) dan sektor industri pengolahan (8,26 persen).

Sebagian besar dari penduduk bekerja yakni 58,63 persen (4,07 juta orang) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, dari Februari 2019 pekerja informal turun hingga 1,62 poin. Persentase pekerja tidak penuh pada Februari 2020 sebesar 32,68 persen terdiri dari pekerja paruh waktu 25,31 persen dan setengah pengangguran sebesar 7,37 persen. Sedangkan pekerja penuh atau yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu ada sebanyak 67,32 persen.

E. Kesehatan

1. Pengertian Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Menurut WHO (1947) adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut UU 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat secara mental (kesehatan jiwa) adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Sehat secara sosial adalah perikehidupan seseorang dalam masyarakat, yang diartikan bahwa seseorang mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri dan kehidupan keluarga sehingga memungkinkan untuk bekerja, beristirahat dan menikmati liburan (Sri sumiati 2016).

2. Ruang Lingkup Kesehatan Masyarakat

Menurut Sri Sumiati 2016, ruang lingkup kesehatan masyarakat mencakup 2 disiplin pokok keilmuan, yakni ilmu bio medis (medical biology) dan ilmu-ilmu sosial (social sciences), sejalan dan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat mencakup: Ilmu Biologi, kedokteran, kimia, fisika, lingkungan, sosial, antropologi, pendidikan dan sebagainya.

Secara garis besar disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat sebagai berikut:

- a. Epidemiologi
- b. Biostatistik/statistik kesehatan
- c. Kesehatan lingkungan
- d. Pendidikan kesehatan/ilmu Prilaku
- e. Administrasi Kesehatan masyarakat
- f. Gizi masyarakat
- g. Kesehatan kerja

Dan masalah kesehatan masyarakat adalah multi kausal pemecahannya secara multi disiplin, sedangkan kesehatan masyarakat sebagai seni mempunyai

bentangan semua kegiatan yang langsung atau tidak untuk mencegah penyakit (preventif), meningkatkan kesehatan (promotif), terapi (terapi fisik, mental, sosial) adalah upaya masyarakat, misal pembersihan lingkungan, penyediaan air bersih, pengawasan makanan dan lain-lain.

Penerapannya dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat adalah:

1. Pemberantasan penyakit, menular dan tidak menular;
2. Perbaikan sanitasi lingkungan tempat-tempat umum;
3. Perbaikan lingkungan pemukiman;
4. Pemberantasan vector;
5. Pendidikan atau penyuluhan kesehatan masyarakat;
6. Pelayanan ibu dan anak;
7. Pembinaan gizi masyarakat;
8. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum;
9. Pengawasan obat dan minuman;
10. Pembinaan peran serta masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Kesehatan Masyarakat

Agar usaha kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Sasaran pelayanan meliputi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- b. Dasar utama dalam pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat adalah menggunakan metode pemecahan masalah yang dituangkan dalam pelayanan kesehatan;
- c. Kegiatan utama pelayanan kesehatan adalah di masyarakat bukan di rumah sakit. Tenaga kesehatan adalah tenaga yang generalis;
- d. Peran tenaga kesehatan terpenting adalah sebagai pendidik (health education) dan pembantu (change agent);
- e. Praktik kesehatan masyarakat timbul dari kebutuhan aspirasi, masalah dan sumber yang terdapat di masyarakat;
- f. Praktik kesehatan masyarakat di pengaruhi perubahan dalam masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat pada khususnya;

- g. Praktik kesehatan masyarakat adalah bagian dari sistem kesehatan masyarakat;
- h. Praktik kesehatan masyarakat merupakan gambaran dari seluruh program kesehatan di masyarakat.

4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Derajat Kesehatan Masyarakat

Hendrik L. Blum mengatakan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa lingkungan mempunyai pengaruh dan peranan terbesar diikuti perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Prinsip-Prinsip dan Faktor-Faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat

1. Lingkungan (Environment)

Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik (baik natural atau buatan manusia) misalnya sampah, air, udara dan perumahan, dan sosiokultur (ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain). Pada lingkungan fisik, kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan, misalnya ; ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan memengaruhi derajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok manusia dan manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin individu/masyarakat maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik akan semakin sulit. misalnya manusia membutuhkan makanan dengan gizi seimbang untuk menjaga kelangsungan hidup, jika individu/masyarakat berada pada garis kemiskinan maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan gizi seimbang. Demikian juga dengan tingkat pendidikan individu/masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan individu/masyarakat maka pengetahuan untuk hidup sehat akan semakin baik. Beberapa

contoh faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan antara lain:

- a. Adanya sanitasi lingkungan yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

- b. Ada norma agama pada umat islam tentang konsep haram terhadap alkohol akan menurunkan tingkat konsumsi alkohol;
- c. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan individu maupun masyarakat maka pengetahuan akan cara hidup sehat semakin baik.

2. Perilaku (Life Styles)

Gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor kedua memengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat dan tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri, di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya. Contohnya: dalam masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, akan terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut yang akan memengaruhi derajat kesehatan. Misalnya: pada masyarakat tradisional di mana sarana transportasi masih sangat minim maka masyarakat terbiasa berjalan kaki dalam beraktivitas, sehingga individu dan masyarakat senantiasa menggerakkan anggota tubuhnya (berolah raga). Pada masyarakat modern di mana sarana transportasi sudah semakin maju, maka individu dan masyarakat terbiasa beraktivitas dengan menggunakan transportasi seperti kendaraan bermotor sehingga individu dan masyarakat kurang menggerakkan anggota tubuhnya (berolah raga). Kondisi ini dapat berisiko mengakibatkan obesitas pada masyarakat modern karena kurang berolah raga ditambah lagi kebiasaan masyarakat modern mengkonsumsi makanan cepat saji yang kurang mengandung serat. Fakta tersebut akan mengakibatkan transisi epidemiologis dari penyakit menular ke penyakit degeneratif.

Berikut ini contoh dari life style yang dapat memengaruhi kesehatan seseorang:

- a. Perilaku perokok sejak dini akan meningkatkan risiko kanker pada paru-paru;
- b. Perilaku mengkonsumsi makanan cepat saji (junk food) akan meningkatkan risiko obesitas yang berisiko pada penyakit jantung;
- c. Kebiasaan melakukan konsep 3 M (menguras, mengubur dan menutup) pada pencegahan DBD akan menurunkan prevalensi penyakit DBD.

3. Pelayanan Kesehatan (Health Care Services)

Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas sangat berpengaruh oleh lokasi, apakah dapat dijangkau oleh masyarakat atau tidak, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan, serta program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Semakin mudah akses individu atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

4. Keturunan (Heredity)

Faktor keturunan/genetik ini juga sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik atau faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir, misalnya: dari golongan penyakit keturunan, di antaranya: diabetes melitus, asma bronkia, epilepsy, retardasi mental hipertensi dan buta warna. Faktor keturunan ini sulit untuk diintervensi dikarenakan hal ini merupakan bawaan dari lahir dan jika diintervensi maka harga yang dibayar cukup mahal.

Berikut ini contoh faktor keturunan dapat memengaruhi kesehatan:

- a. Perkawinan antar golongan darah tertentu akan mengakibatkan leukemia;
- b. Adanya kretinisme yang diakibatkan mutasi genetik.

5. Pencegahan Penyakit

1. Pengertian Pencegahan Penyakit

Secara umum pencegahan atau preventif dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa yang diharapkan (atau diduga) akan terjadi, sehingga peristiwa tadi tidak terjadi atau dapat dihindari' (to come before or precede, or anticipate, to make impossible by advance provision). Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan

menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. (Kleinbaum, et al., 1982; Last, 2001). Pencegahan penyakit ialah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian dengan menggunakan langkah-langkah yang didasarkan pada data, keterangan bersumber hasil analisis, pengamatan, penelitian epidemiologi.

2. Tindakan pencegahan

Tindakan pencegahan penyakit dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan perjalanan penyakit, yaitu:

- a. Pencegahan primer (primary prevention), yang dilakukan dalam fase 'pre-patogenesis' sebelum proses itu terjadi;
- b. Pencegahan sekunder (secondary prevention), di mana proses penyakit sudah mulai memasuki fase 'patogenesis' tapi masih dalam tahap ringan dan belum nyata;
- c. Pencegahan tersier (tertiary prevention), di mana dalam fase 'patogenesis' tersebut proses penyakit sudah nyata dan berlanjut dan mungkin dalam taraf sudah akan berakhir (sembuh, menahun, kelainan yang menetap atau kematian).

3. Upaya Pencegahan Primer

a. Upaya Peningkatan Kesehatan

Yaitu upaya pencegahan yang umumnya bertujuan meningkatkan taraf kesehatan, individu, keluarga, masyarakat, misalnya :

- (1) Penyuluhan kesehatan, perbaikan gizi, penyusunan pola gizi memadai, pengawasan pertumbuhan anak balita dan usia remaja;
- (2) Perbaikan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan;
- (3) Kesempatan memperoleh hiburan sehat yang memungkinkan pengembangan kesehatan mental dan sosial;
- (4) Pendidikan kependudukan, nasihat perkawinan, pendidikan seks dan sebagainya;
- (5) Pengendalian faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan.

b. Perlindungan Umum dan Khusus

Perlindungan khusus terhadap kesehatan. Golongan masyarakat tertentu serta keadaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi tingkat kesehatan. Upaya-upaya yang termasuk perlindungan umum dan khusus antara lain :

1. Peningkatan hygiene perorangan dan perlindungan terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan;
 2. Perlindungan tenaga kerja terhadap setiap kemungkinan timbulnya penyakit akibat kerja;
 3. Perlindungan terhadap bahan-bahan beracun, korosif, allergen, dan sebagainya;
 4. Perlindungan terhadap sumber-sumber pencemaran.
- c. Upaya Pencegahan Sekunder

Pada pencegahan sekunder termasuk upaya yang bersifat diagnosis dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment) dengan cara; Mencari kasus sedini mungkin :

1. Melakukan general check up rutin pada tiap individu;
2. Melakukan berbagai survey

Contoh: survey sekolah, rumah tangga Dalam rangka pemberantasan penyakit menular Pengawasan obat-obatan, termasuk obat terlarang yang diperdagangkan bebas. Contoh: narkotika, psikofarmaka, dan obat-obat bius lainnya.

- d. Upaya Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier berupa pencegahan terjadinya komplikasi penyakit yang lebih parah, yang bertujuan menurunkan angka kejadian cacat fisik ataupun mental, meliputi upaya:

1. Penyempurnaan cara pengobatan serta perawatan lanjut;
2. Rehabilitasi sempurna setelah penyembuhan penyakit (rehabilitasi fisik dan mental);
3. Mengusahakan pengurangan beban sosial penderita, sehingga mencegah kemungkinan terputusnya kelanjutan pengobatan serta kelanjutan rehabilitasi dan sebagainya.

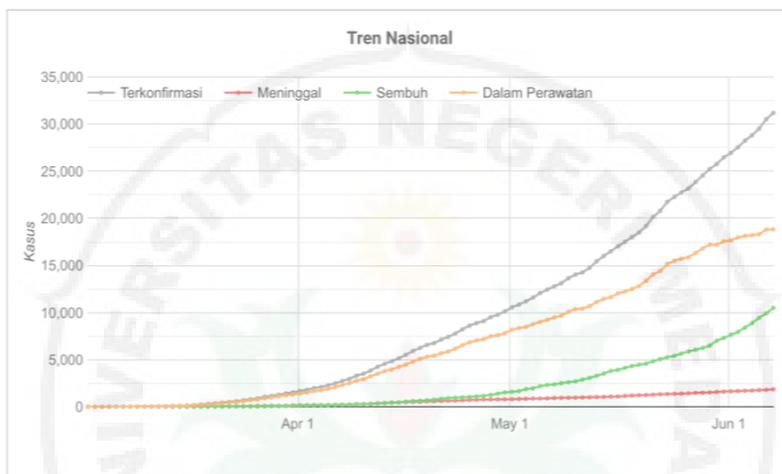
6. Data Kesehatan Masyarakat Pada Tahun 2020

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (Covid-19). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020). Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China (Dong et al., 2020). Pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (Ren L et al., 2020) Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak kasus (Susilo et al., 2020).

Indonesia saat ini terkena dampak pandemi virus baru, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi secara global di berbagai Negara telah terkena dampak yang sangat hebat dari virus ini. World Health Organization memberi nama virus ini Severse Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dengan nama penyakitnya yakni Coronavirus disease 2019 (Covid-19) (WHO, 2020). Pandemi covid-19 ini akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini Indonesia harus bersiap siaga dalam menghadapinya terutama dalam hal sistem kesehatan yang ada.

Munculnya Covid-19 telah menarik perhatian global, dan pada 30 Januari WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) di mana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Di antara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi (Kemenkes RI, 2020).

Sistem kesehatan menurut World Health Organization (WHO) adalah “sebuah kegiatan yang bertujuan dalam mempromosikan, memulihkan, atau menjaga kesehatan”. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Indonesia juga termasuk status ekonomi yang berpenghasilan menengah ke bawah (Putri R.N, 2019). Dengan terjadinya pandemi covid-19 ini, maka dampak ekonomi sangat dirasakan oleh Indonesia dikarenakan kasus yang terkonfirmasi terus meningkat.



Gambar 1.5: Grafik Perkembangan Covid-19 (Per Juni 2020)

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa kasus yang terkonfirmasi terus meningkat. Potensi pandemi COVID-19 menuntut pengawasan ketat dan pemantauan yang sedang berlangsung secara akurat melacak dan berpotensi memprediksi adaptasi host, evolusi, transmisibilitas, dan patogenisitas di masa depan. Faktor-faktor ini pada akhirnya akan memengaruhi angka kematian dan prognosis, maka sangat diperlukan panduan pengendalian dan pencegahan penyakit ini (Sohrabi et al., 2020)

Dan kasus Corona virus Disease (Covid-19), menggunakan sumber data WHO dan PHEOC Kemenkes taggal 24 November 2020 a. Situasi Global

1. Total kasus konfirmasi COVID-19 global per tanggal 24 November 2020 adalah 58,900,547 kasus dengan 1,393,305 kematian (CFR 2,4%) di 219 Negara Terjangkit dan 178 Negara Transmisi lokal;
2. Daftar negara terjangkit COVID-19 dapat bertambah setiap harinya mengikuti perkembangan data dan informasi yang didapatkan di Situation Report WHO.

Situasi Indonesia

NO	PROVINSI	JUMLAH KASUS TANGGAL 24 NOVEMBER 2020			JUMLAH KASUS SEMBUH			JUMLAH KASUS MENINGGAL		
		S/D 23/11 2020	24/11 2020	KASUS KUMULATIF	S/D 23/11 2020	24/11 2020	KUM	S/D 23/11 2020	24/11 2020	KUM
1	ACEH	8154	6	8160	6410	0	6410	306	0	306
2	SUMATERA UTARA	14988	81	15069	12369	77	12446	595	2	597
3	SUMATERA BARAT	18626	58	18684	15145	113	15258	352	0	352
4	RIAU	18755	138	18893	16325	88	16413	416	3	419
5	JAMBI	1649	41	1690	1196	7	1203	35	1	36
6	SUMATERA SELATAN	9113	47	9160	7384	40	7424	487	4	491
7	BENGKULU	1574	13	1587	1225	19	1244	71	0	71
8	LAMPUNG	3087	67	3154	1681	8	1689	122	4	126
9	BANGKA BELITUNG	893	15	908	765	5	770	12	0	12
10	KEPULAUAN RIAU	5213	45	5258	3892	16	3908	131	2	133
11	DKI JAKARTA	128173	1015	129188	116909	1060	117969	2542	19	2561
12	JAWA BARAT	48666	299	48965	40024	428	40452	868	4	872
13	JAWA TENGAH	48385	928	49313	35751	300	36051	2140	13	2153
14	DI YOGYAKARTA	5219	84	5303	3957	40	3997	127	6	133
15	JAWA TIMUR	59044	354	59398	52389	157	52546	4184	31	4215
16	BANTEN	11806	144	11950	8232	6	8238	307	7	314
17	BALI	13183	111	13294	12046	105	12151	410	1	411
18	NUSA TENGGARA BARAT	4536	14	4550	3623	9	3632	235	0	235
19	NUSA TENGGARA TIMUR	959	1	960	651	1	652	16	0	16
20	KALIMANTAN BARAT	2257	31	2288	1673	60	1733	22	0	22
21	KALIMANTAN TENGAH	5445	51	5496	4407	30	4437	183	0	183
22	KALIMANTAN SELATAN	12913	21	12934	11760	15	11775	516	2	518
23	KALIMANTAN TIMUR	18414	90	18504	15771	132	15903	562	5	567
24	KALIMANTAN UTARA	1146	89	1235	896	15	911	16	0	16
25	SULAWESI UTARA	6446	25	6471	5130	33	5163	234	3	237
26	SULAWESI TENGAH	1551	81	1632	958	11	969	62	0	62
27	SULAWESI SELATAN	19996	95	20091	18040	88	18128	488	0	488
28	SULAWESI TENGGARA	6102	65	6167	4738	31	4769	96	0	96
29	GORONTALO	3093	2	3095	2956	0	2956	29	0	29
30	SULAWESI BARAT	1375	2	1377	1008	1	1009	20	0	20
31	MALUKU	4271	0	4271	3680	0	3680	60	0	60
32	MALUKU UTARA	2349	3	2352	1966	5	1971	80	1	81
33	PAPUA	9759	100	9859	5007	0	5007	137	0	137
34	PAPUA BARAT	5000	76	5076	4422	27	4449	81	1	82
	Dalam Proses Verifikasi di Lapangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	502110	4192	506302	422386	2927	425313	16002	109	16111

Gambar 1.6: Tabel Per Provinsi (Covid19.Kemendes.go.id)

F. Pelecehan Seksual

Collier menjelaskan pelecehan seksual sebagai perilaku yang menyinggung perasaan yang didasarkan pada gender (1988 : 97). Pelecehan seksual dapat juga diartikan sebagai semua sikap dan perilaku yang mengarah pada perilaku seksual yang tidak disenangi, mulai dari pandangan, simbol-simbol lewat bibir, gerakan badan, tangan, siulan nakal, pandangan yang menelanjangi, mencolek-colek, menunjukkan gambar-gambar porno, mencuri mencium, meraba, meremas bagian tubuh tertentu, bahkan sampai memperkosa (Sumarni dan Setyowati, 1993 :3).

1. Bentuk dan Jenis Pelecehan Seksual

Sumarni dan Setyowati (1999 : 24), menggolongkan jenis-jenis pelecehan seksual menjadi 3 tingkat yaitu :

1. Pelecehan Seksual Ringan.

Laki-laki tersebut mengedipkan mata atau menatap subuh si wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan atau suara-suara menggoda kearah si wanita, dan mengajak si wanita bergurau porno atau melihat gambar porno.

2. Pelecehan Seksual Sedang

Laki-laki tersebut membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, bertanya apakah si wanita bersedia di ajak berkencan, membicarakan atau memberitahu si wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.

3. Pelecehan Seksual Berat

Laki-laki tersebut menyentuh, mencolek, mencubit, menepuk, atau meremas bagian tertentu tubh si wanita, merangkul atau memeluk si wanita dengan bernafsu, memperlihatkan, menekankan, atau menggesek-gesekkan sebagian atau seluruh alat vitalnya kepada si wanita, dan melakukan usaha-usaha untuk melakukan perkosaan terhadap diri si wanita.

Pelecehan seksual yang berat merupakan suatu peristiwa kehidupan yang sangat mengganggu kehidupan individu dan dapat memengaruhi perkembangan individu bersangkutan. Peristiwa kehidupan berupa pelecehan seksual merupakan stressor psikososial yang berat. Meskipun daya tahan individu dalam menghadapi stress berbeda satu dengan yang lainnya, jika kedatangannya berlangsung secara tiba-tiba, cepat sering tidak dapat dinyana, atau tidak dapat diramalkan, maka akibatnya dapat menimbulkan efek psikologik seperti depresi (Sumarni dan setyowati, 1999 : 47).

Rubenstein tahun 1992 (dalam Collier, 1998 : 15), membuat daftar beberapa akibat dari pelecehan seksual secara pribadi : khawatir, tegang, lekas marah, depresi, rusaknya hubungan pribadi, permusuhan, ketidakmampuan berkonsentrasi, kurang tidur, kelelahan, sakit kepala, dan bentuk-bentuk stress lainnya.

Pelecehan seksual bisa mengarah menjadi kekerasan seksual seperti perkosaan. Jika tindakan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual sudah menimbulkan bekas atau perlukaan, maka tindakan itu digolongkan menjadi kekerasan seksual. Penelitian menyatakan bahwa kebanyakan pelaku pelecehan seksual hingga kekerasan seksual adalah orang terdekat korban.

Kedua tindakan ini adalah hal yang salah di mata hukum, dan jika korban memperkarakannya, pelaku bisa dipenjara dan dikenakan denda uang. Kebanyakan korban tidak tahu mengenai hal ini, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kasus ini.

Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan saat kamu mengalami hal ini:

- a. Menceritakan hal ini kepada orang terdekatmu dan bisa dipercaya.
- b. Melakukan visum (jika korban perkosaan).
- c. Meminta dampingan orang terdekatmu selama menyelesaikan kasus ini (jika kamu mau menuntutnya).
- d. Mencari bantuan ke lembaga-lembaga yang fokus menangani pelecehan seksual dan kekerasan seksual, biasanya mereka mempunyai program konseling yang bisa kamu akses.

Adapun beberapa pencegahan yang bisa dilakukan agar kamu terhindar dari kedua hal ini adalah:

- a. Jika akan pergi ke luar rumah, tentukan tujuannya sehingga di jalan kamu tidak terlihat linglung.
- b. Saat ada orang yang kamu rasa melakukan pelecehan seksual, kamu harus menunjukkan perlawanan dan sikap tidak setuju atas perbuatannya agar dia tidak berani melakukan hal yang lebih jauh.
- c. Jangan mudah mempercayai orang yang baru kamu kenal, bersikap waspada itu penting apalagi jika perbedaan usia kamu dengan orang tersebut lumayan jauh (kamu lebih muda 5 tahun atau lebih).
- d. Kasus penculikan dan perkosaan oleh orang yang baru dikenal di FB saat ini lumayan banyak, jadi ada baiknya kamu tidak membagikan informasi pribadimu dan menolak jika diajak pergi berdua saja dengan kenalanmu itu.

- e. Kalau pergi malam hari, pastikan kamu tidak sendiri dan tidak melewati jalan yang sepi atau rawan seperti terminal, stasiun, gang sempit, dll.

2. Kasus Pelecehan Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat karena kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Diperkuat dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan pada anak di Indonesia sampai dengan September 2006 telah terjadi 861 kasus, 60% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Indonesia disorot sebagai negara yang memiliki perlindungan yang sangat lemah terhadap anak.

Kekerasan seksual pada anak tidak memandang korbannya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Hal ini diperkuat oleh data yang terdapat pada Jurnal Gail Horner 2010 bahwa anak perempuan dan laki-laki memungkinkan menjadi korban kekerasan seksual. Anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam (Dube et al., 2005 dalam Gail Horner, *Child Sexual Abuse: Consequences and Implication*, 2010).

Kita sering sekali mendengar kasus yang melibatkan anak-anak, di antaranya adalah pelecehan seksual pada anak. Banyak sekali berita-berita di tv dihebohkan oleh kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di salah satu sekolah bertaraf Internasional di Jakarta, yaitu Jakarta International School (JIS).

Dengan adanya kejadian ini membuat para orangtua khawatir dengan keberadaan anak-anaknya yang bersekolah di Jakarta International School (JIS). Dengan adanya kejadian ini para orangtua harus lebih memperhatikan anak-anaknya. Selain itu, dari pihak sekolah pun lebih meningkatkan keamanan untuk kepentingan anak didiknya.

Kasus pelecehan seksual dengan korban murid JIS ini menggemparkan Indonesia. Warga secara dekat mengikuti perkembangan kasus ini melalui

media. Kasusnya sendiri sangat pelik yang terus mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Semuanya berawal pada bulan maret ketika kasus pelecehan seksual terhadap murid muncul di JIS. Seorang murid di TK diyakini diperkosa beramai-ramai oleh beberapa petugas kebersihan.

Kemudian pada juni muncul kasus kedua ketika orangtua murid mengklaim bahwa anak mereka menjadi korban pelecehan seksual. Kasus kedua inilah yang menjerat neil dan ferdi (pelaku pelecehan seksual), dua guru JIS. Kasus ini untuk pertama kalinya menyeret guru atau staf pengajar disekolah tersebut. Tidak lama kemudian ibu korban dari kasus pertama juga menyatakan bahwa neil dan ferdi melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Dari situ kasus ini pun berkembang (Ratna sari, Soni, dkk)

G. Perceraian Rumah Tangga

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya. Amto (Dariyo, 2004:94).

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (dissolution marriage). (Putri, 2008:23)

Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum.

1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

George Levinger (Ihromi, 1999:153-155) pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan;
- b. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga;
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan;
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan;
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain;
- f. Ketidcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan;
- g. Sering mabuk;
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya;
- i. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.

2. Dampak Perceraian

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan memengaruhi perilakunya.

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya.

Menurut Dariyo (2008: 168) dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:

1. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan).
2. Ketidak stabilan dalam pekerjaan

Menurut Wiran dan Sudarto (Wiyaswiyanti, 2008: 37-38), dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:

- a. Adanya perasaan tersingkir dan kesepian.
- b. Persaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda.
- c. Permasalahan hak asuh anak.
- d. Adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara drastis

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Ini berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.

3. Perubahan Nilai dan Tatanan Kehidupan di Kalangan Perempuan Pasca Bercerai

Masyarakat, secara umum menempatkan perempuan dilingkungan keluarga dan rumah tangga. Peranan perempuan dalam lingkup keluarga antara lain

sebagai pemelihara tradisi, norma, dan nilai serta penghubung untuk generasi kedepannya²³. Dengan anggapan ini perempuan yang menjadi janda, setelah perceraian aka menghadapi tantangan tantangan kehidupan di dalam masyarakat. Mereka dianggap sebagai perempuan yang tidak benar.

Sebenarnya keputusan perempuan untuk bercerai tidaklah dilakukan dengan mudah, perempuan mempunyai hati yang sensitif, Perceraian akan menimbulkan prahara jiwa bagi mereka. Namun, opsi untuk bercerai ini mereka ambil demi menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya. Pasca bercerai akan dimulailah peran yang baru. Sebagai seorang janda atau single parent dia harus menghadapi berbagai problematika hidup dengan kekuatan dirinya. Mereka harus menyadari bahwa mereka yang memutuskan kemunculan peran baru tersebut.

Jika perempuan yang bercerai mempunyai anak, maka peran baru dalam pengasuhan anak akan dimulai. Setelah bercerai tugas pengasuhan anak akan berubah dengan dilakukan sendiri, pola pengasuhan anak tentu.

4. Data Kasus Perceraian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), baik angka pernikahan dan perceraian di Indonesia dari 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Dari data tersebut, bisa ditaksir, terjadi satu perceraian dalam setiap lima pernikahan.



Gambar 1.7: Angka pernikahan dan perceraian 2015-2017

Berbicara jumlah pernikahan, data BPS menunjukkan, paling banyak terlaksana di Jawa. Selama tiga tahun berturut-turut, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim) menjadi penyumbang jumlah pernikahan terbanyak di seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk jumlah perceraian di 3 provinsi itu, trennya cenderung turun. Di Jabar rata-rata penurunan angka perceraian per tahun sekitar 5 ribu. Lalu di Jateng sempat stagnan, lalu turun seribu pada 2017. Untuk wilayah Jatim, perceraian turun seribu pada 2016 dan kembali turun dua ribu pada 2017.

H. Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan. Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.

Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.

1. Bentuk-Bentuk Tindakan Kriminal

Tindakan kriminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Contoh, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, perampokan dan lain-lain. Tindakan kejahatan ini menyebabkan pihak lain kehilangan harta benda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Tindak kejahatan juga mencakup semua kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan negara, seperti korupsi, makar, subversi dan terorisme.

Light, Keller, dan Callhoun dalam bukunya yang berjudul *Sociology* (1989) membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu *crime without victim*, *organized crime*, *white collar crime*, dan *corporate crime*.

1. White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih)

Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Contohnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan (korupsi), dan lain sebagainya.

2. Crime Without Victim (Kejahatan Tanpa Korban)

Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Contohnya berjudi, mabuk, dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela.

3. Organized Crime (Kejahatan Terorganisir)

Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (biasanya lebih ke materiil) dengan jalan menghindari hukum. Contohnya penyedia jasa pelacuran, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual, dan lain sebagainya.

4. Corporate Crime (Kejahatan Korporasi)

Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Lebih lanjut Light, Keller, dan Callhoun membagi tipe kejahatan korporasi ini menjadi empat, yaitu kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap publik, kejahatan terhadap pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan.

2. Sebab-Sebab Tindakan Kriminal

Adapun Penyebab Kriminalitas menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles).
- b. Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon, 1600-an).
- c. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial (Voltaire & Rousseau, 1700-an).

- d. Atavistic trait atau Sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal (Cesare Lombroso, 1835-1909).
- e. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional (Teoritis Klasik Lain).

Tindak kriminal juga dapat terjadi karena :

1. Pertentangan dan persaingan kebudayaan.
2. Perbedaan ideologi politik.
3. Kepadatan dan komposisi penduduk

Publikasi Statistik Kriminal 2020 ini menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2017–2019. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, korban, dan kewilayahan. Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, yaitu (1) Data berbasis registrasi (administrative based data) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) Data berbasis survei (survey based data) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan (crime rate) selama periode tahun 2017–2019 mengalami penurunan.

Tingkat risiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2017 sekitar 129, menjadi 113 pada tahun 2018, dan menurun menjadi 103 pada tahun 2019. Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2018–2019 juga memperlihatkan pola menurun. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,11 persen pada tahun 2018 menjadi 1,01 persen pada tahun 2019. Berdasarkan data Podes, selama tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018.

3. Cara penanganan tindakan kriminalitas

Kriminalitas tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Yang bisa hanya dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan.

1. Hukuman. Selama ini hukuman (punishment) menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Dan pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah kriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, fairness, terbuka, dan tepat waktunya;
2. Penghilang Model melalui tayangan media massa itu ibarat dua sisi mata pisau . Ditayangkan nanti penjahat tambah ahli, tidak ditayangkan masyarakat tidak bersiap-siap;
3. Membatasi Kesempatan Seseorang bisa mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Kalau pencuri akan lewat pintu masuk dan kita sudah menguncinya, tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri;
4. Jaga diri Jaga diri dengan ketrampilan beladiri dan beberapa persiapan lain sebelum terjadinya tindak kriminal bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Cara-cara di atas memang tidak merupakan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila diterapkan kasus per kasus;
5. Dengan membuka layanan masyarakat , dengan adanya hal ini polisi atau pihak – pihak yang bertanggung jawab bisa lebih tau apa keluhan masyarakat secara langsung dari masyarakat itu sendiri dan bisa membuat pihak yang bertanggung jawab tersebut lebih mengenal daerah yang rawan akan tindakan criminal. Misal nya bersedia bertindak atau melapor pada yang berwajib apabila menjadi korban suatu tindakan kriminal atau melihat langsung suatu kriminalitas;
6. Kesadaran untuk ikut membantu mencegah tindakan kriminal dengan ikut meronda, melakukan pengawasan pengadaan dana untuk kegiatan pada anak dan pemuda agar tidak terjadinya satu tindakan yang tidak di ingin kan oleh masyarakat.

4. Manfaat dari terjadinya tindakan kriminal

1. Menegaskan nilai-nilai kultural dan norma-norma yang ada di masyarakat;
2. Menciptakan kesatuan sosial dengan menciptakan dikotomi kami dan mereka;
3. Mengklarifikasi batasan-batasan moral;
4. Perilaku menyimpang boleh jadi merupakan pernyataan sikap individu yang menentang terhadap tujuan dan norma dalam kelompok.

I. Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga (Pendekatan Fungsionalisme)

Kekerasan merupakan hal yang kerap terjadi ditengah-tengah masyarakat, kekerasan sendiri merupakan suatu tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan menyakiti orang lain.

Kekerasan juga mempunyai banyak bentuk seperti, kekerasan terhadap diri sendiri (stress, bunuh diri, minum minuman keras dan sebagainya) kekerasan terhadap keluarga, kekerasan terhadap individu (pencurian, perampokan, dan pemerkosaan) kekerasan terhadap organisasi (korupsi, penyalahgunaan antar kelompok, kelas, dan antar bangsa).

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika permasalahan hidup, seringkali banyak dijumpai perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya.

1. Bentuk-bentuk KDRT

Adapun bentuk-bentuk KDRT antara lain adalah :

- a. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul dan lain sebagainya
- b. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa percaya diri yang berkurang. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga akan mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi kepada perempuan.
- c. Kekerasan seksual, yakni merupakan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai.
- d. Penelantaran Rumah Tangga, yakni merupakan perbuatan melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

2. Faktor-faktor Penyebab KDRT

Ada dua faktor penyebab KDRT adalah pertama faktor Internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesama, sehingga cenderung bersikap diskriminatif, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.

Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan diluar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.

Selain itu Rochmat Wahab berpendapat bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut seringkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi. Serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba. Dalam banyak kasus terkadang suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi dan tidak berdaya karena tidak bisa melakukan sesuatu yang mestinya menjadi tanggung jawabnya, hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap untuk menikah.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi karena banyak faktor. Faktor yang sudah disampaikan bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama ini terus meningkat. Namun bahwa segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini jika dibiarkan akan sangat berakibat fatal dikemudian hari.

3. Dampak KDRT

Kasus tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan masalah serius, akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak dan membuat anak akan mengalami gangguan kejiwaan dikemudian hari.

4. Penyelesaian Permasalahan/Solusi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di dalam Rumah Tangga

Pada kali ini kita sering menjumpai kekerasan yang terjadi di masyarakat yaitu terkhusus kekerasan di rumah tangga yang pada umumnya yang menjadi pelaku kekerasan itu adalah suami (KDRT). Namun Kekerasan di dalam masyarakat dapat diidentifikasi dan juga dianalisis dengan pendekatan Fungsionalisme, perlu diketahui bahwa pendekatan fungsionalisme atau pendekatan fakta sosial diperkenalkan oleh Emile Durkheim. Pendekatan ini berupa penelusuran fungsi berbagai elemen sosial sebagai peningkatan sekaligus memelihara keteraturan sosial. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.

Berdasarkan dengan norma-norma, nilai-nilai dan perilaku-perilaku pada umumnya mereka belajar sesuai dengan karakteristik jenis kelamin. Dalam masyarakat menggunakan kekuatan fisik dan perilaku yang agresif atau perilaku yang menggamarkan sebagai laki-laki. Sedangkan perempuan disosialisasikan untuk tunduk kepada otoritas laki-laki dan mereka telah dianjurkan berusaha memilih sifat untuk menggantikan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga.

Mengutip teori struktur fungsional, melihat bahwa peran dan fungsi seorang suami atau ayah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk bersikap tegas dan memecahkan masalah ketidakteraturan pada anggota keluarga. Laki-laki pada umumnya disosialisasikan ke dalam perilaku agresif. Mereka diajarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memecahkan dan menghadapi masalah serta menunjukkan otoritas mereka dalam situasi tertentu. Sedangkan perempuan disosialisasikan untuk tunduk kepada otoritas laki-laki.

Dalam analisis marx (persepektif konflik) tentang kesadaran kelas dan kesadaran palsu, beberapa sosiolog mengatakan bahwa agresi atau penyerangan terhadap kelas pekerja laki-laki menjadikan mereka frustrasi karena beban pekerjaan dan tekanan dari kelas penguasa. Persepsi ini, menitikberatkan pada kekerasan dan ketidaksetaraan kelas dan bukan dalam kekuasaan laki-laki. Kritik-kritik dari persepektif ini dijelaskan bahwa : yang miskin cenderung pada kekerasan , dan perempuan lebih subordinat secara sosial mereka diuntungkan dan secara ekonomi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Persepektif sosiologi tentang penyimpangan telah digunakan untuk memahami kekuasaan dalam keluarga.

Beberapa solusi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di dalam rumah tangga :

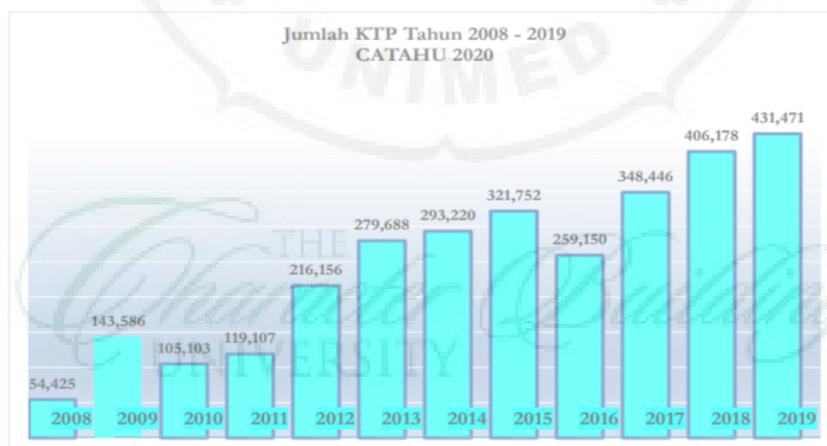
1. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa KDRT merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberi sanksi hukum.
2. Membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
3. Mendorong peranan media massa sebagai media untuk memberikan informasi mengenai pencegahan KDRT

4. Mendampingi korban dalam penyelesaian persoalan serta menyediakan shelter (rumah aman) yang memiliki konselor terpis sebagai tempat pemulihan trauma.
5. Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan baik di media sosial, elektronik, maupun di media cetak.

5. Data KDRT Di Indonesia

Tingkat KDRT di Indonesia semakin meningkat begitu juga angka perceraian selalu meningkat setiap tahunnya. Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) menjadi penyebab terbesar di dalam rumah tangga. Kasus tindakan KDRT terbesar terdapat di Jawa barat dan Jawa Timur dengan masing-masing sebesar 1.459 dan 1.455 kasus.

GAMBARAN UMUM: JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019 DALAM CATAHU 2020

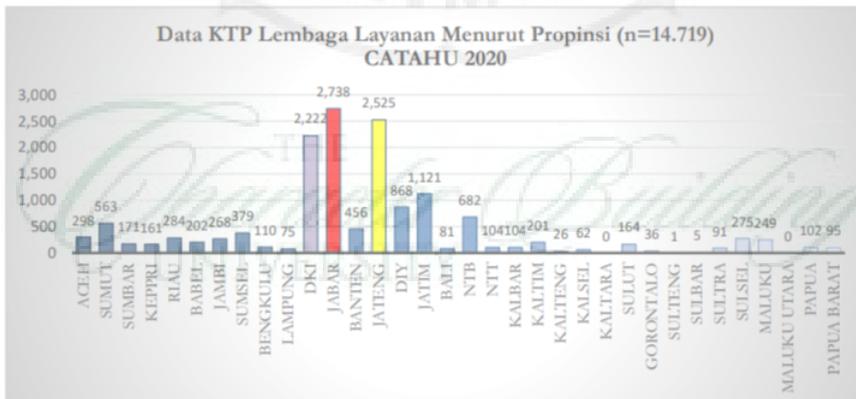


Gambar 1.8: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data formulir kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.

Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es,

yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman. Arti lainnya adalah bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat.

Sementara angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Provinsi yang tertinggi berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Jawa Barat menjadi tertinggi (2.738) lalu Jawa Tengah (2.525) DKI Jakarta (2.222). Tahun sebelumnya angka kekerasan tertinggi adalah Jawa Tengah (2.913), kedua DKI Jakarta (2.318) dan ketiga Jawa Timur (1.944), tetapi tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di Provinsi tersebut. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Pengada Layanan di Provinsi tersebut serta kualitas dan kapasitas pendokumentasian Lembaga. Sangat mungkin rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi tertentu disebabkan oleh tidak adanya lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor. Berikut diagram data yang dimaksud.



Gambar 19: Data KTP Lembaga Layanan Menurut Provinsi

6. Angka KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Komnas Perempuan melaporkan bahwa KDRT menjadi kasus yang kekerasan paling banyak dilaporkan terdapat 319 kasus kekerasan yang telah dilaporkan selama pandemi Covid-19 dua pertiga dari angka tersebut merupakan kasus KDRT. Data dari lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) juga menunjukkan bahwa terdapat 110 kasus KDRT yang telah dilaporkan, sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai tanggal 16 maret sampai 20 juni. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut angka kasus KDRT telah mencapai setengah dari angka kasus KDRT selama 2019.

J. Penyalahgunaan Narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu narkie atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah sosial yang menjadi suatu kejahatan yang sangat besar di Indonesia. Salah satu penyebab masyarakat terjebak tindakan kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain mereka bekerja di dunia narkoba sebagai pelaku, pengedar, kurir, maupun sebagai Bandar narkoba. Tingginya penggunaan narkoba terutama dikalangan pemuda menimbulkan kekhawatiran akan adanya generasi yang sepenuhnya terbuang karena manusianya mati atau tidak bisa berprestasi karena terjerat narkoba.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain itu juga sering dikatakan istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh KEMENKES Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu. Bagi dua sisi narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Namun kebanyakan orang banyak meyalahgunakan pemakaian narkoba sehingga membuat pemakai menyebabkan kecanduan dan dari situ muncul masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba.

1. Faktor-faktor terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

a. Faktor Subversi

Dengan jalan memasyarakatkan narkoba di negara yang menjadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya di ikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang menjadi sebab kebanyakan orang memilih untuk menjadi pengguna narkoba, pengedar narkoba, bahkan menjadi orang yang memasukkan narkoba dalam jumlah yang besar. Narkotika adalah komoditi yang menguntungkan meskipun ancaman dan risikonya cukup berat.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang sudah menjadi tercemar akibat dari narkoba itu sendiri membuat kebanyakan orang yang tinggal disuatu tempat yang sudah tercemar oleh narkoba. Sehingga membuat seseorang mendapat hasutan untuk memakai narkoba.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

Cara yang sederhana dalam menanggulangi narkoba yaitu :

- a. Pengawasan yang ketat dan pengendalian di dalam ketersediaan narkotika yang digunakan untuk obat-obatan dan pelayanan kesehatan juga pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Tindakan yang tegas kepada pelaku kejahatan narkoba dengan hukuman yang berat untuk membuat pelaku jera dengan hukuman yang seberat-beratnya.
- c. Peran serta masyarakat dan orang tua, bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba guna dapat mencegah berkembangnya narkoba ditengah-tengah masyarakat.

K. Kesenjangan Sosial

1. Pengertian Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial merupakan suatu keadaan atau juga kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat, baik perorangan atau juga organisasi ataupun kelompok, yang terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap itu penting bagi masyarakat.

Kesenjangan sosial ini sering kali dikaitkan dengan adanya perbedaan yang nyata dari segi finansial masyarakat mencakup itu kekayaan harta, barang, serta jasa dan sebagainya. Kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat bisa dapat kita lihat dari adanya peluang serta manfaat yang tidak sama untuk posisi sosial yang berbeda di dalam masyarakat.

Pengertian Kesenjangan Sosial Menurut Para Ahli

1. Menurut Abad Badruzaman (2009;284) kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Atau dapat juga diartikan suatu keadaan di mana orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang miskin;
2. Menurut Soerjono Soekanto, kesenjangan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur- unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial;
3. Sebagai teoritis struktural fungsional, Emile Durkheim cenderung melihat ketimpangan sosial sebagai pembedaan fungsi dalam struktur sosial yang tak terhindarkan;
4. Max Weber, teoritis tindakan sosial akan menilai ketimpangan sosial sebagai hasil dari perbedaan kepentingan masing-masing individu yang diekspresikan dalam sistem perilaku dan tindakan.

2. Faktor Penyebab Kesenjangan Sosial

Terjadinya kesenjangan tentunya ada sebab, banyak faktor, yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial di antaranya sebagai berikut :

1. Perbedaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam berubungan dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Apabila dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, laju perekonomian suatu daerah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, tingkat perekonomian suatu daerah rendah apabila masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal.

2. Kebijakan Pemerintah

Sering sekali kebijakan pemerintah dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Misalnya kebijakan tentang program transmigrasi. Ketika warga pendatang lebih cepat maju dibandingkan dengan warga asli, ketimpangan sosial dapat terjadi. Ketimpangan sosial tersebut terjadi karena adanya ketidaksetaraan antar dua kelompok yang seharusnya dapat berkembang bersama-sama

3. Pengaruh Globalisasi

Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan mampu memanfaatkan globalisasi untuk mencapai kemajuan. Sementara itu masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan globalisasi secara tepat tidak akan mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan globalisasi. Bahkan mengalami ketertinggalan.

4. Faktor Demografis

Kondisi Demografis menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, serta segala hal yang berkaitan dengan penduduk.

5. Letak dan Kondisi Geografis

Letak dan kondisi geografis Indonesia memengaruhi tingkat pembangunan suatu masyarakat. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah umumnya lebih mudah membangun berbagai infrastruktur, sementara masyarakat yang tinggal di dataran tinggi membutuhkan waktu dan proses panjang dalam pembangunan

karena terkendala kondisi alam yang menanjak dan tidak merata. Menurunnya pendapatan per kapita..

6. Kemiskinan

Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi:

Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

7. Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan merupakan pekerjaan bagi pemerintah saat ini.

3. Dampak kesenjangan sosial

Dampak Negatif

- a. Menumbuhkan sifat malas.
- b. Ketidakpuasan terhadap sesuatu.
- c. Mudah putus asa yang menghambat mobilitas kerja.
- d. Timbulnya Kecemburuan sosial.
- e. Banyak terjadi tindak kriminalitas

Contoh Kesenjangan Sosial, berikut ini beberapa contoh kesenjangan sosial dalam kehidupan sehari-hari:

1. Koruptor yang memakan uang rakyat hingga milyaran rupiah hanya ditahan selama 3 tahun sedangkan orang yang maling ayam dapat ditahan hingga belasan tahun.

2. Tidak adanya fasilitas transportasi yang cukup layak untuk penderita cacat.
3. Orang yang berpenampilan dengan pakaian mahal dan bagus diperlakukan dengan sangat baik oleh pelayan berbeda dengan orang yang berpenampilan biasa saja.

4. Solusi Kesenjangan Sosial

Kesenjangan Sosial pada Umumnya terjadi di masyarakat Secara internal masyarakat harus mulai terbuka dengan dunia luar, masyarakat juga tidak boleh alergi pada perubahan. Melanggengkan kebudayaan yang dimiliki tentu sangat penting dalam rangka menjaga kearifan lokal, tetapi masyarakat desa harus memiliki misi dan visi jelas dan terukur sehingga mereka dapat mengambil inisiatif untuk merubah nasib mereka.

Tanpa perubahan mind set yang selama ini memang telah mengakar kuat pada masyarakat desa, tentunya mereka akan sulit untuk keluar dari belenggu keterbelakangan karena salah satunya minimnya persaingan di antara mereka. Masyarakat yang hidup bersama dengan mata pencaharian yang tidak jauh berbeda biasanya tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk bersaing satu sama lain. Kalau pun di antara penduduk desa ada ketimpangan pendapatan, umumnya tidak terlalu ekstrim.

Selain itu, Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang diluar masyarakat itu sendiri. Desain kebijakan pemerintah harus menitikberatkan kepada hal-hal berikut :

1. Kebijakan pemerintah harus menekankan kepada peningkatan/perbaikan infrastruktur desa terutama pada desa-desa yang kondisi geografisnya tidak menguntungkan.
2. Akses terhadap pendidikan, informasi dan kesehatan gratis harus menjadi prioritas bagi pemerintah sehingga akselerasi pembangunan dapat terwujud dengan efektif.
3. Pemerintah perlu memberikan bantuan modal bagi masyarakat sehingga mereka dapat memiliki mata pencaharian alternatif, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian. Bantuan modal tentunya sangat membantu masyarakat karena mereka dapat memanfaatkannya untuk mendirikan usaha. Mata pencaharian alternative ini pada

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, terutama pada masyarakat desa yang tanahnya gersang dan tidak menjanjikan.

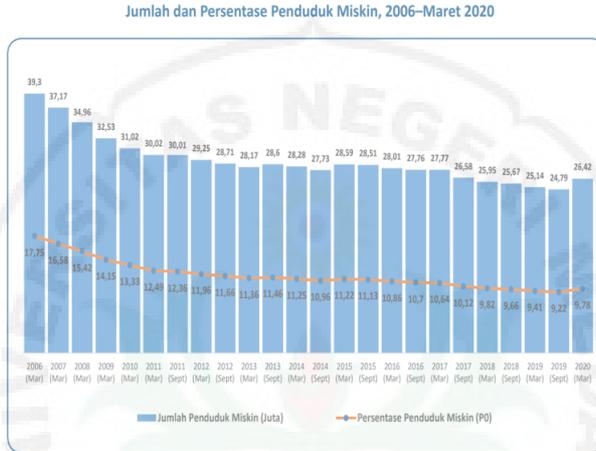
4. Berkaitan dengan political will pemerintah, segregasi atau eksklusi terhadap masyarakat pedesaan baik dari aspek etnik, suku, agama, gender dan sejenisnya harus dihapuskan.

Beberapa solusi di atas tentu dapat menjadi input bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terutama berkaitan dengan peningkatan taraf hidup desa agar menjadi lebih baik. Dengan demikian, desa yang selama ini identik dengan keterbelakangan lambat laun dapat mengalami akselerasi secara cepat menjadi masyarakat yang lebih maju.

Menurut Karl Marx selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka pada kelas berkuasalah akan terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Hukum, filsafat, agama, dan kesenian merupakan suatu refleksi dari status ekonomi kelas tersebut. Namun, demikian hukum-hukum perubahan berperan dalam sejarah hingga keadaan tersebut dapat berubah. Akan tetapi, selama masih ada kelas yang berkuasa maka tetap terjadi eksploitasi terhadap kelas yang lebih lemah. Oleh karena itu, selalu timbul pertikaian antara kelas-kelas tersebut, pertikaian mana akan berakhir apabila salah satu kelas (yaitu kelas proletar) menang, sehingga terjadilah masyarakat tanpa kelas.

5. Data Kesenjangan Sosial Di Indonesia

Kesenjangan di Indonesia sangat perlu diperhatikan lebih lagi, secara umum pada periode 2006-maret 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2006 sampai dengan Maret 2020



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 1.11: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006-Maret 2020

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Pada Maret 2020 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2020. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,34 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,81 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (14,05 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,97 juta orang).

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2020

Pulau	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	8,39	11,01	9,87	2 154,41	3 683,06	5 837,47
Jawa	7,48	12,64	9,24	7 493,53	6 559,28	14 052,81
Bali dan Nusa Tenggara	8,56	17,69	13,55	582,20	1 450,63	2 032,83
Kalimantan	4,35	7,13	5,81	345,36	624,28	969,64
Sulawesi	5,63	13,12	10,10	452,28	1 554,50	2 006,78
Maluku dan Papua	5,25	28,15	20,34	134,18	1 390,31	1 524,49
Indonesia	7,38	12,82	9,78	11 161,96	15 262,06	26 424,02

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020

Gambar 1.12: Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2020



THE
Character Building
UNIVERSITY

Bab 2

Konsep Dasar dan Implementasi Keluarga dan Perkawinan dalam Masyarakat Modern

A. Prosesi Pernikahan Suku Batak Toba Tradisional

Pernikahan atau perkawinan dalam Batak Toba merupakan tahapan awal dimana kedua mempelai mulai memasuki adat Batak secara penuh. Seperti pada suku lain, Batak Toba menempatkan proses dan tahapan pernikahan merupakan sesuatu ritual yang sakral dan penuh makna. Sebab memulai suatu keluarga dalam adat Batak Toba berarti memulai suatu tahapan pembentukan lingkungan sosial adat kecil yang nantinya mampu menyokong adat horja yang lebih besar dalam ruang lingkup Dalihan na Tolu dan bentuk pelaksanaannya dalam tata cara Suhi ni Ampang na Opat.

Dalam hal ini adat dalihan na tolu adalah Filosofis atau wawasan sosial-kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Dalam adat batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama.

Ketiga tungku tersebut adalah:

1. Pertama, Somba Marhulahula/sembah/hormat kepada keluarga pihak istri.
2. Kedua, Elek Marboru (sikap membujuk/mengayomi wanita)
3. Ketiga, Manat Mardongan Tubu (bersikap hati-hati kepada teman semarga)

Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Dalam adat batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama, ketiga hal tersebut:

1. Somba Marhulahula: ada yang menafsirkan pemahaman ini menjadi “menyembah hul-hula, namun ini tidak tepat. Memang benar kata Somba, yang tekananya pada som berarti menyembah, akan tetapi kata Somba di sini tekananya ba yang adalah kata sifat dan berarti hormat. Sehingga Somba marhula-hula berarti hormat kepada Hulahula. Hulahula adalah kelompok marga istri mulai dari istri kita, kelompok marga ibuistri bapak), kelompok marga istri opung, dan beberapa generasi; kelompok marga istri anak, kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara dan seterusnya dari kelompok dongan tubu. Hulahula ditengarai sebagai sumber berkat. Huluhula sebagai sumber hagabeon/keturunan. Keturunan diperoleh dari seorang istri yang berasal dari huluhula. Tanpa huluhula tidak ada istri, tanpa istri tidak ada keturunan.
2. Elek Marboru/lemah lembut terhadap boru/perempuan Berarti rasa sayang yang tidak disertai maksud tersembunyi dan pamrih. Boru adalah anak perempuan kita, atau kelompok marga yang mengambil

istri dari anak kita(anak perempuan kita). Sikap lemah lembut terhadap boru perlu, karena dulu borulah yang dapat diharapkan membantu mengerjakan sawah di ladang. Tanpa boru, mengadakan pesta suatu hal yang tidak mungkin dilakukan.

3. Manat mardongan tubu/sabutuha, suatu sikap berhati-hati terhadap sesama marga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat. Hati-hati dengan teman semarga. Kata orang tua-tua “hau na jonok do na boi marsiogoson” yang berarti kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Ini menggambarkan bahwa begitu dekat dan seringnya hubungan terjadi, hingga dimungkinkan terjadi konflik, konflik kepentingan, kedudukan, dan lain-lain. Dengan begitu, diajarkan untuk selalu menjaga ubungan dengan dengan kerabat.

Inti ajaran Dalihan Natolu adalah kaidah moral berisi ajaran saling menghormati (masipasangapon) dengan dukungan kaidah moral: saling menghargai dan menolong. Dalihan Natolu menjadi media yang memuat asas hukum yang objektif.

Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan adat na gok, yaitu pernikahan orang Batak Toba secara normal atau adat Batak Toba yang dilakukan secara tradisional di bona pasogit atau di kampung halaman berdasarkan ketentuan adat terdahulu.

Adat Na Gok (Membayar Adat)

Dikatakan Perkawinan Adat Nagok, jika acara itu sudah dihadiri dan direstui/ditolopi Suhi ni Ampang Na Opat (Dalihan Na Tolu) dari masing-masing pihak suhut. Bagi orang yang sudah menyelenggarakan adat nagok, disebut juga ia sudah membayara adatnya. Dan bagi yang belum menyelenggarakan adat na gok disebut “belum diadati” yaitu jika ia mangalua (kawin lari) kawin tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun maiturun jika mereka kawin dengan persetujuan masing-masing pihak tetapi acara adat na goknya belum dapat diselenggarakan saat itu.

Orang yang belum diadati, tidak berhak menyelenggarakan adat (memberi atau menerima adat) baik adat kematian maupun adat semasih hidup. Misalnya seseorang tidak bisa menyelenggarakan adat perkawinan anaknya jika ia sendiri belum diadati. Demikian juga sehari-hari, ia tidak bisa mangulosi dan juga berbicara/jurubicara acara adat atau raja parhata dalam satu acara adat.

Aturan ini sangat logis, karena bagaimana seorang menyelenggarakan adat sementara ia sendiri belum membayar/masih utang adat.

Dalam beberapa peristiwa seseorang terpaksa buru-buru mangadati ketika ia mau mengawinkan anaknya (undangan sudah jalan) karena ketahuan dia belum mangadati. Hal ini sesungguhnya tidak dapat di benarkan dan “sada hailaan” do on. Kenapa selama ini dia “tidak bayar utangnya”, kemana saja selama ini?

Sekarang ini ada pergeseran, dang mangadati be angka na umposo alani alasan ekonomis dan praktis bahkan mereka berprinsip untuk apa menghamburkan uang sebanyak itu sementara setelah menikah tinggal di kontrakan kecil dan tidak punya perlengkapan rumah tangga, jika memang punya dana sebanyak itu lebih baik beli rumah kecil sederhana berikut perlengkapannya. Pendapat ini ada benarnya dan dapat kita terima namun bukan berarti karena alasan itu jadi tidak mangadati. “Ai adat do nametmet adat do na balga”. Manggarar adat (adat na gok) tidak harus di gedung dan menghabiskan dana puluhan hingga ratus juta. Di rumah pun dilaksanakan hal itu sah asal dihadiri dan direstui/ditolopi Suhi ni Ampang Na Opat (Dalihan Na Tolu) dari masing2 pihak suhut.

Berikut ini adalah ketentuan dan tahap-tahap prosesi pernikahan adat batak toba secara “Dalihan Natolu”.

1. Mangaririt

Mangaririt adalah ajuk-mengajuk hati atau memilih gadis yang akan dijadikan menjadi calon istrinya sesuai dengan kriterianya sendiri dan kriteria keluarga. Acara mangaririt ini dilakukan kalau calon pengantin laki-lakinya adalah anak rantau yang tidak sempat mencari pasangan hidupnya sendiri, sehingga sewaktu laki-laki tersebut pulang kampung, maka orang tua dan keluarga lainnya mencari perempuan yang cocok denganya untuk dijadikan istri, tetapi perempuan yang dicarikan tersebut harus sesuai dengan kriteria silaki-laki dan kriteria keluarganya.

2. Mangalehon Tanda

Mangalehon tanda artinya memberikan tanda yang apabila laki-laki sudah menemukan perempuan sebagai calon istrinya, maka keduanya kemudian saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya memberikan uang kepada perempuan sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki,

setelah itu maka laki-laki dan perempuan itu sudah terlibat satu sama lain. Laki-laki kemudian memberitahukan hal itu kepada orang tuanya, orang tua laki-laki akan menyuruh prantara atau domu-domu yang sudah mengikat janji dengan putrinya.



Gambar 2.1: Mangalehon Tanda

Sumber : <https://budaya-indonesia.org/Mangalehon-Tanda>

Tahapan mangalehon tanda juga biasanya disebut tukar cincin. Acara tukar cincin dilakukan ketika pasangan suami istri sudah di berkati oleh Pendeta di gereja dan setelah selesai mengucapkan janji suci perkawinan mereka yang isinya bahwa mereka akan saling setia, saling menerima pasangannya masing-masing, saling mendukung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain selain dipisahkan oleh kematian. Dulu acara Mangalehon tanda apabila laki-laki sudah menemukan perempuan sebagai calon istrinya, maka keduanya kemudian saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya memberikan kain kepada perempuan sedangkan perempuan menyerahkan sapu tangan kepada laki-laki.

3. Marhusip

Marhusip artinya berbisik, namun pengertian dalam tulisan ini adalah pembicaran yang bersifat tertutup atau dapat juga disebut perundingan atau pembicaraan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan, mengenai jumlah mas kawin yang harus di sediakan oleh pihak laki-laki yang akan diserahkan kepada pihak

perempuan. Hasil-hasil pembicaraan marhusip belum perlu diketahui oleh umum karena menjaga adanya kemungkinan kegagalan dalam mencapai kata sepakat. Marhusip biasanya diselenggarakan di rumah perempuan. Domu-domu calon pengantin laki-laki akan menerangkan maksud kedatangan mereka pada kaum kerabat calon pengantin perempuan.



Gambar 2.2: Marhusip

Sumber : <http://ermor.blogspot.com/2013/06/tradisi-marhata-sinamot-pada-perkawinan-suku-batak-toba.html>

4. Patua Hata

Setelah mencapai kesepakatan pada marhori-hori dinding, dilanjutkan dengan patua hata yang membahas waktu pernikahan, marhusip, jumlah undangan, tempat pesta, jumlah sinamot, bentuk ulaon dan sebagainya. Pembicaraan tersebut akan kembali dibahas pada marhusip.

5. Marhata Sinamot

Marhata sinamot biasanya diselenggarakan setelah selesai membagikan jambar. Marhata sinamot adalah membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang disembelih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan dan dimana dilaksanakan upacara pernikahan tersebut. Adat marhata sinamot bisa juga dianggap sebagai pengenalan resmi antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Mas kawin yang diserahkan pihak laki-laki

biasanya berupa uang sesuai jumlah mas kawin tersebut di tentukan lewat tawar-menawar.



Gambar 2.3: Marhata Sinamot

Sumber : <https://vikakristina.wordpress.com/2017/05/30/marhusip-day-marhata-sinamot-patua-hata-uyeah/>

6. Pudun Saut

Pihak kerabat pria tanpa hula-hula mengantarkan wadah sumpit berisi nasi dan lauk pauknya (ternak yang sudah disembelih) yang diterima oleh pihak parboru dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian Jambar Juhut (daging) kepada anggota kerabat, yang terdiri dari:

1. Kerabat marga ibu (hula-hula)
2. Kerabat marga ayah (dongan tubu)
3. Anggota marga menantu (boru)
4. Pengetuai (orang-orang tua)/pariban

Diakhir kegiatan Pudun Saut maka pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu Martumpol dan Pamasu-masuon.



Gambar 2.4: Pudun Saut

Sumber : <http://marinaocta.blogspot.com/2017/09/marhusip-marhata-sinamot-dan-pudun-saut.html>

7. Martumpol (Martuppol)

Martumpol bagi orang Batak Toba bisa disebut juga sebagai acara pertunangan tetapi secara harafiah martupol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Upacara adat ini diikuti oleh orang tua kedua calon pengantin dan keluarga mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di dalam gereja, karena yang mengadakan acara martumpol ini kebanyakan adalah masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen.



Gambar 2.5: Martumpol

Sumber : <http://thebridedept.com/momen-marhusip-martumpol-dinda-kevin/>

8. Martonggo Raja atau Maria Raja

Martonggo raja merupakan suatu kegiatan pra upacara adat yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non teknis. Pada adat ini biasanya dihadiri oleh teman satu kampung, dongan tubu (saudara). Pihak hasuhuton (tuan rumah) memohon izin kepada masyarakat sekitar terutama dongan sahuta (teman sekampung) untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan.



Gambar 2.6: Martonggo Raja

Sumber :

<https://www.kompasiana.com/irmina.gultom/5b628a41677ffb3739121073/sulinya-mengesampingkan-gengsi-di-pernikahan-adat-batak?page=all>

9. Manjalo Pasu-pasu Parbagason (Pemberkatan Pernikahan)

Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di Gereja oleh Pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Setelah pemberkatan dari Gereja selesai, lalu kedua belah pihak pulang ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak dimana acara ini dihadiri oleh seluruh undangan dari pihak laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak ada perbedaan antara secara tradisional dan modern. Namun, sebelum masuknya agama Kristen mempelai akan diberkati

oleh Kepala Suku setempat. Namun, saat ini mempelai yang akan menikah akan diberkati oleh Pendeta.



Gambar 2.7: Pemberkatan Pernikahan

Sumber : <https://adekbutet.wordpress.com/2008/11/12/peknikahan-adat-batak/>

10. Ulaon Unjuk (Pesta Adat)

Setelah selesai pemberkatan dari Gereja, kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat yaitu dari seluruh keluarga khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Selanjutnya dilaksanakan pembagian jambar (jatah) berupa daging dan juga uang yaitu: Jambar yang dibagi-bagikan untuk pihak perempuan adalah jambar juhut (daging) dan jambar tuhor ni boru (uang) dibagi sesuai peraturan.



Gambar 2.8: Membagi Jambar (Daging)

Sumber : <https://www.tobatabo.com/516+ruhut-ni-jambar-dohot-parjamberan-adat-batak-toba.htm>

Jambar yang dibagi-bagikan untuk pihak pria adalah dengke (dekke/ ikan mas arsik) dan ulos yang dibagi sesuai peraturan. Pesta Adat Unjuk ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin ke rumah paranak.



Gambar 2.9: Membagi Jambar (Ikan)

Sumber : http://siraitmargaku.blogspot.com/2012/09/urutan-acara-pernikahan-adat-batak-toba_22.html

11. Ditaruhon Jual

Jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para naboru-nya ke tempat naboru-nya. Dalam hal ini paranak wajib mengasih upa manaru (upah mengantar), sedang dalam dialap jual upa manaru tidak diberlakukan.

12. Parboru makan bersama di tempat kediaman si Pria (Daulat ni si Panganon)

- a. Setibanya pengantin wanita beserta rombongan di rumah pengantin pria, maka diadakanlah acara makan bersama dengan seluruh undangan yang masih berkenan ikut ke rumah pengantin pria.
- b. Makanan yang dimakan adalah makanan yang dibawa oleh pihak parboru



Gambar 2.10: Daulat Ni Sipanganon

Sumber : <https://rogerhannes.wordpress.com/2015/10/13/adat-pernikahan-batak-toba/>

12. Paulak Une

Adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling kunjung mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan. Pihak

pengantin laki-laki dan kerabatnya, bersama pengantin mengunjungi rumah pihak orang tua pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak perempuan mengetahui bahwa putrinya betah tinggal di rumah mertuanya.

Setelah satu, tiga, lima atau tujuh hari si wanita tinggal bersama dengan suaminya, maka paranak, minimum pengantin pria bersama istrinya pergi ke rumah mertuanya untuk menyatakan terima kasih atas berjalannya acara pernikahan dengan baik, terutama keadaan baik pengantin wanita pada masa gadisnya (acara ini lebih bersifat aspek hukum berkaitan dengan kesucian si wanita sampai ia masuk di dalam pernikahan). Setelah selesai acara paulak une, paranak kembali ke kampung halamannya/rumahnya dan selanjutnya memulai hidup baru.



Gambar 2.11: Paulak Une

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=TXsMCQgdv3Y>

13. Manjae

Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup berumah tangga (kalau laki-laki tersebut bukan anak bungsu), maka ia akan dipajae, yaitu dipisah rumah (tempat tinggal) dan mata pencarian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya.

14. Maningkir Tangga

Setelah pengantin manjae atau tinggal di rumah mereka. Orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama. Demikianlah beberapa proses dan tahapan dalam adat Batak

Toba. Idealisnya proses ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, tetapi seiring dengan perkembangan jaman, mis: penganting adalah pangaratto yang tidak punya waktu dan cukup materi untuk karena terpisahkan jarak, maka ada istilah melakukan adat na gok. Dalam arti beberapa tahapan digabung menjadi satu bagian dalam satu hari adat pernikahan.



Gambar 2.12: Maningkir Tangga

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=TXsMCQgdv3Y>

Pelaksanaan adat Batak Toba yang cukup kompleks kiranya mampu menjadi warisan budaya sebagai tahapan awal keluarga mempelai mulai memasuki kehidupan maradat dalam lingkup dalihan na tolu. Proses ini juga meunjukkan keaneka ragaman budaya adat Batak Toba, yang begitu menempatkan pernikahan sebagai suatu proses sakral dan penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Kiranya ulasan ini mampu memberi wawasan dan pandangan yang lebih luas buat para generasi Batak untuk semakin menghargai dan menjaga kelestarian budaya Batak pada umumnya. Buat dongan-dongan yang mempunyai masukan atau ide-ide, dengan senang hati kami menerimanya di kolom komentar di bawah.

B. Prosesi Pernikahan Suku Batak Toba Modern

Pada dasarnya dalam prosesi adat batak toba modern, seperti yang diadakan di berbagai kota besar tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan di bona pasogit atau di kampung halaman. Perbedaan yang dapat dilihat, dapat berupa waktu pelaksanaan dan pengurangan beberapa prosesi adat, untuk mengefisienkan waktu. Adapun prosesi adat dalam pernikahan adat Batak Toba secara modern, yaitu sebagai berikut :

1. Marhusip

Dalam adat Batak Toba, marhusip diartikan sebagai salah satu bagian dalam adat, yang mana pertemuan antara utusan dari keluarga pihak paranak (laki-laki) dengan utusan dari pihak parboru (perempuan), untuk membicarakan tentang marhata sinamot. Dalam pernikahan adat Batak Toba secara modern, pelaksanaan marhusip ini juga sama dilakukan seperti bona pasogit.

2. Marhata Sinamot

Pelaksanaan adat marhata sinamot merupakan prosesi, yang mana pemberian mahar dari pihak paranak (laki-laki) terhadap pihak parboru (perempuan). Dalam masyarakat modern. Proses marhata sinamot ini, akan dibicarakan tentang biaya-biaya dalam pernikahan, termasuk di dalamnya dalam biaya makanan, biaya untuk raja parhata, ulos, dan tempat pelaksanaan prosesi adat. Banyak sumber yang menjelaskan bahwa pelaksanaan marhata sinamot saat ini hanya sekedar formalitas saja. Di samping itu, menurut Pasaribu (2008 : 760), dalam marhata sinamot yang dilakukan di bona pasogit, sebagian sinamot akan diberikan setelah acara tersebut dilaksanakan, yang disebut dengan “Bohi ni Sinamot”. Sedangkan dalam masyarakat modern, tidak semua melaksanakan seperti itu.

3. Sibuhai-buhai

Dalam sibuhai-buhai ini, tidak terdapat perubahan, dalam tata adat ini, dilakukan pada hari pernikahan, yang mana pihak paranak (laki-laki) akan datang ke kediaman pihak parboru (perempuan) dan membawa seserahan, yang kemudian dilanjutkan dengan makan pagi di tempat perempuan. Setelah itu, para rombongan akan berangkat ke Gereja untuk melakukan pemberkatan

pernikahan. Meskipun dalam tata acara tidak terdapat perubahan yang signifikan, namun dalam waktu pelaksanaan terdapat perubahan. Jika prosesi adat yang dilakukan di bona pasogit, akan dilakukan pagi hari. Secara modern biasanya akan dimulai pada menjelang siang hari.

4. Pemberkatan Pernikahan

Sebenarnya ini bukan bagian dalam prosesi adat. Dahulunya sebelum masuknya agama Kristen, di bona pasogit, pernikahan dilakukan oleh Kepala Nagari setempat atau disebut juga sebagai Kepala Suku, untuk memberkati mempelai yang menikah pada masa dulu. Namun, seiring dengan masuknya agama Kristen, baik secara modern maupun di bona pasogit ataupun kampung halaman pernikahan adat Batak Toba telah dilaksanakan di Gereja dan diberkati oleh Pendeta.

5. Marunjuk

Dalam adat Batak Toba, acara marunjuk ini dikenal sebagai suatu prosesi yang mana pemberian seekor hewan dari pihak paranak (laki-laki) terhadap pihak parboru (perempuan) yang nantinya akan di makan bersama . Di bona pasogit, acara ini lengkap dilakukan di dalam prosesi pernikahan adat tersebut, namun secara modern sendiri, tidak semua orang Batak Toba melakukannya, meskipun sebenarnya masih terdapat dibeberapa pernikahan orang Batak Toba saat ini. Menurut Pasaribu (2008 : 761), terjadi perubahan dalam pelaksanaan marunjuk ini di kota-kota besar, yang mana marunjuk digabung dalam tata acara marhata sinamot, paulek ume, dan maningkir tangga. Hal tersebut dilakukan untuk mengifisienkan waktu pelaksanaan pernikahan.

6. Paulak Ume

Menurut Adonis, dkk (1993 : 43), paulak ume ini merupakan bagian dari adat yang dilakukan setelah prosesi pernikahan dilangsungkan. Jadi, dalam tata caranya, dilakukan dengan pihak paranak (laki-laki) bersama dengan pengantin akan datang ke tempat tinggal pihak parboru (perempuan) dengan membawa seserahan berupa makanan. Namun, secara modern saat ini pelaksanaan paulak ume ini tidak dilakukan lagi di tempat tinggal pihak parboru (perempuan), dan langsung dilaksanakan di tempat berlangsung prosesi pernikahan. Jadi, setelah diadakan semua prosesi pernikahan, acara paulak ume ini akan dilakukan di tempat tersebut juga. Hal ini umumnya dilakukan agar waktu lebih efisien. Namun, tentunya saja pelaksanaan paulak

ume, menimbulkan bahwasanya adat paulak ume ini tidak penting, dan hanya dilakukan sebagai formalitas saja. Hal ini menurut orang Batak sebenarnya mampu menghilangkan makna dari prosesi paulak ume itu.



Gambar 2.13: Paulak Ume secara Modern

Sumber : <https://pakem.wordpress.com/2008/08/13/paulak-une/>

7. Maningkir Tangga

Maningkir tangga dalam adat Batak Toba juga dilakukan setelah prosesi pernikahan dilaksanakan, yang mana dalam adat ini sama seperti paulak ume, namun dalam maningkir tangga pihak parboru (perempuan) yang akan mengunjungi rumah pihak paranak (laki-laki). Menurut Adonis, dkk (1993 : 44), bahwasanya dalam maningkir tangga dilakukan agar orang tua pihak perempuan dapat mengenali hela (menantu laki-laki mereka). Seperti halnya dalam acara adat paulak ume, dalam adat maningkir tangga ini pihak parboru (perempuan) juga akan membawa makanan ke kediaman pihak paranak (laki-laki).

Namun, dalam adat modern juga terdapat perubahan, yang mana pelaksanaannya hanya sekedar formalitas, dan saat ini umumnya juga tidak dilakukan di tempat tinggal pihak paranak (laki-laki). Terdapat perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan adat ini. Hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya makna dari adat tersebut.

C. Sikap Pelaksana Adat Terhadap Tamu Non-Kristen

Dalam pelaksanaan adat Batak Toba, terkadang tamu yang diundang tidak hanya beragama Kristen. Maka dalam hal ini tentu akan terdapat perlakuan berbeda terhadap tamu yang non-Kristen, terkhusus untuk tamu yang beragama Islam. Seperti yang diketahui bahwasanya dalam adat Batak Toba sangat erat kaitan dengan daging Babi. Umumnya pelaksanaan adata yang dilakukan di wisma akan dibuat tempat khusus untuk tamu yang Muslim.

Kemudian, dalam makanan sendiri, umumnya akan disediakan khusus nasi kotak oleh pelaksana pernikahan. Namun, dalam prosesi adat tidak terdapat perbedaan. Tamu yang non-Kristen, tetap akan ikut dalam prosesi adat pernikahan, terlebih jika masih kerabat dengan pelaksana kegiatan tersebut. Termasuk di dalamnya untuk memberikan ulos kepada mempelai, namun jika tamu tersebut hanya sekedar umumnya yang diberikan adalah berbentuk hadiah secara umum.

D. Perubahan Antara Perkawinan Batak Toba Tradisional Dengan Modern

Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Batak Toba dianggap sebagai suatu yang sakral, dimana perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu. Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba yakni dimulai dari marhori-hori dinding, marhusip, martumpol, marhata sinamot, pesta unjuk, paulak une, dan maningkir tangga. Walaupun dibatasi jumlahnya tidak akan muat dalam suatu rumah yang besar.

Untuk itu dibutuhkan suatu gedung pertemuan (wisma) yang dapat menampung ribuan undangan. Kemudian sama dengan pesta perkawinan yang dilaksanakan di bonani pasogit, adapun pesta di laksanakan di halaman rumah supaya "semua orang tau" begitulah istilahnya. Perkawinan bukan hanya menyangkut dua pribadi (pengantin) tetapi mencakup seluruh anggota "daliana na tolu" dari orang tua kedua belah pihak. Mereka perlu tau dan

menghadirinya, begitu juga dengan undangan lainnya karena mereka juga berfungsi sebagai kontrol sosial nantinya dalam kehidupan rumah tangga pengantin.

Biasanya beberapa hari sebelum pesta perkawinan, undangan sudah disebarluaskan. Jumlah undangan tergantung kepada jumlah famili dan persatuan masing-masing pihak pada waktu "Marhusip". Pihak paranak biasanya lebih banyak mengundang tamu dari pada pihak parboru karena mengharapkan tumpak (sumbangan berupa uang) dari para undangan. Pihak-pihak yang diundang pada prinsipnya sama bagi kedua belah pihak yaitu keseluruhan anggota dalihan na tolu beserta ale-ale (teman-teman) kedua belah pihak, dimana orang yang bertugas mengantarkan undangan adalah pihak parboru dari masing-masing pihak.

Di bonanipasogit, orang yang bertugas untuk persiapan pelaksanaan pesta adalah pardongan sahutoaon (teman satu kampung) secara gotong royong dibantu oleh pihak boru dari hasuhuton itu sendiri. Sedangkan di kota Kota besar mengenai parjuhut (memotong dan memasak hewan atau juhut) dan masak nasi serta melayani tamu sudah diserahkan kepada pemborong. Memang pardongan sahutaon dan boru resminya turut marhobas (melayani) tetapi sifatnya hanya sebagai formalitas dan paling-paling sebagai penerima tamu.

Pada hari yang ditentukan sekitar jam 9 pagi, datanglah rombongan dari paranak ke rumah parboru. Mereka membawa makanan yang dinamai "sibuha-buhai". Makanan tersebut disediakan dan dibawa (dihutti) salah satu boru dari pihak paranak, boleh putri atau saudaranya perempuan yang dinamai "si huti ampang". Supaya lebih praktis makanan yang dibawa paranak hanyalah berupa lauk (daging) sedangkan nasi adalah disediakan pihak parboru.

Setelah mereka makan, mempelai wanita permisi/pamitan kepada seluruh penghuni rumah yang akan ditinggalkannya, kemudian berangkat menjadi satu rombongan menuju gereja tempat pemberkatan dilakukan. Di gereja juga sudah banyak menanti kerabat lain dari pihak paranak ataupun parboru. Setelah acara selesai rombongan besar itu mengiringkan kedua mempelai kesuatu gedung pertemuan umum, yakni tempat pesta tersebut akan dilangsungkan.

Di ruangan gedung di bagian paling depan kedua pengantin duduk berdampingan. Di samping mempelai wanita duduk berderet orang tuanya,

kemudian kakek/nenek serta saudara laki-laki dari ayahnya beserta isteri masing-masing. Demikian pula disamping meritpelai pria adalah orang tuanya dan kemudian kakek/ nenek serta saudara laki-laki dari pihak ayah mempelai beserta isterinya masing-masing.

Para tamu yang diundang oleh perboru masing-masing membawa beras di dalam "tandok" sebagian di antara mereka ada juga yang membawa ikan emas yang sudah dimasak. Baik ikan emas maupun beras itu diserahkan kepada beberapa orang yang khusus ditugaskan oleh perboru untuk menerimanya di beranda (bagian depan) gedung itu. Sebagian di antara tamu paranak, yakni yang termasuk hula-hula ada yang membawa beras "sipirnitondi"; artinya "beras penguat jiwa" ; hal ini meneruskan tradisi di bonapasogit. Namun akhir-akhir ini terutama di kota Kota besar demi praktisnya banyak di antara mereka menggantikannya dengan sumbangan uang untuk paranak yang dinamakan dengan "tumpak" dan diantarkan ke depan setelah makan selesai.

Kalau perkawinan yang sedang berlangsung itu "dialap jual" maka pengatur acara yang muncul di depan mikropon adalah parboru. Kira-kira pukul 2 siang mulailah acara makan, di mana sebelum itu pengatur acara mempersilahkan paranak mempersembahkan apa yang dinamai "tudu-tudu ni sipanganon" (potongan daging babi sebagai pertanda pesta adat dilaksanakan) di atas baki berisi jambar-jambar (potongan daging babi yang dibagi sesuai dengan aturan adat), ke tempat suhut parboru, yang disampaikan dengan bahasa pengantar dalam bahasa daerah yang sesuai untuk itu. Sebagai balasannya pihak parboru menyampaikan ikan emas di atas baki ke tempat suhut paranak, yang juga dengan kata pengantar yang sesuai untuk itu. Setelah itu salah seorang pengetua maju ke depan memimpin doa, terus suhut parboru dan suhut paranak menghampiri para tamu dan mempersilahkan mereka makan dengan kenyangnya.

Begitu juga sebaliknya dalam pesta perkawinan yang "taruhon jual", pengatur acara adalah pihak paranak. Mengawinkan anak perempuan (pemulihon boru) dengan cara ditaruhon jual baru terjadi belakangan ini, karena dulu perkawinan yang demikian itu dianggap sebagai penghinaan terhadap pihak parboru, karena kesannya pihak perboaru seakan-akan mengantarkan anak gadisnya untuk dinikahi orang lain. Sudah sepantasnyalah pamulihon boru itu dilakukan dengan cara dialap jual sehingga nyata benar kedudukan hula-hula itu sebagai pihak yang dihormati. Namun karena pesta adat dewasa ini, khususnya di Kota besar tidak pernah dilakukan di halaman rumah parboru atau paranak,

melainkan sudah di gedung (wisma) maka persoalan dialap jual ataupun ditaruhon jual tidak lagi begitu dipersoalkan.

Ikan emas yang dibawa pihak parboru (pemberi gadis) disodorkan dalam acara khusus kepada sang menantu, tempatnya ditarok di atas baki yang dinamai "dekke sitio-tio". Ikan itu melambangkan kesuburan karena telurnya banyak. Masyarakat Batak mendambakan keturunan (gabe). Begitu juga dengan ulos (kain adat) dari pihak hula-hula yang dililitkan pada tubuh boru untuk menghangatkan tubuh dan jiwa, merupakan perlambang dari totalitas kosmos. Hal itu disampaikan oleh pihak hula-hula dalam setiap upacara adat, sesuai dengan semboyan yang berbunyi "horas jala gabe" yang dapat diterjemahkan dengan "selamat serta sejahtera" dalam bahasa Indonesia.

Kalau mertua si pengundang tidak ada di Kota besar, ia dapat diwakili oleh saudara laki-laki dan kalau juga tidak ada dapat diwakili sebagai hula-hula oleh salah seorang kerabat dekat yang semarga dengan mertua tersebut. Dalam hal ini berlaku pepatah yang berbunyi "mardangka salohot, marnata na sumolhot", artinya orang yang lebih dekat hubungan darahnya kepada pihak mertua, dialah yang lebih berhak mewakilinya dan dia tidak boleh mengelak atas tanggung jawab itu.

Pihak tuan rumah sebagai boru tidak hanya tau menerima saja, tetapi harus memberi juga daging bermakna (margoar). Di perantauan pada umumnya dan di Kota besar pada khususnya, binatang yang dipotong biasanya babi (kerbau pendek) di kalangan orang Batak yang beragama Kristen atau kambing di kalangan orang Batak yang beragama Islam. Pemberian daging namargoar oleh pihak boru disebut "jambar" berupa daging khusus yang diterima oleh setiap kelompok kerabat berdasarkan adat dalihan na tolu. Selain jambar daging tersebut ada lagi jambar hata yaitu hak angkat bicara.

Sebagai penutup dalam setiap upacara adat adalah dialog resmi antara boru di satu pihak dan hula-hula di pihak lain. Sudah barang tentu yang angkat bicara adalah dongan sabutuha dari kedua belah pihak beserta boru dan hula-hulanya masing-masing. Marhata adalah acara puncak dalam setiap upacara adat. Tanpa adanya suatu acara marhata yang berarti bukanlah acara tersebut dikategorikan dengan upacara adat. Dialog resmi itu sudah baku dan tata tertibnya berlangsung dari zaman ke zaman.

Setiap orang Batak digelar raja dalam upacara adat. Kadang-kadang dia disebut rajani hula-hula, raja ni boru dan rajani dongan sabutuha. Hal ini tergantung kepada statusnya dalam suatu upacara adat, apakah dia boru atau

hula-hula ataupun dongan sabutuha. Walaupun pangkatnya jenderal, tetapi hal itu tidak berlaku dalam suatu upacara adat, kalau statusnya boru maka kedudukannya akan tetap rendah di dalam acara adat.

Prinsip yang masih dianut dalam masyarakat adat Batak ialah "si soli-soli do adat", artinya sebagai satu unit gotong royong dalam upacara-upacara adat, maka masing-masing anggotanya haruslah rajin berpartisipasi. Orang yang rajin berpartisipasi akan dibalas orang lain ketika dia mengadakan pesta adat, akan tetapi orang yang malas berpartisipasi walaupun orangnya berpangkat tinggi dan hartanya banyak, pestanya akan sepi. Lain halnya kalau ada kemalangan misalnya rumah terbakar, anak meninggal, pada saat seperti ini orang lain akan berusaha untuk menjenguknya.

Di bona ni pasogit pesta adat biasanya dimulai pada pagi hari sebelum tengah hari (diparnakkok ni mataniari). Akan tetapi karena kesibukan orang-orang hal itu sulit dilaksanakan. Sudah menjadi tradisi, jam makan dimulai kira-kira jam 2 siang, sesuai dengan jam kerja orang-orang kantor. Pesta perkawinan di Kota besar lebih sering diadakan pada hari Jumat dan hari Sabtu karena orang yang bekerja di kantor bisa cepat pulang.

Di Kota besar perbedaan mengenai parjambaran dan sebagainya sering dituntaskan secara musyawarah sewaktu "martonggap raja". Untuk menghemat waktu juga sering dilaksanakan "jambar mangihut". Dengan demikian dapatlah dicegah perbedaan yang bertelele dan berkepanjangan mengenai parjambaran itu. Selesai pembagian jambar, tiba saatnya pada acara yang banyak memakan waktu, yaitu pemberian "ulos herbang" (kain ulos) yang dilaksanakan pihak pemberi gadis kepada pihak penerima gadis. Cara memberikannya ialah dengan cara melilitkannya ke tubuh orang yang menerima dari belakang sambil mengucapkan peribahasa (umpasa) yang isinya ialah permohonan kepada Tuhan supaya yang diulosi diberkati, diberi keturunan dan sebagainya.

Acara "maningkir tangga" dan "paulak une", di bona ni pasogit diadakan beberapa hari sesudah pesta perkawinan. Untuk menghindari pemborosan waktu dan keuangan di kota Kota besar acara tersebut langsung diadakan di gedung, yakni sesudah pesta adat perkawinan itu resmi ditutup dengan doa oleh "pangulanihuria" (petugas gereja). Namun pada saat sekarang ini sudah terjadi perubahan, banyak hal yang sudah dirubah melalui kesepakatan bersama.

Di antara berbagai perubahan itu yang menonjol adalah :

1. Marhusip berubah fungsi menjadi marhata sinamot.
2. Marhata sinamot tergradasi menjadi hanya sekadar formalitas belaka.
3. Paulak une tidak memiliki konsekuensi hukum lagi.

Tidak ada alasan kuat, prinsip, dan urgen yang mengakibatkan marhusip berubah fungsi menjadi seperti marhata sinamot. Apa yang dibicarakan dan diputuskan pada acara marhusip persis sama dengan yang marhata sinamot. Perbedaan yang terjadi hanya pada fungsionaris adat yang hadir yaitu tanpa kehadiran Tulang dan yang kedua adalah sehabis marhusip tidak diberikan panjar, tetapi panjar itu sebenarnya tetap diberikan orang tua pengantin laki-laki kepada orang tua pengantin perempuan, cuma tidak di hadapan umum, sedangkan kalau marhata sinamot maka Tulang wajib hadir serta panjar dari sinamot langsung diberikan serta dinamai "Bohi ni sinamot".

Dengan pelaksanaan marhusip seperti itu, maka praktis acara marhata sinamot menjadi kehilangan arti, hanya sekadar formalitas, pengulangan yang tidak perlu, bahkan menjadi sandiwara bohong - hohongan. Pada acara marhusip tidak diberikan panjar, tetapi secara tidak resmi tetap diberi panjar, sehingga pada acara marhata sinamot terjadi sandiwara dalam menghitung uangnya. Misalkan disepakati jumlah sinamot secara keseluruhan sebanyak lima puluh juta rupiah dan sudah dibayar panjar sebesar empat puluh juta rupiah, maka yang dibayar pada acara marhata sinamot tinggal sepuluh juta rupiah, tetapi Parsinabung atau juru bicara dari kedua belah pihak tetap harus mengatakan bahwa uang yang sebenarnya hanya sepuluh juta itu dinyatakan berjumlah lima puluh juta rupiah.

Disamping sandiwara terjadi pemborosan waktu, padahal unjuk itu sendiri sudah berlangsung cukup lama dan tidak perlu diperpanjang lagi dengan acara yang tidak urgen. Marhata sinamot seperti itu yang memakan waktu sekitar 45 menit sebenarnya tidak perlu lagi dilaksanakan apabila marhata sinamot itu sudah dilaksanakan sebelum unjuk dengan acara marhusip ditiadakan dan langsung marhata sinamot.

Aslinya marhata sinamot itu mutlak harus dilaksanakan sebelum pemberkatan pernikahan, sebab pernikahan tidak terjadikalaupun sinamot tidak disepakati. Tempo dulu sinamot itu menjadi alat kendali untuk menentukan jadi tidaknya perkawinan. Sinamot menjadi acara yang membedakan antara yang kawin adat dengan yang kawin lari. Kawin adat maka sinamotnya harus jadi dulu baru

dikawinkan sedangkan yang kawin lari, kawin dulu baru sinamotnya dibicarakan. Marhata sinamot bagi yang kawin lari hanya sekadar formalitas sebah jadi tidaknya perkawinan itu sama sekali bukan tergantung pada besarnya sinamot, karena perkawinan itu tidak mungkin dibatalkan lagi. Dengan demikian sinamot itu bisa merupakan atau semacam gengsidari pengantin perempuan dan orang tuanya.

Paulak une berfungsi sebagai klarifikasi atas kesucian pengantin putri. Tempo dulu "Buka Perawan" harus dibuktikan dengan perdarahan dari pengantin dan karena itu ditempat tidurnya dipasang scpotong kain putih yang akan menampung darah yang keluar dan begitu selesai hubungan suami isteri yang pertama kain itu langsung diberikan kepada ibu-ibu yang menungguinya. Kalau memang masih suci maka dilanjutkan dengan acara "paulak une", sedangkan kalau sebaliknya maka pengantin putri bisa langsung dikembalikan kepada orang tuanya alias diceraikan dengan disertai tuntutan agar maharnya dikembalikan.

Pelaksanaan paulak une yang dilaksanakan langsung ditempat pesta sebenarnya menghilangkan arti dan tujuan acara paulak une. Sekiranya terjadi bahwa pengantin perempuan bukan gadis lagi, maka pengantin laki-laki tidak bisa menceraikannya lagi dengan alasan tidak suci lagi sebelum kawin. Karena itu tuntutan perceraianya tidak sah lagi, sebab sudah dilaksanakan paulak une yang berarti kerabat pengantin laki-laki sudah menyatakan dimuka umum bahwa pengantin putri tidak ada cacat dan masih suci.

Dengan demikian pertimbangan efisiensi waktu yang menghendakisemua rentetan acara perkawinan adat diselesaikan dalam satu hari ada untung ruginya. Tentunyahal tersebut sebenarnya memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan adat tersebut. Karena itu kalau masih ingin menegakkan maksud dan tujuan dari paulak une itu, sebaiknya acara paulak une dan maningkir tangga sebaiknya dipisahkan dari acara unjuk.

E. Perkawinan Adat Di Kota Sebagai Arena Solidaritas Kekeberabatan

Perkawinan adat Batak dipersiapkan jauh sebelum upacaranya diselenggarakan. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada upacara perkawinannya. Tahap-tahap itu tidak saja menjadi beban dan tanggungjawab orang tua tetapi juga keluarga luas terbatas (*lineage*). Demikian pula pengaturan tempat, jadwal, siapa saja yang diundang dan jumlah biaya keseluruhan diputuskan berdasarkan musyawarah yang berlandaskan prinsip *dalihan na tolu*. Jadi artinya ada tiga pihak yang terlibat dan dilibatkan dalam rangka penyelenggaraan pernikahan. Pihak pertama adalah *Dongan Sabutuha* atau kerabat-kerabat semarga. Pihak kedua adalah *Hulahula* atau pihak pemberi wanita dan ketiga pihak *boru* atau marga penerima wanita.

Dalam tata cara adat Batak, perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan sistem kekerabatannya. *Pertalian antarkerabat* dengan berlandaskan *dalihan na tolu* telah mengikat satu pihak dengan pihak lainnya dalam hubungan saling hormat menghormati. Hubungan periparan menjadi suatu hubungan saling sungkan serta satu sama lain mempunyai fungsinya masing-masing.

Sebuah keluarga batih terikat dalam prinsip *dalihan natolu*, sehingga di satu pihak ia menjadi *boru*, di pihak lain ia menjadi *hula-hula*. Ini dapat diartikan bahwa di satu pihak ia lebih rendah derajatnya dan oleh karenanya harus bekerja dalam setiap pesta adat. Akan tetapi di lain pihak ia lebih tinggi derajatnya oleh karenanya dilayani dalam pesta adat.

Masalah penting berkenaan dengan suatu penyelenggaraan perkawinan adat di Kota besar adalah prinsip kekerabatan kembali diaktifkan untuk kelancaran dalam menempatkan kedudukan dan persamaan anggota dalam struktur adat Batak. Dengan penyelenggaraan ini sebenarnya setiap anggota kerabat diingatkan kembali mengenai hak-hak dan kewajibannya dalam adat, dan lebih lagi menunjukkan kembali eksistensinya sebagai bagian dari sistem kekerabatannya. Melalui suatu kegiatan pesta perkawinan itu sebenarnya mereka belajar kembali mengenai nilai-nilai dan *nonna-norma* adat yang telah lama dilupakan karena kegiatannya di kota besar tidak berhubungan langsung dengan adat istiadat.

Sebagaimana keluarga-keluarga dengan latar kebudayaan yang berbeda, keluarga Batak yang tinggal di Kota besar tidak dapat terus menerus

menerapkan tatacara adat yang bersumber pada kebudayaan asalnya. Dalam kenyataannya tatacara adat yang berlandaskan dalihan na tolu hanya digunakan pada saat kelahiran, permandian, sisi, perkawinan dan kematian. Upacara-upacara yang ada itu adalah tahap dalam lingkaran hidup individu dan dianggap penting untuk memberi gambaran mengenai hak dan kewajiban individu tersebut dalam struktur adat. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain bersumber pada kebudayaan Kota besar. Walaupun mereka tinggal di Kota besar, kegiatan perkawinan yang mengikuti adat Batak akan tetap menggunakan prinsip dalihan natolu.

Banyak faktor yang memengaruhi suatu kegiatan perkawinan ada di Kota besar. Faktor-faktor ini tidak dapat diabaikan karena menyangkut pula prestise dari kerabat-kerabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan itu. Hal ini dapat ditunjukkan melalui mas kawin atau sipanganon. Kalau penyelenggara perkawinan memberikan sipanganon berupa kerbau, maka prestisenya tinggi. Semua kerabat dekat maupun jauh akan menilainya tinggi. Akan tetapi hal ini membawa konsekuensi apabila ia meninggal maka sipanganonnya harus lebih dari kerbau.

Pada umumnya penyelenggara mempersembahkan sipanganon berupa babi. Walaupun gengsinya lebih rendah daripada kerbau, akan tetapi babi sudah memenuhi persyaratan adat. Sebenarnya babi merupakan sipanganon yang sudah populer sebagai persyaratan adat. Akan tetapi orang-orang Batak di Kota besar menginginkan suatu penyelenggaraan adat yang melebihi kebiasaan umum. Mereka mencari sipanganon yang dapat menaikkan martabat keluarganya, dan lebih dari itu mengangkat nama baik keluarga luasnya.

Dengan pengorbanan seekor kerbau memberi suatu nilai tambah pada pesta adat yang diselenggarakannya. Kerbau mempunyai gengsi atau nilai yang tinggi, setidaknya mengacu pada indikator harga. Di Kota besar harga kerbau jauh lebih tinggi dari babi, sehingga memberi kerbau sebagai sipanganon setidaknya orang akan menilai bahwa biaya penyelenggaraan pesta adat sangat besar. Sesungguhnya persyaratan sah atau tidaknya sebuah perkawinan tidak ditentukan oleh mahal atau tidaknya sipanganon yang disediakan dalam pesta kawin, tetapi hadirnya wakil-wakil dari pihak-pihak yang terikat prinsip dalihan na tolu dalam pesta adat itu. Dengan demikian keabsahan sebuah perka winan dan sahnya suami-isteri secara adat ditentukan oleh kehadiran pihak hula-hula, pihak boru dan dongan sabutuha.

Tidak seperti tatacara di kampung di mana setiap anak sudah mempunyai jodohnya, maka di kota Kota besar kebanyakan perkawinan antar sesama orang Batak bukan karena jodoh dari kecil. Kalau di kampung orangtua dapat mengharapkan anaknya menikah sesuai dengan jodoh yang telah ditentukan atau dalam istilah adat Batak Toba 'marpariban', maka di kota orangtua sekalipun sudah lama meninggalkan tatacara ini. Hal ini disesuaikan dengan kondisi kota di mana pergaulan remaja atau muda-mudi tidak lagi di lingkungan keluarga atau sesama orang Batak bahkan sudah menembus batas-batas adat. Pergaulan antar remaja muda-mudi dapat terjadi di arena ketetanggaan, kantor, sekolah, bahkan arena hobi. Oleh karenanya intensitas hubungan yang melampaui batas primordial itu memungkinkan hubungan lebih intim tidak berlandaskan tatacara adat.

Namun demikian baik di kampung maupun di kota, keputusan untuk menikah selalu didahului dengan masa perkenalan. Di Kota besar masa perkenalan atau lebih tepat dikatakan praperkawinan disebut dengan pacaran . Pada masa ini kedua belah pihak saling mendalami sifat serta mencari kecocokan yang dapat diandalkan untuk hubungan suami-isteri di masa yang akan datang.





THE
Character Building
UNIVERSITY

Bab 3

Seksualitas dan Masyarakat Modern di Indonesia

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2009: 116).

Menurut Phil Astrid S. Susanto (1999: 6), masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga (1988: 143), masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat yaitu:

A. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis (Dannerius Sinaga, 1988: 152). Menurut Rentelu, Pollis dan Shcaw yang dikutip dalam (P. J Bouman, 1980: 53) masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis.

Menurut P. J Bouman (1980: 54-58) hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern.

Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional di antaranya:

1. Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya;
2. Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris;
3. Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah;
4. Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar;
5. Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat;
6. Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal;
7. Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil
8. Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Berbeda dengan karakteristik yang diungkapkan oleh Dannerius sinaga, Selo Soemardjan (1993: 62-68) mencirikan masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosiologis.

Berikut karakteristiknya:

1. Masyarakat yang cenderung homogen;
2. Adanya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan dan rasa percaya yang kuat antar para warga;
3. Sistem sosial yang masih diwarnai dengan kesadaran kepentingan kolektif;
4. Pranata adat yang efektif untuk menghidupkan disiplin sosial;
5. Shame culture (budaya malu) sebagai pengawas sosial langsung dari lingkungan sosial manusia, rasa malu mengganggu jiwa jika ada orang lain yang mengetahui penyimpangan sistem nilai dalam adat-istiadat.

B. Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Berdasar pada pandangan hukum, Amiruddin (2010: 205), menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis. Menurut OK. Chairuddin (1993: 116), solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern.

Selain adanya solidaritas organis, Amiruddin (2010: 206) juga menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau menjadi normal. Jadi masyarakat modern merupakan yang sudah tidak terpaku

pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif.

C. Ciri-Ciri Masyarakat Tradisional

1. Jumlah Anggota Masyarakat Sedikit

Masyarakat tradisional biasanya berada pada daerah tertentu dengan wilayah yang terbatas. Oleh karena itu masyarakat ini jumlahnya sedikit. Namun, jumlahnya yang sedikit menyebabkan mereka saling kenal satu sama lain, hubungan dan keterikatan dalam masyarakat sangat tinggi, rasa kebersamaan yang melahirkan semangat saling membantu, dan kasih sayang lebih dominan.

2. Masyarakat Bersifat Homogen (Serba Sama)

Karena berada dalam wilayah tertentu, otomatis hampir semua golongan dalam masyarakat ini memiliki mata pencaharian, keturunan, dan tradisi yang sama. Sesuatu yang berbeda menurut mereka akan dianggap merusak tatanan kehidupan dan nilai-nilai leluhur.

3. Masyarakatnya Tertutup

Untuk menjaga agar tidak terjadi perusakan nilai-nilai leluhur dan perubahan, masyarakat tradisional bersifat tertutup. Mereka selalu menjaga agar tidak ada nilai-nilai asing yang masuk dan menjaga fungsi kebudayaan masyarakat. Kebudayaan dan teknologi asing yang masuk selalu dicurigai akan merusak tatanan kehidupan mereka. Bahkan, orang baru yang datang memasuki wilayah mereka juga diwaspadai.

4. Mobilitas Rendah

Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat yang tertutup. Agar tidak terjadi perubahan, masyarakat ini enggan keluar dari daerahnya. Mereka merasa tempat yang paling aman dan nyaman adalah daerah atau masyarakat mereka sendiri. Mobilitas masyarakat yang masuk daerah mereka pun dibatasi.

5. Bersifat Agamis

Agama dan kepercayaan adalah salah satu nilai leluhur yang diwariskan masyarakat tradisional. Maka, dalam kehidupannya sehari-hari masyarakatnya bersifat religius atau agamis. Semua kegiatan mereka akan dikaitkan dengan agama dan kepercayaan yang ada.

6. Kehidupan perekonomiannya hidup dari pertanian

Lahan pertanian menjadi faktor penunjang kebutuhan hidup masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya adalah masyarakat yang menggunakan sumber daya alam pada bidang agraris, di mana masyarakat tersebut secara turun temurun melakukan aktivitas pada sektor pertanian, sehingga masyarakat yang ada di daerah pedesaan dan pinggiran memperoleh penghasilan atau mengandalkan usaha yang bergerak di bidang pertanian.

Menurut Suyana (2008) dalam melakukan usaha pertanian yang berkelanjutan harus memperhatikan tiga komponen utama, yaitu kegiatan pertanian harus mampu menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi (economic growth), meningkatkan kesejahteraan sosial (social welfare), dan memperhatikan kelestarian lingkungan (environmental integrity). Menurut Winarso (2012) dalam pemanfaatan sumber daya agraritanah untuk sektor pertanian, lahan merupakan salah satu sumber mata pencaharian dan sumber kehidupan serta status sosial di mata masyarakat pedesaan sehingga keberadaannya sangat dipertahankan.

7. Terdapat kesadaran kolektif

Kesadaran kolektif ini berada diluar individu (exterior), namun memiliki daya paksa terhadap individu-individu sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran kolektif adalah suatu konsensus (kesepakatan) masyarakat yang mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan.

8. Kuatnya pengaruh norma-norma sosial

Kehidupan masyarakat diatur berdasarkan nilai-nilai dan serta norma sosial sebagai pedoman perilaku anggota masyarakat agar kehidupan sosial menjadi tertib. Walaupun demikian, ada sebagian anggota masyarakat yang berperilaku tidak sejalan terhadap nilai-nilai dan norma sosial tersebut.

9. Kuatnya pengaruh pemimpin adat

Kepala adat adalah seorang pemimpin informal dalam sebuah desa yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak, menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam suatu keputusan. Abdul Harsis asy'arie (2005:85) Peranan kepala adat dalam sebuah desa adalah Salah satu peran kepala adat pada gotong-royong adalah menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik dan mendorong semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemimpin (Kepala adat) berperan aktif demi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan kearifan lokal daerah setempat

D. Ciri-Ciri Masyarakat Modern

Kehidupan sosial terutama di bidang produksi barang dan jasa

1. Kuatnya individualitas;
2. Kehidupan didasarkan atas rasionalitas;
3. Hubungan antarmanusia dan antarkelompok cenderung berjarak;
4. Komunikasi bersifat sekunder;
5. Mengalami Anomie dan Alienasi;
6. Masyarakat mengalami cultural lag dan cultural shock;
7. Teknologi menentukan kehidupan masyarakat;
8. Berkembang pesatnya migrasi;
9. Perkembangan yang pesat dalam hal mobilitas sosial;
10. Lembaga keluarga bukan satu-satunya lembaga sosial yang penting;
11. Melemahnya pengaruh pranata adat dan keluarga.

1. Seksualitas di Masyarakat Tradisional
 - a. Perempuan dipengaruhi oleh feodalisme.

Feodalisme merupakan suatu ideologi yang sangat memengaruhi bentuk-bentuk kehidupan dalam masyarakat tradisional, termasuk memengaruhi

berbagai tindakan yang dikenakan kepada perempuan serta memengaruhi bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh feodalisme terhadap perempuan dapat dilihat dari sejumlah stereotipe gender berikut ini :

- (1) Terdapat stereotipe-stereotipe gender tertentu terhadap perempuan seperti anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan oleh karena itu menjadi objek dalam relasi seksual dan gender antara perempuan dan laki-laki. Masyarakat tradisional juga memiliki konsep ideal terhadap perempuan. Perempuan diidealisasikan sebagai pihak yang harus selalu berada di dalam rumah . Konsep perempuan paripurna dalam masyarakat tradisional menganggap perempuan memiliki tugas utama mengurus suami dan anak serta harus selalu berada di dalam lingkungan keluarga. Hal itulah yang kemudian dianggap sebagai kodrat perempuan.
- (2) Masyarakat tradisional memiliki sejumlah norma-norma seksual dan gender yang juga berfungsi sebagai regulasi seksual atau gender. Seperti adanya istilah yang ditujukan kepada perempuan, 'swarga nunut neraka katut', konsep "kaca wingking", kenya setata, tankahanan jara atau kinasihaning swami yang menunjuk kepada pelayanan perempuan terhadap laki-laki atau sistem patriarki.
 - b. Seks merupakan urusan masyarakat, bukan semata urusan individu. Individu dalam masyarakat tradisional tidak dapat dengan bebas menjalani kehidupan sosial dan seksualnya. Masyarakat sebagai sebuah Fakta Sosial cenderung menekankan konformitas individu terhadap lembaga-lembaga sosial yang ada, dalam hal ini adalah lembaga keluarga dan lembaga perkawinan.
 - c. Seks bersifat sakral. Seks dalam masyarakat tradisional mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang sakral. Seks bukan sekedar aktivitas seksual untuk melampiaskan hasrat, akan tetapi seks memiliki tujuan budaya, yaitu produksi, reproduksi dan prokreasi atau melanjutkan keturunan.
 - d. Seks berorientasi kepada prokreasi. Masyarakat tradisional melihat seks memiliki tujuan mulia, yaitu melestarikan masyarakat, tradisi dan kebudayaannya. Oleh karena itu masyarakat akan memberikan

stereotipe negatif terhadap pasangan—terutama perempuan atau istri yang tidak mempunyai anak. Dalam hal ini perempuan atau istri yang memiliki beban lebih berat. Perempuan akan dipersalahkan dan mengalami viktimisasi dan stereotipe sebagai perempuan mandul dan berbagai hal yang tidak mengenakkan lainnya.

- e. Lembaga keluarga sebagai salah satu institusi sosial terpenting. Masyarakat tradisional apalagi masyarakat primitive menjadikan keluarga sebagai lembaga sosial yang terpenting. Dalam masyarakat tradisional, lembaga-lembaga sosial lainnya relatif masih sangat terbatas ruang lingkungannya. Keluarga menjadi agen sosialisasi sekaligus sebagai lembaga yang juga melakukan fungsi edukasi dan fungsi ekonomi.
- f. Terdapat tabu-tabu seksual. Karena seks merupakan hal yang sakral, maka masyarakat tradisional mengadakan berbagai regulasi seks seperti adanya tabu seksual tertentu. Misalnya perempuan tidak boleh hamil di luar perkawinan dan larangan keras adanya hubungan seksual ekstra-marital.
- g. Kuatnya kontrol kultur terhadap perempuan. Masyarakat tradisional sebagai kolektif berupaya mengontrol semua perilaku anggotanya termasuk terhadap kehidupan seksual anggotanya. Masyarakat tradisional sedemikian mengkhawatirkan kekuatan seksualitas sehingga melakukan pengekangan terhadapnya dengan berbagai regulasi seksual seperti larangan perzinahan larangan melakukan aktivitas seksual menyimpang seperti homoseksual dan masturbasi.
- h. Kaum perempuan hidup dalam komunitas-komunitas kecil Tidak hanya dalam pengertian ruang fisik, tetapi juga ruang sosial yang jauh lebih sempit akibat pendefinisian status dan kelas secara lebih tegas (Abdullah, 2001)
- i. Perempuan lebih banyak berperan di sektor domestik atau sektor rumah tangga, dengan melakukan segala pekerjaan kerumahtanggaan seperti membersihkan rumah dan merawat anak dan suami.
- j. Adanya pembagian kerja secara seksual. Perekonomian dalam masyarakat tradisional masih sangat terbatas dan bersifat subsisten.

Hal itu menyebabkan pembagian kerja yang ada baru semata didasarkan atas perbedaan seks, di mana perempuan bekerja di sektor pertanian sedangkan laki-laki menjalankan perdagangan.

- k. Perempuan sebagai produsen dengan bekerja pada sektor ekonomi pertanian secara terbatas. Kondisi itu dimungkinkan dengan sistem pertanian yang ada masih sangat sederhana. Belum adanya mekanisasi pertanian mengakibatkan perempuan dapat berkecimpung dalam perekonomian pertanian.
- l. Perempuan merupakan objek dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya stereotipe yang dilekatkan pada perempuan, seperti adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah dan harus bersikap lemah lembut dan perempuan harus bersikap pasif dalam kehidupan.
- m. Seks merupakan sarana produksi. Artinya kegiatan seks dan aktivitas seksual tidak terlepas dari fungsi utamanya yaitu prokreasi atau memiliki anak. Bahkan sejumlah tafsir agama tertentu menyatakan bahwa segala upaya untuk menghalang-halangi terjadinya kehamilan seperti dengan adanya program Keluarga Berencana dan penggunaan alat-alat kontrasepsi dianggap sebagai sesuatu yang dilarang atau diharamkan.
- n. Perkawinan dianggap sebagai ikatan sehidup-semati antara suami dan istri. Masyarakat tradisional memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang menyatukan antara suami dan istri. Selain itu perkawinan juga dianggap sebagai sebuah siklus kehidupan yang harus dijalani oleh setiap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu lembaga perkawinan cenderung memunculkan stereotipe terhadap orang yang menunda bahkan menghindari perkawinan. Korban utama dari stereotip ini adalah kaum perempuan, perempuan yang sudah beranjak dewasa akan tetapi belum juga menikah akan mendapatkan label negatif sebagai ‘perawan tua’, ‘tidak laku’ dan lain sebagainya.
- o. Perceraian cenderung dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Masyarakat tradisional memandang perceraian sebagai sebuah cela dan aib. Oleh karena itu masyarakat tradisional mengkonstruksi dan

memberikan makna terhadap perceraian sebagai kegagalan perkawinan dan penanda ketidakharmonisan dan ketidakbahagiaan. Oleh sebab itu, di dalam masyarakat tradisional, orang cenderung memaksakan hubungan ikatan perkawinan walaupun tidak memberikan kebahagiaan. Suami dan terutama istri cenderung mempertahankan perkawinan demi untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat jikalau terjadi perceraian antara keduanya.

- p. Masyarakat tradisional memiliki norma-norma kecantikan yang menjadi referensi bagi kaum perempuan dalam kehidupannya. Norma-norma tersebut dipaksakan kepada mereka. Mislannya, masyarakat tradisional memandang kecerdasan itu merupakan hal yang identik dengan laki-laki, sehingga jikalau ada perempuan yang dianggap memiliki kecerdasan tertentu maka hal tersebut dipandang kan menggerogoti sifat keperempuanannya. Demikian pula dengan olahraga dan pengembangan tubuh.

Kedua hal tersebut cenderung dianggap bertentangan dengan perempuan. Bahkan di Mesir buku pelajaran sekolah yang ada pernah menyebutkan bahwa seorang gadis tidak pantas memiliki bentuk tubuh yang tinggi. Hal itu dianggap merupakan sifat yang seharusnya dimiliki oleh laki-laki. Jikalau seorang perempuan memiliki bentuk tubuh yang tinggi, maka hal itu akan menimbulkan rasa tidak percaya diri dari perempuan tersebut. (Saadawi, 2001)

2. Seksualitas Masyarakat Modern

- a. Perempuan dipengaruhi oleh kapitalisme.

Kapitalisme merupakan ideologi yang berorientasi kepada pemaksimalan keuntungan. Kapitalisme melihat keluarnya perempuan dari sektor domestik dan masuknya mereka ke dalam sektor publik dianggap dapat memberikan keuntungan. Dalam rangka itulah kapitalisme berupaya mengkomersialisasi, mengeksploitasi dan melakukan komodifikasi terhadap perempuan. Perempuan dalam masyarakat modern dijadikan baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen.

Sebagai produsen perempuan diarahkan menjadi tenaga buruh yang memproduksi barang dengan upah yang rendah. Sedangkan sebagai konsumen, perempuan didorong untuk selalu mengkonsumsi setiap produk

barang dan jasa yang dihasilkan oleh para kapitalis. Kapitalis melihat perempuan dan tubuh perempuan sebagai objek bagi kepentingan kaum kapitalis. Berbagai produk dihasilkan terkait dengan perawatan tubuh dan kecantikan perempuan seperti operasi plastik, senam kecantikan, penghalus kulit, pemutih kulit, soft lens dan lain sebagainya.

- b. Perempuan banyak masuk ke sektor domestik dan bersaing dengan laki-laki dalam dunia kerja.

Keterlibatan perempuan dalam sektor domestik dan sekaligus sektor publik seringkali menimbulkan terjadinya konflik peran. Konflik peran ditandai oleh adanya konflik batin yang dialami oleh perempuan dalam memilih sejumlah peran yang harus dijalankan pada waktu yang bersamaan.

- c. Perempuan sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen.

Sebagai produsen, perempuan bekerja pada sektor ekonomi modern, baik yang berupa murah sebagai buruh pabrik maupun sebagai pekerja profesional. Selain itu perempuan dalam masyarakat modern juga berperan sebagai konsumen dengan mengkonsumsi segala produk terutama yang berkaitan dengan kecantikan dan perawatan tubuh.

Gandrungnya perempuan dalam masyarakat modern terhadap produk-produk kecantikan dan perawatan tubuh disebabkan oleh adanya konstruksi tentang kecantikan dan keseksian yang dilakukan oleh para kapitalis melalui iklan-iklan produk dan tayangan televisi. Para kapitalis dengan jeli melihat bahwa perempuan merupakan objek yang dapat dieksploitasi dengan cara mendorong mereka untuk membeli produk-produk yang ditawarkan oleh para pengusaha kapitalis tersebut.

Perawatan dan pengelolaan tubuh dewasa ini menjadi marak dengan berbagai layanan produk seperti perawatan rambut, alis, mata, bulu mata, hidung, bibir, mulut, kulit, kuku, lengan, perut, buah dada, pinggul, betis, kaki, bahkan bulu kaki. Elum lagi layanan jasa operasi plastik untuk menjadikan hidung mancung, bibir tipis serta produk-produk pelayanan seperti *facial care*, *body slimming*, *baby skin renewal*, dan lain sebagainya. (Abdullah, 2001)

- d. Pada masa modern, citra perempuan mengalami pergeseran. Akan tetapi sejatinya potret perempuan dalam masyarakat modern tersebut sebenarnya hanya merupakan hasil reproduksi konstruksi gender dari

masa sebelumnya. Pada masa modern perempuan tetap distereotipkan dengan stereotipe yang tidak jauh berbeda dengan stereotipe perempuan dalam masyarakat tradisional. Citra perempuan sebagai sosok yang cantik, gemulai, seksi justru semakin dikembangkan oleh masyarakat modern demi keuntungan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern alih-alih melemah, seksisme justru semakin menguat.

- e. Dalam masyarakat modern, akibat dominasi kapitalisme, perempuan tidak dapat mengendalikan tubuh dan dirinya sendiri. Akan tetapi sudah dikendalikan oleh ideologi dan kepentingan pasar. Perempuan diasumsikan tidak mengetahui apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhannya. Kepentingan-kepentingan pasar pun telah menjadi kekuatan yang dominan di dalam kehidupan sosial yang tampak dari kecenderungan orientasi ke kebudayaan konsumen, di mana aktivitas konsumsi telah menjadi tujuan kehidupan.
- f. Dan perempuan sesungguhnya merupakan produk dari kehidupan sosial tersebut, sehingga ia tersubordinasi oleh kepentingan-kepentingan dan harapan-harapan umum yang ingin melihat perempuan sebagai objek. Perempuan tidak memiliki kesempatan untuk memilih karena pilihan-pilihan selalu telah ditentukan sebelumnya dengan kemungkinan-kemungkinan yang lebih menguntungkan "pihak lain". (Abdullah, 2001)
- g. Perempuan mengalami mobilitas sosial, bukan saja terjadinya perpindahan secara status dari sektor domestik ke sektor publik, akan tetapi juga mobilitas geografis yang ditandai dengan adanya mobilitas internasional
- h. Pranata adat dan orang tua mulai kehilangan kontrol terhadap perempuan
- i. Seks terutama berfungsi sebagai sumber kesenangan. Manusia modern melakukan kegiatan seks dan aktivitas seksual tidak lagi berorientasi kepada prokreasi atau memperoleh anak, akan tetapi lebih bertujuan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan seksual (pleasure).

- j. Masyarakat modern memiliki cara pandang yang berbeda dengan masyarakat tradisional, dalam memandang perkawinan dan perceraian. Dalam masyarakat modern, perkawinan tidak lagi dipandang sakral dan suci. Perkawinan juga bukan lagi dimaknai sebagai ikatan sehidup-semati antara suami dan istri. Masyarakat modern cenderung melihat perkawinan sebagai upaya yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan seksual.

Sebagai konsekuensinya, masyarakat modern menganggap perceraian bukan sebagai sesuatu yang tercela dan tabu. Perceraian dianggap fungsional karena dapat membebaskan perempuan dari ikatan yang mengekang dan menindas. Ketika seorang perempuan dan laki-laki merasa bahwa perkawinannya tidak lagi memberikan kebahagiaan, maka perceraian dapat menjadi jalan keluar dari situasi yang tidak menyenangkan tersebut.

E. Fenomena Seks Pranikah

Menurut registrasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 jumlah penduduk di Denpasar sampai akhir tahun 2008 adalah 642.358 orang dan bertambah di tahun 2014 menjadi 863.600 jiwa. Gaya hidup memiliki kaitan yang erat dengan persepsi pemuda terhadap hubungan seksual pranikah. Gaya hidup merupakan hasil dari adaptasi individu terhadap kondisi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain (Takwin, 2006: 36).

Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan pemuda pada jaman dahulu. Sekarang pemuda lebih menikmati hidup sebagai bagian dari gaya hidup yang diinginkan, yaitu gaya hidup lebih populer. Pemuda memiliki segalanya atas suasana suka maupun duka, pemuda menyadari akan kehidupannya sebagai pemuda yang memiliki gaya hidup dan budayanya sendiri (Barker, 2005 : 424).

Pemuda yang menganggap hubungan seksual pranikah adalah sebagai sesuatu untuk meraih label gaul di mata teman sebayanya merupakan fenomena modern akibat kemakmuran ekonomi yang lebih dan adanya waktu luang yang

bisa dicirikan dengan kebebasan. Mereka menampilkan sikap individualitas dan selera khas dalam pemakaian barang rumah tangga, fashion, disposisi tubuh. Budaya seksualitas yang sebelumnya belum terungkap oleh leisure class ditarik ke tempat yang terang dan disosisikan sejajar dengan gaya hidup lain seperti pakaian, musik, selera makan, gaya bahasa. Fenomena tersebut sesuai dengan pendapat Patt (dalam www.pusatartikel.com) pemuda yang sudah terbiasa melakukannya hubungan seksual pranikah akan sulit untuk menghentikannya.

Dengan diwarnai kemajuan teknologi, ini bisa mendorong seorang semakin banyak nya waktu luang (lessure time) yang bisa dinikmati. Semakin bertambah jumlahnya, di mana ciri khas seorang dapat ditandai dengan kemewahan dan kebebasan yang ditonjolkan. Konsep Thorstein Veblen dalam (<http://www.unisosdem.org>). Seorang menampilkan status, selera, sikap individu. (Radjab, 2006:109).

Dengan demikian gaya hidup pemuda pada zaman sekarang ini memiliki hubungan yang erat terhadap perilaku hubungan seks pranikah, dengan cara bergaul dan bebasnya para pemuda untuk mengekspresikan hal apapun itu di luar rumah. Persepsi pemuda tentang hubungan seksual pranikah sangat bervariasi, kondisi ini dapat dipahami mengingat persepsi seorang ahli psikologi sosial merupakan sebuah proses dalam pencarian berupa informasi, kemudian melakukan dari informasi tersebut yang selanjutnya diikuti dengan proses evaluasi. Proses melakukan dan evaluasi menyebabkan informasi yang masuk akan menjadi subjektif karena sangat tergantung dari pengetahuan, latar belakang pendidikan, pengalaman, status pemuda yang bersangkutan serta kesadaran akan nilai serta norma yang dianutnya. (Sarwono, 2002:94).

Sosialisasi tentang masalah seks akan bermanfaat dalam pergaulan sebaya yang terbatas ini. Namun dalam pergaulan pemuda di lingkungan banjar di Denpasar, sosialisasi masalah seksual bisa berlangsung secara umum yang bisa diikuti oleh siapa pun melalui program pemerintah yaitu program GenRe yang dikelola oleh BKKBN. Perilaku seksual suatu masyarakat didasari oleh sistem nilai budaya yang dianutnya. Sistem nilai budaya merupakan konsep dasar yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat yang dianggap suci dan bernilai serta dipakai sebagai pedoman atau kerangka tindakan masyarakat yang bersangkutan. Di antara sistem nilai budaya, nilai hubungan seksual itu terkandung dalam norma sosial, adatistiadat, dan ajaran agama yang hidup dalam masyarakat (Koentjaraningrat,1981:220-225).

Menurut Thompson (2005:50) bahwa tingkah laku dapat dibedakan dalam beberapa tipe yaitu, pertama *voluntary action* di mana perbuatan individu dapat dilakukan atas keinginannya sendiri, kedua *intentional action* di mana disetiap tingkah laku tersebut memiliki tujuan, ketiga *meaningful action* yang berarti setiap tingkah laku seseorang memiliki arti. Perilaku hubungan seksual pranikah di kalangan pemuda bisa terjadi juga karena didasari oleh pandangan bahwa berpacaran perlu dibuktikan dengan suatu perilaku tertentu untuk menyatakan rasa cinta.

Dari kelompok pemuda di Denpasar diketahui bahwa pemuda laki-laki sering memaksa pasangannya untuk membuktikan cintanya dengan melakukan hubungan seksual. Ada dua dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks di kalangan pemuda yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual. Seperti kita ketahui bahwa banyak dampak buruk dari seks pranikah dan cenderung bersifat negatif seperti halnya, kumpul kebo, seks pranikah dapat berakibat fatal bagi kesehatan kita. Tidak kurang dari belasan ribu pemuda yang sudah terjerumus dalam seks pranikah. Para pemuda seks pranikah cenderung akibat kurang ekonomi yang di alami oleh keluarga pemuda yang melakukan seks pranikah. Mereka yang tidak bisa bertahan dengan keadaan keluarganya yang seadanya akan berusaha mencari uang tambahan.

Uang tambahan yang digunakan agar pemuda tetap bisa tampil sama dengan teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya. Seorang pemuda akan rela berbuat apapun untuk tetap menjaga gengsinya, termasuk menjadi wanita panggilan. Seks pranikah dapat terjadi karena pengaruh dari lingkungan luar dan salah pilihnya seseorang terhadap lingkungan tempatnya bergaul. (Adlin, 2006). Kondisi objektif berinteraksi dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai kemudian akan mengembangkan suatu bentuk tindakan tertentu. Menurut Parsons (Sarwono,1997:20) perilaku cenderung menekankan empat hal yaitu, mencari kepuasan fisik, keinginan untuk menerjemahkan makna simbol-simbol, kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kehidupan pemuda saat ini tidak lepas dari pengaruh kebudayaan populer yang selama ini bisa kita lihat sendiri sudah sangat berkembang.

Gaya hidup enak dan mudah ini telah dijadikan sebagai ideologi bagi pemuda saat ini, termasuk dalam cara pemuda mengekspresikan makna cinta. Cinta bagi sebagian pemuda telah dijadikan sarana untuk menentukan karakter dan identitas sebagai seorang manusia dalam aktivitasnya. Perilaku hubungan seksual pranikah merupakan bagian dari gaya hidup pop pemuda yang

menginginkan kehidupan lebih bebas dan glamour (kehidupan kelas atas). Cerminan dari kehidupan kelas atas yang merupakan dambaan setiap orang, yang sudah merubah pola pikir mereka. Sebagian pemuda saat ini telah terpengaruh oleh kebudayaan luar, dari proses budaya lokal ke budaya pop yang antara lain ditunjukkan dengan cara pemuda berpakaian yang mencerminkan status dan nilai sosial tertentu (Ibrahim,2006:86).

Kebudayaan populer diciptakan untuk dinikmati, sedangkan para pemuda yang tidak memiliki kebudayaan populer dianggap ketinggalan jaman seperti anggapan para pemuda yang melakukan hubungan seksual pranikah. Umumnya mereka menganggap hubungan seksual pranikah tersebut hanya sebagai bukti dari rasa cinta atau perilaku itu dilakukan hanya mencari sensasi kenikmatan untuk menyalurkan hasrat nafsu mereka saja. Persepsi yang menghalalkan perilaku hubungan seksual pranikah tersebut akan memperkuat gaya hidup yang menganggap hubungan seksual sebagai bagian dari kegiatan kesenangan saja. Rasa ingin tahu terhadap masalah seksual pada pemuda sangat penting dalam pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. Pada masa pemuda, informasi tentang masalah seksual sudah seharusnya mulai diberikan supaya pemuda tidak mendapatkan informasi yang salah dari sumber-sumber yang tidak jelas. Pemberian informasi masalah seksual menjadi penting terlebih lagi mengingat pemuda berada dalam potensi seksual yang aktif, karena berkaitan dengan dorongan seksual yang dipengaruhi hormon dan tidak cukupnya informasi mengenai aktivitas seksual mereka sendiri. Tentu saja hal tersebut akan sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa pemuda bila tidak didukung dengan pengetahuan dan informasi yang tepat (Glevinno, 2008).

Kondisi-kondisi seperti ini tidak hanya mendorong para pemuda untuk mencoba- coba melakukan hubungan seksual, tetapi juga akan mempunyai atau membentuk persepsi yang sama sekali tidak benar terhadap perilaku hubungan seksual dan kesehatan reproduksi pemuda. Minimnya informasi tentang masalah seksual dan kesehatan reproduksi bagi para pemuda ini juga dikarenakan pemberian pengetahuan dan informasi melalui pelajaran tentang seksualitas di bangku sekolah masih dianggap sangat kurang dan belum merata bagi masing-masing sekolah. Informasi tentang masalah seksual yang didapatkan oleh pemuda berasal dari media massa dan elektronik, dengan mendapatkan informasi yang berasal dari media masa itu sangat minim informasi tersebut, terkadang hanya bersifat menarik dan sensasional serta dirasakan kurang lengkap.

Dalam lingkungan pergaulan pemuda terdapat berbagai kelompok pemuda yang telah terbentuk sejak kecil yang lazim disebut 'sahabat' terdiri atas dua atau tiga orang sejenis yang disebut chums. Kelompok-kelompok kecil ini kemungkinan bisa bergabung sehingga menjadi kelompok yang besar, yakni clique sebagai kelompok kedua.

Temuan dari Jalal (2014) pemuda memahami risiko hamil setelah melakukan hubungan seksual sumber informasi yang disukai pemuda adalah petugas kesehatan. Barker menyatakan dalam lingkungan pergaulan pemuda terdapat berbagai kelompok yang terbentuk dari kecil. Kelompok pemuda merupakan suatu kelompok yang menarik untuk di perhatikan dalam dunia kehidupan, karena dalam masa perubahan tersebut, para pemuda akan memiliki masalah-masalah. Pemuda ini akan mudah meniru dan mengadopsi budaya luar yang dapat mempermudah dirinya dalam melakukan interaksi sosial antar sesamanya (Barker, 2005 : 424).

Dalam kehidupan pemuda, teman teman sebaya sangat penting, segala macam pengetahuan bisa beredar melalui kelompok teman sebaya (peer group). Demikian pula pengetahuan pemuda tentang masalah seksualitas juga sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Informasi tentang masalah reproduksi, informasi yang diberikan justru bukan bersifat positif malah memberikan dampak negatif, kebanyakan berunsur provokatif atau ajakan untuk melakukan hubungan seksual guna memenuhi hasrat. Dan ada di antaranya beralih untuk membuktikan kejantanan dan kedewasaan.

Temuan Jalal (2014) pemuda pemudi yang terjaring SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia) 2012 adalah golongan umur 17 dan 20 tahun keatas untuk berhubungan seksual pertama. Pemerintah memiliki program GenRe yang memberikan pelayanan kepada pemuda untuk menunda berhubungan seks artinya menunda perkawinan dan calon pengantin putri berusia 23 tahun keatas. Calon pengantin mengerti pelayanan KB memahami kehamilan persalinan, pelayanan setelah kelahiran dan bina keluarga balita. Keluarga berperan penting sebagai pendidik generasi penerus dan banyak keluarga yang belum mampu berperan sebagai pendidik dan pendamping generasi penerus, terutama yang menyangkut masalah seksualitas. Semua informasi yang didapatkan oleh informan mengaku tidak pernah membicarakan masalah seksualitas di dalam keluarga. Bahkan orang tua pun tidak pernah secara langsung membahas masalah seksualitas terhadap anak-anaknya, orang tua beranggapan bahwa anak-anak akan mengerti dengan sendirinya masalah seksualitas sejalan dengan perkembangan atau pertumbuhan fisiknya.

Selain karena tabu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh LDFFEUI (www.mittrainti.org) dinyatakan bahwa penyebab kurangnya dalam memberikan informasi tentang seks dan kesehatan reproduksi oleh anak-anaknya dikarenakan para orang tua sendiri merasa rendah yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pendidikan seksual, dan ada hal lain juga yang membuat para orang tua tidak memberikan informasi terhadap anak-anaknya justru malah menjadi senjata oleh anaknya untuk melakukan hubungan seksual pranikah.

Menurut Soekanto (1992) peranan keluarga merupakan fungsi yang sangat penting, peranan yang dimaksud adalah melindungi dan memberikan rasa aman kepada pribadi-pribadinya yang menjadi anggotanya, sebagai suatu unit sosial ekonomi yang memenuhi segala kebutuhan anggotanya, tempat anggota keluarga mengalami proses sosialisasi awal, menumbuhkan dasar-dasar norma pergaulan hidup. Nilai dan norma baru dari belahan dunia lain dengan deras masuk ke kota-kota besar didukung dengan kecanggihan teknologi di era ini yang sering disebut sebagai pop culture.

Proses perubahan keluarga tersebut yang meliputi perubahan dalam struktur keluarga, fungsi dan prinsipnya, juga mengalami perubahan. Hal ini secara institusional sangat memengaruhi ikatan perkawinan dan interaksi di antara anggota keluarga. Salah satu pendorong bagi perubahan keluarga adalah karena berkembangnya kebudayaan, materi, tingkat penemuan dan berkembangnya teknologi, perbaikan fasilitas transportasi dan komunikasi serta meluasnya industrialisasi dan urbanisasi (Lippit, Merrill dan Elliot dalam Khairuddin, 1997:75).

Sebenarnya nilai-nilai itu berasal dari pengalaman manusia berinteraksi dengan sesamanya selanjutnya nilai-nilai itu akan berpengaruh pada pola pikir manusia yang kemudian akan menentukan sikapnya. Dan sikap akan timbul pola tingkah laku tertentu yang nantinya akan mengatur manusia dalam berinteraksi. Masa pemuda dikenal sebagai masa peralihan ke dunia orang dewasa (Soekanto 1992:83).

Bab 4

Sistem Sosial dan Perilaku Menyimpang

A. Sistem Sosial

Menurut Wirawan (2012: 54-56), sistem sosial adalah suatu sistem tindakan yang terbentuk dari sistem sosial berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang dengan secara tidak kebetulan, tetapi tumbuh dan berkembang atas standar penilaian umum atau norma norma sosial yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat.

Sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain dan di mana hubungan tersebut saling memengaruhi dalam kesatuan sosial. Dalam sistem sosial, paling tidak harus terdapat dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi satu sama lain, mempunyai tujuan dari interaksi tersebut, mempunyai struktur, simbol dan tujuan bersama. Secara sederhana, sistem sosial juga dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, masing-masing bekerja sendiri dan saling mendukung dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

1. Pengertian Sistem Sosial Menurut Para Ahli

Menurut Sulaeman (1995: 16), teori sistem sosial pertama kali di perkenalkan oleh seorang sosiologi Amerika bernama Talcott Parsons. Konsep sistem sosial merupakan alat analisis realitas sosial sehingga sistem sosial menjadi suatu model analisis terhadap organisasi sosial. Sistem sosial ialah alat pembantu untuk menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia merupakan sistem sosial.

Menurut Talcott Parsons, sistem sosial hanya sebagai segmen (atau "subsistem") dari apa yang disebut Parsons sebagai teori tindakan. Parsons mengorganisir sistem sosial dalam hal unit tindakan, di mana satu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu adalah satu unit. Menurut Parsons, sistem sosial bergantung pada sistem bahasa, dan budaya harus ada dalam masyarakat agar memenuhi syarat sebagai sistem sosial.

Menurut Ogburn dan Nimkoff, Ogburn dan Nimkoff telah memberikan versi sederhana dari definisi Parsons yaitu sistem sosial dapat didefinisikan sebagai pluralitas individu yang berinteraksi satu sama lain sesuai dengan norma dan makna budaya bersama.

Menurut Abdulsyani (1994), sistem sosial adalah konsep yang paling umum digunakan dalam menjelaskan dan mempelajari hubungan manusia di dalam kelompok atau dalam organisasi sosial. Dalam hal ini manusia sebagai anggota masyarakat adalah individu-individu yang saling bergantung. Interaksi antar individu berkembang berdasarkan standar penilaian dan kesepakatan bersama yaitu berpedoman pada norma-norma sosial merupakan dasar dari terbentuknya sistem sosial.

Selanjutnya, Jhonson (1986) menjelaskan, sistem sosial hanyalah salah satu dari sistem-sistem yang termasuk dalam kenyataan sosial. Sistem sistem sosial tersebut adalah bentukan dari tindakan-tindakan sosial individu. Sedangkan menurut Nasikun (1993), sistem sosial tidak lain ialah suatu sistem daripada tindakan-tindakan, yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu, tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, tapi tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum masyarakat. Sistem Sosial merupakan sistem bermasyarakat itu sendiri.

2. Ciri Sistem Sosial

Sistem sosial memiliki beberapa karakteristik, di antaranya :

a. Sistem terhubung dengan pluralitas aktor individu

Ini berarti bahwa suatu sistem atau sistem sosial tidak dapat ditanggung sebagai akibat dari aktivitas satu individu. Ini adalah hasil dari berbagai kegiatan individu. Untuk sistem, atau sistem sosial, interaksi dari beberapa individu harus ada di dalamnya.

b. Tujuan dan Obyek

Interaksi manusia atau kegiatan aktor individu tidak boleh tanpa tujuan atau tanpa objek. Kegiatan-kegiatan ini harus sesuai dengan tujuan dan objek tertentu. Ekspresi hubungan sosial yang berbeda muncul sebagai akibat dari interaksi manusia. Keteraturan dan Pola di antara berbagai Unit Konstituen Persatuan yang digarisbawahi di antara berbagai unit konstituen menghasilkan 'sistem sosial'.

c. Hubungan Fungsional adalah Dasar Persatuan

Kesatuan ini didasarkan pada hubungan fungsional. Sebagai hasil dari hubungan fungsional antara unit-unit konstituen yang berbeda, keseluruhan yang terintegrasi dibuat dan ini dikenal sebagai sistem sosial.

d. Aspek Fisik atau Lingkungan Sistem Sosial

Hal ini berarti bahwa setiap sistem sosial terhubung dengan wilayah geografis tertentu atau tempat, waktu, masyarakat dan lain-lain. Dengan kata lain itu berarti bahwa sistem sosial tidak sama pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda dan dalam keadaan yang berbeda. Karakteristik sistem sosial ini sekali lagi menunjukkan sifatnya yang dinamis atau dapat berubah.

e. Terhubung dengan Sistem Budaya

Sistem sosial juga terkait dengan berbagai komponen di dalam unsur budaya. Ini berarti bahwa sistem budaya menghasilkan persatuan di antara anggota masyarakat yang berbeda berdasarkan budaya, tradisi, agama, dan lain-lain.

f. Tujuan dan Obyek yang Dinyatakan dan Tersirat

Sistem sosial juga terkait dengan tujuan yang dinyatakan dan tersirat. Dengan kata lain, itu berarti bahwa sistem sosial adalah penyatuan aktor individu yang berbeda yang termotivasi oleh maksud dan tujuan, serta kebutuhan mereka.

g. Karakteristik Penyesuaian

Sistem sosial memiliki karakteristik penyesuaian. Ini adalah fenomena dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan yang disebabkan oleh bentuk sosial. Kita juga telah melihat bahwa sistem sosial dipengaruhi oleh tujuan, objek, dan kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa sistem sosial hanya akan relevan jika ia mengubah dirinya sesuai dengan objek dan kebutuhan yang berubah. Telah terlihat bahwa perubahan terjadi dalam sistem sosial karena kebutuhan manusia, lingkungan dan kondisi dan fenomena historis.

Keteraturan, Pola, dan Keseimbangan sistem sosial memiliki karakteristik pola, keteraturan dan keseimbangan. Sistem sosial bukanlah keseluruhan yang terintegrasi tetapi menyatukan unit-unit yang berbeda. Kebersamaan ini tidak terjadi secara acak dan serampangan.

3. Sistem Sosial Dalam Sosiologi

Dalam sosiologi, sistem sosial ialah jaringan pola hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren yang ada antara individu, kelompok, dan institusi. Hal ini merupakan struktur formal peran atas contoh status sosial yang dapat terbentuk dalam kelompok kecil yang stabil. Seorang individu bisa menjadi bagian dari banyak sistem sosial sekaligus.

Sistem sosial menekankan adanya saling ketergantungan antar berbagai contoh fenomena sosial. Fakta tunggal dipelajari sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Sistem berfungsi ketika elemen-elemen komponennya beroperasi. Satu elemen tunggal dari sistem tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa yang lainnya. Misalnya, keluarga adalah sistem sosial. Para anggota keluarga memiliki interaksi sosial yang sangat dekat satu sama lain. Keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan. Anggotanya tidak dapat bertahan hidup atau berfungsi sendiri.

4. Unsur-unsur Sistem Sosial

Menurut Alvin L. Bertrand, unsur-unsur pokok "sistem sosial" adalah sebagai berikut :

- a. Keyakinan (pengetahuan).
- b. Perasaan (sentimen).
- c. Tujuan, sasaran atau cita-cita.
- d. Norma.
- e. Kedudukan - peranan.
- f. Tingkatan atau pangkat (rank).
- g. Kekuasaan atau pengaruh (power).
- h. Sanksi. "(Basrowi. 2016: 108)"

5. Fungsi Sistem Sosial

Talcott Parsons telah memberikan paradigma empat fungsi sistem sosial yang terdiri atas:

- a. Adaptasi

Kemampuan beradaptasi sistem sosial terhadap lingkungan yang berubah sangat penting. Tidak diragukan lagi, sistem sosial adalah hasil dari lingkungan geografis dan proses sejarah yang telah berlangsung lama. Namun, itu seharusnya tidak membuatnya menjadi kaku dan tidak elastis. Perlu fenomena yang fleksibel dan fungsional.

- b. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dan kemampuan beradaptasi sangat terkait satu sama lain. Keduanya berkontribusi pada pemeliharaan tatanan sosial. Setiap sistem sosial memiliki satu atau lebih tujuan yang ingin dicapai melalui upaya kerja sama. Mungkin contoh terbaik dari tujuan sosial adalah keamanan nasional. Adaptasi dengan lingkungan sosial dan non-sosial, tentu saja, perlu jika tujuan ingin dicapai. Tetapi di samping itu, sumber daya manusia dan non-manusia harus dikerahkan dengan cara yang efektif, sesuai dengan sifat spesifik dari tugas.

c. Integrasi

Sistem sosial pada dasarnya adalah berbagai bentuk integrasi sosial. Dalam rutinitas kehidupan umum, itu bukan masyarakat tetapi kelompok atau subkelompok di mana orang merasa lebih terlibat dan tertarik. Masyarakat, secara keseluruhan tidak masuk ke dalam perhitungan seseorang. Namun, kita tahu sebagaimana ditunjukkan oleh Durkheim, bahwa individu adalah produk masyarakat. Emosi, sentimen, dan kekuatan sejarah begitu kuat sehingga seseorang tidak dapat melepaskan diri dari tambatannya.

d. Pemeliharaan Pola Laten

Pemeliharaan pola dan manajemen ketegangan adalah fungsi utama dari sistem sosial. Dengan tidak adanya upaya yang tepat dalam hal ini, pemeliharaan dan kontinuitas tatanan sosial tidak mungkin terjadi. Bahkan dalam setiap sistem sosial ada mekanisme yang dibangun untuk tujuan tersebut. Setiap individu dan subkelompok mempelajari pola dalam proses internalisasi norma dan nilai agar sikap masyarakat sesuai terhadap norma-norma dan institusi, sehingga sosialisasi berjalan. Masalah menanamkan pola, sama pentingnya dengan membuat aktor untuk mengikutinya. Untuk ini selalu ada upaya terus menerus dalam hal operasional kontrol sosial. (Pengertian Sistem sosial, macam, ciri, fungsi, dan contohnya. 2019. <http://dosensosiologi.com/-sistem-sosial/> Diakses 2 Desember 2020)

6. Contoh Sistem Sosial

a. Organisasi

Adalah Kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama dengan dengan aturan dan struktur di dalamnya. Dalam organisasi mereka mempunyai tugas dan fungsinya adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama. Namun demikian individu-individu dalam organisasi itu juga memiliki ikatan masing-masing yang tidak berkaitan dengan tujuan organisasi, namun berkaitan dengan kepentingan-kepentingan lain, misalnya kesamaan asal daerah, hobi, atau afiliasi sosial lain, sehingga membentuk sistem sosial yang lain. "(Thohir Yuli Kusmanto. 2018)".

b. Kerja bakti

Kerja bakti merupakan kegiatan masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama. dalam hal ini kekompakan dalam masyarakat sangat dibutuhkan agar tujuan diadakan kerja bakti dapat terlaksana dengan baik di dalam kerja bakti juga terbentuklah struktur sosial hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain yang dapat menjalin kekeluargaan yang sangat erat dan bahkan memperbaiki adaptasi antara masyarakat.

Kerja bakti biasanya dilakukan karena adanya suatu proyek kebersamaan untuk kepentingan umum yang biasanya terlaksana karena ada kemauan dari semua masyarakat untuk membangun serta meningkatkan pelayanan umum di daerahnya. Contoh kerja bakti membersihkan lingkungan baik berupa jalanan umum tempat-tempat fasilitas umum.

c. Keluarga

Lembaga keluarga merupakan sistem sosial yang paling dasar yang terdapat dalam masyarakat. Di dalam keluarga, seluruh anggota keluarga selalu melakukan berbagai macam kegiatan. Ada sebuah ketergantungan disana, yaitu antar anggota keluarga selalu membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk sistem sosial dalam keluarga.

d. RT atau Rukun Tetangga

RT atau Rukun Tetangga merupakan sistem sosial yang paling bawah dalam susunan pemerintahan di desa, atau satu tingkat diatas keluarga. Di dalam RT atau Rukun Tetangga, warga yang terdapat dalam RT tersebut, selalu melakukan interaksi antar tetangga yang mana salah satunya adalah dengan mengadakan pertemuan rutin antar warga, arisan, ronda.

e. RW atau Rukun Warga

Sama halnya dengan RT atau Rukun Tetangga, RW atau Rukun Warga merupakan salah satu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. RW atau Rukun Warga juga merupakan susunan pemerintah di bawah desa. Namun RW atau Rukun Warga cakupannya lebih luas dibandingkan dengan RT atau Rukun Tetangga.

f. Desa

Desa merupakan salah satu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Desa adalah suatu unit pemerintahan yang paling dasar dalam suatu daerah. Desa tentu saja membutuhkan warganya dalam menjalankan berbagai bentuk kegiatan. Selain itu, untuk membangun desa diperlukan kontribusi dari semua pihak serta warga tersebut.

g. Kecamatan

Kecamatan merupakan salah satu sistem sosial yang ada dalam masyarakat, terutama dalam pemerintahan. Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang lebih luas dari Desa. Pelayanan yang ada di kecamatan biasanya harus mendapat keterangan dari desa terlebih dahulu. Desa dan kecamatan mempunyai hubungan atau syarat interaksi sosial yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan yang ada, karena mereka saling memiliki ketergantungan satu sama lain.

h. Sekolah

Sekolah merupakan salah satu bentuk sistem sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, terutama di lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Sekolah terdiri dari guru, murid, petugas TU, karyawan yang semuanya memiliki peran masing-masing dan saling berhubungan untuk membentuk suatu kesatuan.

i. Ronda

Ronda adalah salah satu contoh konkret adanya sebuah sistem sosial. Ronda merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga guna menjaga lingkungan tempat tinggal agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Ronda tersebut biasanya dilakukan di malam hari.

j. Arisan

Arisan sering kali kita temui yang dilakukan oleh ibu-ibu di dalam masyarakat. Arisan merupakan sebuah sistem sosial yang ada di masyarakat. Arisan termasuk ke dalam sistem sosial karena arisan tentu terdapat interaksi antara individu dengan individu lain.

k. Politik

Sistem sosial menggambarkan suatu interaksi atau realitas sosial yang ada di masyarakat, sedangkan politik menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang mengatur sebuah kebijakan maupun kekuasaan. Antara sistem sosial dan politik ini keduanya saling berkaitan, karena politik merupakan salah satu sub dari sistem sosial.

l. Hukum

Sistem dalam lembaga hukum merupakan cerminan dari sistem sosial di dalam masyarakat dengan cakupan yang lebih luas. Hukum merupakan sub dari sistem sosial yang ada di masyarakat. Hukum ada karena adanya proses timbal balik. Proses timbal balik tersebut akan memengaruhi keputusan hukum untuk dikaji karena hukum tidak bisa lepas dari adanya sistem sosial.

m. Agama

Agama merupakan salah satu sub dari sistem sosial. Agama mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan atau sesama. Banyak masyarakat yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda, namun hubungan antar umat beragama harus saling terjaga. Adanya hubungan tersebut akan menciptakan sebuah sistem sebagai masyarakat sosial.

n. Budaya

Sistem sosial dalam unsur budaya adalah bentuk dari totalitas nilai, tata sosial, serta tingkah laku masyarakat sebagai upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. (Contoh Sistem Sosial dalam Kehidupan sehari-hari. 2019. <http://dosensosiologi.com/contoh-sistem-sosial/>. Diakses 3 Desember 22)

o. Musyawarah

Musyawarah dilakukan karena untuk mengambil kesepakatan bersama dari beberapa pendapat. Musyawarah dapat membentuk sistem sosial antara masyarakat walaupun adanya perbedaan pendapat dari hal inilah terbentuknya suatu sistem sosial yang lain. Musyawarah dapat meningkatkan keragaman antara masyarakat dengan pemimpin dan dapat menimbulkan suatu mufakat yang disetujui oleh kebersamaan dalam mencapai tujuan. Musyawarah itu sendiri dilakukan karena adanya keinginan untuk menemukan titik terang dari

beberapa pendapat dan mengambil kesimpulan serta satu argumen yang disetujui secara bersama.

p. Gotong Rowong

Gotong Royong juga salah satu contoh sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Gotong royong dilakukan karena adanya rasa saling bergantung antar warganya yang ingin saling membantu dalam membangun ataupun membersihkan daerahnya agar terlihat lebih rapi dan indah. Dari gotong royong ini juga terbentuk sistem sosial karena adanya interaksi dari sejumlah orang yang memiliki perbedaan.

q. Tokoh-tokoh sosiologi yang menggunakan konsep sistem sosial

1) Masyarakat sebagai suatu sistem menurut comte

Comte melihat sistem dalam hal adanya saling ketergantungan, kerjasama, ikatan-ikatan sosial misalnya terjadi di dalam pembagian kerja ekonomi dasar utama keteraturan sosial menurut comte adalah keluarga, bukan individu sebab individu tersebut tersosialisasi sejak kecil di dalam keluarga sehingga keluarga lah yang memberikan pengaruh nilai-nilai yang paling besar.

2) Teori sistem dalam konsep Spencer

Menurut Spencer sistem pemerintahan ibarat urat nadi yang mempunyai fungsi koordinasi atau penyelarasan dan pemersatu. Analogi organisme Spencer terhadap masyarakat bukan sesuatu yang diterima begitu saja namun dapat diakui bahwa masyarakat mempunyai berbagai aspek yang dapat dinilai dengan organisme.

3) Konsep sistem sosial menurut marx

Karl Marx menggunakan konsep sistem antara lain dalam pandangannya tentang masyarakat dan kapitalis yang mempunyai hubungan antar kelas yang mana ia memandang kemungkinan terjadi konflik antar kelas yang mengakibatkan perubahan sosial dan kepentingan-kepentingan kelas yang berbeda serta kontradiksi antara kekuatan produksi material dan hubungan-hubungan produksi adalah kontribusi internal yang terdapat di dalam masyarakat yang selanjutnya membawa perubahan sosial.

4) Konsep sistem sosial menurut parson

Parson dan para pengikutnya merupakan orang-orang yang telah berhasil membawa pendekatan fungsionalisme struktural ke dalam pertumbuhan teori-teori sosiologi. Terlalu berpusat kepada peran bagi unsur-unsur normatif yang akan mengatur perilaku sosial individu yang akan menjamin stabilitas sosial. Dan penggunaan pendekatan sistem oleh parsons antara lain mengenai pendapatan tentang realitas sosial yang mana ia berdebat dapat realitas sosial adalah action yang bermakna tindakan manusia yang disertai oleh adanya kesadaran kemauan. Yang mana berpandangan bahwa setiap kehidupan bersama atau masyarakat merupakan jaringan realitas atau sistem sosial dan kesatuan realitas sosial yang paling kecil terdiri dari peranan-peranan sosial terdapat dalam kelompok atau masyarakat seperti peran dokter ibu rumah tangga petani dosen dan lainnya. "(Basrowi. 2016: 108)"

B. Perilaku Menyimpang

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perubahan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini sering kali kita temukan tindakan-tindakan atau perilaku remaja (siswa) bertentangan dengan norma hukum bahkan tidak segan-segan untuk melanggar aturan hukum. Misalnya seorang siswa merokok, mencuri, mabuk-mabukan, berbohong, menyontek pada saat ulangan, mengganggu siswa lain, membolos, dan lain sebagainya.

Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat semakin memprihatinkan. Secara sosiologis, remaja (siswa) pada umumnya memang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing, masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Mereka juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat di sekitarnya. Sebab kondisi kejiwaannya masih labil, remaja gampang terpengaruh oleh keadaan lingkungan sehingga berdampak pada kepribadiannya.

Sementara itu, krisis akhlak yang menimpa pada masyarakat umum terlihat pada sebagian sikap mereka yang dengan mudah merampas hak orang lain (menjarah), main hakim sendiri, melanggar peraturan tanpa merasa bersalah, mudah terpancing emosinya dan sebagainya. Sedangkan krisis akhlak yang menimpa kalangan pelajar terlihat dan banyaknya keluhan orang tua, ahli didik, dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial berkenaan dengan ulah sebagian pelajar yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala, sering membuat keonaran, tawuran, mabuk-mabukan, pesta obat-obat terlarang bergaya hidup seperti hippies, bahkan sudah melakukan pembajakan, pemerkosaan, pembunuhan, dan perilaku kriminal lainnya. (Nata Abbudin , 2008)

Kondisi remaja hari ini semakin memprihatinkan dalam berbagai dimensi kehidupan. Sering kali kita menyaksikan baik melalui media televisi, majalah, media sosial, dan lain sebagainya tindakan-tindakan penyimpangan pelajar, dan kriminalitas yang terjadi sebagian besar di akibatkan karena mabuk.

Data dari WHO tercatat 91 juta orang yang terjejas karena penggunaan alkohol pada tahun 2002 jumlah tersebut 41 persennya pengguna alkohol adalah remaja, dan penyebab utama terjadinya kecelakaan dan tindak kriminal di dunia Alkohol di dunia barat sudah menjadi lazim dan diterima dalam pergaulan sosial dan hampir dikonsumsi setiap hari.

Data yang dihimpun oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) sampai tahun 2006 menggambarkan pola peningkatan penyalahgunaan zat termasuk alkohol yang signifikan, tahun 2006 terjadi 28.118 kasus penyalahgunaan narkotika, 21.318 kasus penyalahgunaan psicotropika dan 4.639 kasus penyalahgunaan zat adiktif, dari tahun sebelumnya tahun 2005 terjadi 8.171 kasus penyalahgunaan narkotika, 6.733 kasus penyalahgunaan psicotropika, dan 1.348 kasus penyalahgunaan zat adiktif. Penyalahgunaan alkohol Dikelompokkan berdasarkan pendidikan formal pada tahun 2006, SLTP dan SLTA. Menempati urutan pertama dengan 73.253 kasus, SD dengan 8.449 kasus, dan PT Dengan 3.987 kasus. (Nendra Verdian, Dimas Pratama, 2013)

Berdasarkan hasil survei Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) Polri memperlihatkan bahwa pemakai narkotika dan minuman keras di Indonesia Secara nasional terbanyak dari golongan pelajar, baik SLTP, SLTA, maupun Mahasiswa, yang jumlahnya mencapai 70%, sedangkan yang lulusan SD hanya 30%, dan sebagian besar dari mereka berasal dari golongan menengah ke atas.

Menurut Santrock menambahkan dalam penelitiannya bahwa 5% -10 % populasi remaja merupakan anak muda yang berisiko sangat tinggi (*veryhigh-risk youth*). Salah satu perilaku anak muda yang berisiko adalah perilaku minum -minuman keras. Berikut pernyataan yang lebih lengkap “Anak Muda dengan perilaku bermasalah ganda meliputi remaja yang ditahan dalam penjara atau yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan serius, putus sekolah atau nilai raportnya di bawah rata-rata, pengguna obat-obatan keras, selalu minum minuman keras, menghisap rokok, aktif dan teratur secara seksual tetapi menggunakan kontrasepsi.

Hal ini berarti bahwa remaja merupakan sumber daya manusia yang potensial menjadi tidak dapat berfungsi secara maksimal akibat semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. (Nendra Verdian, Dimas Pratama, 2013:47)

Dari penjelasan di atas memberikan pemahaman kepada kita tentang kondisi perilaku siswa atau muda dewasa ini. Di mana perilaku tidak dapat terkontrol oleh nilai dan norma kehidupan sehingga memberikan dampak sosial dalam hidup bermasyarakat.

1. Definisi Menurut Para Ahli

a. Menurut Mappier

Perilaku menyimpang disebut dengan tingkah laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah masih dianggap wajar jika hal ini terjadi pada remaja. Maksudnya, tingkah laku ini masih terjadi dalam batas ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat adanya perubahan secara fisik dan psikis.

b. Menurut Hordert

Perilaku menyimpang adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kepribadian kelompok yang akhirnya si pelaku dikenai sanksi. Keinginan yang dimaksud adalah sistem nilai dan norma yang berlaku.

c. Menurut Lawang

Perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem ini untuk memperbaiki perilaku menyimpang.

d. Menurut Zanden

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi.

Dari penjelasan beberapa teori di atas tentang perilaku menyimpang maka dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan hidup masyarakat. Dengan demikian perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa akan berdampak pada lingkungan sekolah karena mengabaikan peraturan, dan norma-norma yang berlaku.

Penyimpangan sosial terbagi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder.

1. Penyimpangan Primer (Primary Deviations)

Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara. Maksud dari bersifat sementara yaitu orang yang melakukan perilaku menyimpang ini masih bisa diterima oleh masyarakat sekitar, karena perilaku menyimpang yang dilakukan hanya sesekali tidak setiap saat. Biasanya orang yang mempunyai perilaku menyimpang primer tidak menyadari perilaku yang dia lakukan itu menyimpang.

Contoh dari penyimpangan primer yaitu ketika lampu merah pengemudi mobil tetap melaju melanggar rambu lalu lintas yang ada, contoh lainnya orang yang memanipulasi pajak kekayaan.

2. Penyimpangan Sekunder (Secondary Deviations)

Sedangkan penyimpangan sekunder kebalikan dari penyimpangan primer. Penyimpangan primer tidak dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat tidak menginginkan ada orang yang melakukan penyimpangan ini karena penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang berat. Penyimpangan yang terjadi biasanya mengarah pada tindakan kriminal.

Contoh dari perilaku penyimpangan sekunder yaitu perambokan, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya (Oki Kurniawan, 2013)

Ada beberapa hal yang menjadi pengaruh terjadinya perilaku menyimpang, antara lain :

- a. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi semacam ini lazim disebut sebagai proses sosialisasi yang tidak sempurna, pantas atau tidak pantas dan sebagainya.
- b. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, misalnya lingkungan yang sering terjadi tindak menyimpang, seperti prostitusi, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.
- c. Proses bersosialisasi yang negatif, karena bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk dan lainnya.
- d. Ketidakadilan, sehingga pihak-pihak yang dirugikan melakukan protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis.

Menurut Casare Lombroso, perilaku menyimpang disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi latar belakang penyimpangan sosial, yaitu :

- a. Biologis

Misalnya orang yang lahir sebagai pencopet atau pembangkang. Ia membuat penjelasan mengenai "si penjahat yang sejak lahir". Berdasarkan ciri-ciri tertentu orang bisa diidentifikasi menjadi penjahat atau tidak. Ciri-ciri tersebut antara lain bentuk muka, kedua alis yang menyambung menjadi satu dan lain-lain.

- b. Psikologis

Menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan ada kaitannya dengan kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Dapat juga karena misalnya pengalaman traumatis yang dialami seseorang.

- c. Sosiologis

Menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Individu tidak dapat menyerap norma-norma

kultural budayanya atau individu yang menyimpang harus belajar bagaimana melakukan penyimpangan.

Penyimpangan perilaku juga terbagi berdasarkan sifatnya, yaitu :

1. Penyimpangan Perilaku Individu

Penyimpangan perilaku yang bersifat individu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh Individu yang berlawanan dengan Norma. Penyimpangan ini biasanya dilakukan di lingkungan keluarga. Seperti misalnya seseorang mencuri dilakukan sendiri.

2. Penyimpangan Perilaku Kelompok

Penyimpangan perilaku yang bersifat kelompok merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok orang yang tunduk pada norma kelompoknya yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. kelompok yang melakukan penyimpangan adalah kelompok pengedar narkoba, sindikat penjahat atau mafia, pemberontak.

Penyimpangan perilaku berdasarkan sifatnya, antara lain :

3. Penyimpangan Bersifat Positif

Penyimpangan yang bersifat positif merupakan suatu bentuk penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, tetapi mempunyai dampak positif terhadap dirinya maupun masyarakat. Penyimpangan ini memberikan unsur inovatif dan kreatif sehingga dapat diterima oleh masyarakat, meskipun caranya masih belum umum atau menyimpang dari norma yang berlaku.

Contohnya dapat berupa masyarakat yang masih tradisional, perempuan yang melakukan aktivitas atau menjalin profesi yang umum dilakukan oleh laki-laki seperti berkarir di bidang politik, Wanita yang berkarir di bidang politik merupakan contoh penyimpangan yang bersifat positif, menjadi pembalap, sopir taksi, anggota militer dan lain-lain oleh sebagian orang masih dianggap tabu. Namun hal tersebut mempunyai dampak positif, yaitu emansipasi wanita.

4. Penyimpangan Sosial Bersifat Negatif

Penyimpangan yang bersifat negatif merupakan penyimpangan yang cenderung mengarah pada tindakan yang dipandang rendah, berdampak buruk

serta merugikan bagi pelaku dan juga masyarakat. Bobot penyimpangan negatif dapat dilihat dari norma-norma atau nilai-nilai yang telah dilanggar. Pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan dinilai lebih ringan dibanding pelanggaran terhadap norma hukum.

Contohnya dapat berupa penyimpangan yang bersifat negatif, membolos, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan sebagainya. Penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda (*differential association*) yang dipelajari melalui proses alih budaya.

2. Bentuk perilaku menyimpang

Masalah perilaku menyimpang bukanlah hal yang asing lagi di kalangan masyarakat seluruh dunia, terutama pada masyarakat Indonesia. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang kerap terjadi di manapun dan kapanpun, baik itu oleh remaja maupun orang dewasa.

Masalah-masalah penyimpangan sosial ini tetap saja ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat seolah tidak ada tindakan yang menanganinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan buruknya perilaku-perilaku menyimpang, atau mungkin kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyimpangan sosial. (Athouri Berlian : 1)

Ada beberapa jenis penyimpangan sosial yang kerap terjadi dan terus terjadi di kalangan masyarakat hingga saat ini, berikut pembahasannya :

1) Kriminalitas

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. (Evi Yulia dalam Kartono, 1999). Kriminalitas di Indonesia masih marak terjadi sampai saat ini, kebutuhan hidup dan kondisi lingkungan menjadi pendorong seorang individu atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminalitas.

Ada 5 jenis kejahatan atau kriminalitas, antara lain :

- a. Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) adalah sebuah kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindakan pindana lain. Contohnya berjudi, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya

- b. Kejahatan terorganisir (organized crime) yaitu pelaku yang merupakan komplotan yang berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Contohnya komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur.
- c. Kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah kejahatan yang mengacu pada kejahatan orang-orang terpandang atau berstatus tinggi. Contohnya korupsi, kolusi.
- d. Kejahatan kerah biru (blue collar crime) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang golongan rendah. Contohnya pencuri jemuran ataupun sandal di majid.
- e. Kejahatan korporat (corporate crime) merupakan jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Contohnya suatu perusahaan membuang limbah beracun ke sungai yang mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit.

kriminalitas di Indonesia meningkat selama masa pandemi covid-19, data statistik kejahatan yang dicatat Polri, pada minggu ke-19 dan ke-20 terjadi kenaikan sebesar 7,04 persen. Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan pada pekan ke-19 pandemi terjadi 3.481 kasus kemudian dipekan ke-20 naik 245 kasus menjadi 3.726 kasus kejahatan. Sumber: <https://mediaindonesia.com/megapolitan/314036/lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi. "Pada Februari ada 17.411 kasus. Di Maret ada 20.845 kasus).

Data Polda Bali bisa dirujuk untuk melihat peningkatan kriminalitas selama pandemi. Laporan harian Biro Operasi Polda Bali pada 10 April mencatatkan 12 kasus kejahatan. Angka ini meningkat menjadi 15 kasus kejahatan dalam laporan harian tanggal 20 April. Jumlah tahanan selama rentang 10-15 April di Bali juga meningkat dari 492 orang menjadi 504 orang.

Melansir liputan 6, Kabaharkam Polri Irjen Agus Senin (20/4) lalu mengatakan baiknya tingkat kriminalitas salah satunya di sebabkan banyak orang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi. Dan mereka pun memilih jalan pintas kriminalitas. sumber: <https://katadata.co.id/muhammadrizhoi/berita/5e9ffb527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>

2) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan pergaulan tidak sehat yang terlepas dari aturan ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas dapat di kategorikan sebagai berikut :

a. Penyimpangan Seksual

Menurut Vander Zandan, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela, batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat ataupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Kelainan seksual adalah keadaan atau tindakan seseorang yang berbeda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya (Sarwono, 1982 : 125).

Macam-macam kelainan seksual :

1. Kelainan Seksual pada Objeknya

a) Homoseksual

Istilah Homoseksual, adalah suatu hubungan baik bermusuhan atau bersahabat dengan satu anggota dari jenis kelamin yang sama (Fromm, 2011 : 183).

b) Lesbian

Lesbi adalah sebuah hubungan emosional yang melibatkan rasa, cinta dan kasih sayang dua manusia yang memiliki jenis kelamin sama. Hampir sama dengan homoseksual, hanya saja pada homoseksual belum mengacu pada jenis kelamin tertentu dan masih bersifat luas. Sedangkan Lesbi lebih dimaknai bahwa perilaku aktivitas sejenis tersebut berasal dari kaum wanita.

c) Bestiality

Bestiality adalah bentuk penyimpangan orientasi seksual individu di mana terdapat kejanggalan untuk mencapai kepuasan hubungan seksual dengan menggunakan lawan sebagai media dorongan atau rangsangan sosial.

Seks diluar nikah juga menjadi salah satu di antara permasalahan seksual serta penyimpangan perilaku. Perilaku seks diluar nikah di tentang oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat serta dengan sangat tegas di larang oleh agama. Dampak yang di timbulkan akibat seks pranikah dalah HIV/AIDS. Di mana kita ketahui penyakit tersebut sangat berbahaya dan dapat menyebabkan korbannya meninggal dunia.

C. Kenakalan Remaja

a. Seks Bebas Remaja

Menurut Rice (dalam Gunarsa, 2004), masa remaja adalah masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa peralihan tersebut, terdapat dua hal penting yang menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut yaitu pertama, hal yang bersifat eksternal, meliputi adanya perubahan lingkungan, dan yang kedua adalah hal yang bersifat internal, mencakup karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (storm and stress period).

Masa remaja seperti yang telah disebutkan merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dalam masa tersebut tercakup semua perkembangan yang dialami seorang individu sebagai persiapan untuk menuju masa dewasa. Dengan demikian, masa ramaja ini meliputi pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan perubahan yang berlangsung secara bertahap dari masa sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menjalani masa remaja tersebut yang merupakan masa peralihan, tak jarang banyak remaja yang terjerumus ke dalam hal-hal negatif (tidak baik) atau yang sering juga disebut menyimpang (Agustiani, 2006).

Dapat dikatakan bahwa masa remaja ini erat kaitannya dengan pergejolakan mental yang dapat membawa pengaruh terhadap gaya hidup dan perilaku

remaja. Remaja yang pada masanya inilah ia berproses untuk mulai mencari jati dirinya dengan cara mencoba hal-hal baru dalam kehidupannya. Dalam mencari tahu hal baru ini, remaja tak lepas dari rasa ingin tahu (curiosity) yang sangat tinggi. Segala sesuatu yang menarik menurut remaja pasti akan dicoba, apalagi hal tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada masa remaja inilah remaja dalam cara berpikir dan berperilakunya masih labil sehingga terkadang tindakan atau aktivitas yang dilakukan remaja berpotensi mengarah pada perilaku menyimpang, yaitu tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Contoh adanya perilaku menyimpang pada remaja yaitu seks bebas, tawuran, kekerasan, pemerkosaan, minum-minuman keras, pemakaian narkoba, dan lainnya.

Dari salah satu bentuk penyimpang perilaku remaja adalah seks bebas. Seks merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia, dalam hal ini seks membutuhkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan akan seksual. Dalam kehidupan sehari-hari, sepasang manusia haruslah melakukan pernikahan sebelum memenuhi kebutuhan seks mereka. Namun, dalam kenyataannya seringkali manusia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dalam hal pemenuhan seks ini, yaitu seperti melakukan hubungan badan diluar pernikahan atau yang sering disebut seks bebas.

Manusia yang hidup dalam masyarakat haruslah memperhatikan norma-norma yang ada disekitarnya. Sehingga meskipun seks ini merupakan kebutuhan manusia, namun haruslah tetap melihat norma yang ada dalam masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki aturan yang membatasi mereka dalam menjalankan kehidupan. Oleh karena itu, manusia tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan seks, sehingga jika hubungan tersebut terjadi di luar batas norma yang ada maka tergolong dalam perilaku menyimpang karena melanggar norma yang ada dalam masyarakat sehingga dinamakan seks bebas.

Mengenai seks bebas, hal ini pun banyak terjadi pada kalangan remaja yang tengah berada pada masa ingin mencoba hal baru yang belum pernah ia lakukan. World Health Organization (2016), menyebutkan bahwa sekitar 21 juta remaja perempuan yang berumur 15-19 tahun di negara berkembang, mengalami kehamilan setiap tahun dan hampir setengah dari kehamilan tersebut (49%) merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perilaku menyimpang remaja yaitu termasuk seks bebas. Kemudian, data statistik PBB memperlihatkan sebanyak 16 juta gadis remaja di dunia yang berusia di bawah 18 tahun

melahirkan di setiap tahunnya. Sebanyak 3,2 juta remaja menjalani aborsi yang tidak aman, kehamilan di kalangan gadis remaja sering disebabkan oleh diskriminasi, pelanggaran hak (termasuk pernikahan dini, pendidikan yang tidak layak, dan hubungan seks secara paksa). Data dari KPAI dan Kemenkes 2013 sekitar 62,7% remaja Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Kemudian 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah juga berasal dari kelompok usia remaja dan 21% di antaranya pernah melakukan aborsi. Jumlah remaja yang melakukan seks di luar nikah mengalami peningkatan, sebesar 46% remaja Indonesia berusia 15-19 tahun sudah berhubungan seks. Data sensus Nasional bahkan menunjukkan 48-51% perempuan hamil adalah remaja. (Rahmawati dkk, JIMKESMAS, 2017: 3)

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mempersiapkan remaja guna menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab yang meliputi persiapan fisik, psikis, dan sosial untuk menikah dan menjadi orang tua pada usia yang matang.

Infodatin Kementerian Kesehatan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 2017 menjelaskan data hasil survei mengenai situasi kesehatan reproduksi remaja Indonesia yang sebagian besar bersumber dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) terutama komponen Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Secara umum, remaja laki-laki lebih banyak yang menyatakan pernah melakukan seks pranikah dibandingkan perempuan. Dibandingkan tahun 2007, persentase pada tahun 2012 cenderung meningkat kecuali pada perempuan usia 15-19 tahun. Tentu hasil survei ini kurang menggembirakan, karena seks aktif pranikah pada remaja berisiko terhadap kehamilan remaja dan penularan penyakit menular seksual. Kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja perempuan malah dapat berlanjut pada aborsi dan pernikahan di masa remaja. Keduanya akan berdampak pada masa depan remaja tersebut, janin yang dikandungnya dan keluarganya.

Ketika responden (wanita dan pria) rentang usia 15-24 tahun ditanya tentang sikap mereka terhadap perilaku seksual pranikah. Pendapat wanita yang menyatakan setuju terhadap perilaku seksual pranikah adalah 1 persen untuk wanita dan 1 persen untuk pria. Sementara pendapat pria yang setuju

hubungan seksual pranikah 4 persen jika dilakukan oleh wanita dan 8 persen jika oleh pria. Terdapat kecenderungan pihak yang menyetujui hubungan seks pranikah dilakukan oleh pria.

Hasil tersebut didapat dari pola menurut karakteristik latar belakang yang pertama, wanita dan pria yang menyetujui perilaku seksual pranikah lebih banyak dari tingkat pendidikan tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar dan tamat sekolah dasar serta kuintil kekayaan terbawah. Kemudian yang kedua, wanita dan pria umur 20-24 cenderung lebih setuju terhadap perilaku seksual pranikah dibanding wanita dan pria umur 15-19, tidak ada perbedaan antara wanita dan pria menurut tempat tinggal dan kuintil kekayaan.

Kemudian pria yang menyatakan setuju tentang perilaku seksual pranikah ditanya lebih lanjut alasan mereka menyetujui perilaku seksual pranikah. Persentase alasan pria belum kawin umur 15-24 menyetujui perilaku seksual pranikah tertinggi ditempati oleh alasan saling mencintai (83%), diikuti secara berturut-turut oleh alasan suka sama suka (82%), berencana akan menikah (77%), tahu konsekuensi (70%), dan menunjukkan cinta (70%). Kemudian hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2012 (SKRRI) menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan remaja melakukan seks pranikah yaitu terjadi karena begitu saja, rasa penasaran, dipaksa pacar/pasangan, ingin menikah dan karena adanya pengaruh teman.

b. Studi Kasus Perilaku Berisiko Remaja Kota Medan dalam Perilaku Seksual

Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, sekaligus menjadi kota terbesar di pulau Sumatera dan di semenanjung Malaka. Jumlah penduduk kota Medan lebih dari 2 juta jiwa, tepatnya menurut Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 sebanyak 2.465.469 jiwa. Laporan Indonesia Research Center(IRC), pada bulan Agustus 2016, menempatkan kota Medan sebagai kota dengan urutan pertama kota yang tidak aman. Proporsi kenakalan remaja dan berbagai perilaku berisiko juga termasuk pada taraf yang mengkhawatirkan. Salah satu kenakalan remaja yang ada di Kota Medan adalah mengenai perilaku seksual.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Kintoko Rochadi dengan judul Studi Kasus Perilaku Berisiko Remaja Kota Medan (Pola Makan, Aktivitas Fisik, Konsumsi Alkohol dan Narkoba Serta Perilaku Seksual) mengemukakan bahwa dari 180 remaja yang mengikuti penelitian ini terdapat 112 remaja

(62,2%) yang sudah berpegangan tangan, 43 remaja (23,9%) yang sudah berpelukan dan 48 remaja yang melakukan masturbasi (onani) dengan frekuensi paling sering seminggu 1-3 kali (28%) dibandingkan dengan seminggu 3-5 kali (3,3%) dan dibandingkan lain-lain (14,4%). Kemudian ada 38 remaja (21,1%) yang sudah berciuman pipi, 14 remaja (7,8%) sudah berciuman bibir, 12 remaja (6,7%) yang memegang daerah sensitif pasangan, 2 remaja (1,1%) melakukan petting(mendekatkan alat kelamin ke pacar), 1 remaja (0,6%) melakukan seksoral. Jugaterdapat 1 remaja (0,6%) yang sudah melakukan hubungan seksual diluar nikah (senggama) yang dilakukan dengan orang lain dan hal tersebut dilakukan di rumah sendiri.

Data tersebut di atas sudah menunjukkan terjadi perilaku seksual yang mengkhawatirkan pada remaja. Melihat data di atas, perilaku responden sudah cukup mengkhawatirkan karena sudah mengarah pada perilaku seks bebas walaupun jumlahnya sangat sedikit, namun perilaku yang mengarah kepada hubungan seks sudah terlihat nyata. Bahayanya, kesehatan reproduksi tidak ataupun belum dipahami para remaja. Juga, informasi yang salah tentang berbagai hal terkait masalah seks membuat risiko yang lebih besar lagi, seperti aborsi tidak aman. Selayaknya, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi perlu terus digalakkan di sekolah sekolah. Para guru dan orang tua juga perlu diberikan kiat-kiat berkomunikasi yang efektif dan empati pada murid dan anak anaknya.

Data di atas juga menunjukkan sebagian besar dari mereka telah pacaran dan mereka juga sudah diterpa informasi dari video porno. Mayoritas mereka menonton video porno di rumah. Bagi mereka rumah adalah tempat yang aman untuk melakukan perilaku seks. Hal ini menjadi pedoman bagi para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya yang berada di rumah. Kemungkinan, para orang tua menganggap rumah tempat yang ideal agar anak-anaknya menjadi lebih baik, namun penelitian ini menunjukkan justru sebaliknya, yang mana rumah sebagai tempat ideal untuk menyalurkan perilaku seksualnya.

c. Faktor Umum Perilaku Seks Remaja

Pengamatan intensif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2017), secara umum perilaku seksual remaja dipengaruhi oleh perubahan hormon seksual yang terjadi. Namun selain faktor biologis, banyak hal, baik internal maupun eksternal, yang

dianggap mendorong remaja melakukan hubungan seks sebelum menikah di bawah usia 20 tahun.

Faktor internal dari perilaku seksual remaja adalah sebagai berikut.

- Dorongan seksual yang menggebu-gebu dan sulit dikendalikan;
- Dorongan seksual afeksi (menyatakan/menerima ungkapan kasih sayang melalui aktivitas seksual);
- Dorongan agresif;
- Orongan untuk mendapatkan fasilitas/material melalui aktivitas tersebut;
- Dorongan atau keinginan untuk diakui dalam kelompok;
- Dorongan atau keinginan untuk mencoba atau membuktikan fungsi atau kemampuan dari organ seksualnya;
- Kurangnya pemahaman remaja mengenai risiko melakukan hubungan seks sebelum menikah di bawah usia 20 tahun.
- Kemudian faktor eksternal yang dimaksud yaitu sebagai berikut.
- Mengadopsi sikap dan perikakulingkungan sekitarnya, termasuk remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri
- Kurangnya peran orang tua, baik dalam pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi, komunikasi, dan proses negosiasi antara orang tua dan anak
- Tekanan dari teman sebaya atau dari pacar
- Pengaruh media seperti tayangan televisi, film porno, dan sebagainya yang memengaruhi aspek fisik dan psikologis
- Tidak adanya ruang bagi remaja untuk mendapatkan akses informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan seksual.



THE
Character Building
UNIVERSITY

Bab 5

Pranata Agama dan Pranata Politik

Secara umum pranata atau lembaga sosial merupakan suatu produk kesepakatan masyarakat yang dibuat untuk menjalankan system nilai dan norma tertentu. Sedangkan secara etimologis, pranata sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu social institution yang berarti lembaga kemasyarakatan, bangunan sosial, ataupun lembaga sosial.

Adapun pengertian pranata sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Durkheim, mengatakan bahwa pranata itu merupakan suatu institusi sosial masyarakat.
- b. Peter L.Berger, mengatakan pranata sosial adalah suatu peraturan baku yang menyalurkan tindakan manusia seperti naluri pada hewan.
- c. Koentjaraningrat, pranata sosial merupakan suatu system tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada aktivitas khusus dalam kehidupan masyarakat.
- d. Bruce J.Cohen, mengatakan pranata sosial adalah pola-pola yang tersusun secara cepat dan bersifat permanen serta mengandung perilaku yang pasti dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan.

- e. Mac Iver dan Page adalah tata cara dan prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok masyarakat.
- f. Joseph S. Rucek dan Roland L. Warren mengatakan pranata sosial merupakan pola yang mempunyai kedudukan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan dan cara-cara biasa untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur.
- g. Alvin L. Berrtrand mengatakan pranata sosial adalah kumpulan norma sosial (struktur sosial) yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat.
- h. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menyebutkan pranata adalah suatu system norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting.

A. Pranata Agama

Agama merupakan suatu hidayah yang dirutunkan oleh sang pencipta yang diberikan kepada manusia dalam rangka menjalankan fungsi dan statusnya di alam ini. Sebagai sebuah hidayah, agama merupakan kebutuhan manusia yang vital, disamping kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau fisik mempunyai kebutuhan sandang, pangan, dan papan, maka rohani membutuhkan kebutuhan berupa agama.

Agama dalam keberadaannya di masyarakat, seharusnya menjadi bahan perekat yang mempererat hubungan di dalam masyarakat, baik interen pemeluk agama, antar pemeluk agama dengan pemerintah. Namun seringkali agama dianggap sebagai penyebab terjadinya konflik. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan atau di picu oleh persoalan suku, agama, dan ras (SARA).

Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Penolakan terhadap agama sebenarnya bukan penolakan terhadap eksistensi agama, melainkan terhadap fungsi agama. Hal ini disebabkan karena kebingungan melihat fakta-fakta sosial yang terjadi,

misalnya agama yang seharusnya menjadi perekat sosial, justru menjadi penyebab lainnya konflik sosial di masyarakat. Agama yang seharusnya menjadi sumber motivasi bagi penganutnya dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup, bahkan menjadi tempat pelarian atas ketidakmampuan menghadapi cobaan hidup, lalu mengatakan bahwa itulah takdir.

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari berbagai jenis agama. Berbagai jenis agama dan kepercayaan sudah ada dan berkembang di Indonesia sejak dulu. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah pranata yang berguna untuk mengatur sebuah hubungan antar sesama manusia, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan Tuhannya sehingga tercipta suatu kebutuhan yang yang tenteram dan damai serta dapat dikembangkan.

Secara umum, pranata agama adalah system norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa dan antar sesama manusia sehingga keterampilan dan kedamaian batin dapat dikembangkan. Pranata agama juga berguna untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam bidang akhlak dan tingkah laku sehari-hari. Agama adalah sebuah kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa, system budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan dari kehidupan dengan berbagai ajaran, larangan, anjuran dan kewajiban yang mengikat bagi umatnya. Pranata agama juga dapat dikatakan sebagai pranata religi (religious institutions) yaitu kepaduan suatu system antara keyakinan dan praktik yang erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat suci.

Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkatan kompleksitasnya. Ditingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Masyarakat bukan suatu kesatuan politik (entiry) tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut maka masyarakat membutuhkan agama. Hanya dengan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan terhadap ajaran agamalah manusia dapat mengimbangi setiap perubahan di berbagai bidang.

Secara umum, kajian mengenai agama dapat ditinjau dari dua dimensi yaitu dimensi teologis dan dimensi sosiologis. Kajian agama dalam dimensi teologis merujuk kepada adanya klaim kebenaran mutlak ajaran suatu agama. Doktrin-doktrin keagamaan yang diyakini kebenarannya adalah berasal dari Tuhan, kebenarannya juga diakui berada diluar pikiran manusia, sehingga ia semata-mata menjadi ajaran yang hanya dapat diterima dengan keimanan saja.

Berbeda dengan kajian sosiologis, dimensi sosiologis melihat agama sebagai salah satu dari institusi sosial. Sebagai subsistem dari system sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu. Karena fungsinya sebagai subsistem, maka eksistensi dan peran agama dalam suatu masyarakat atau keluarga tah berbeda dengan posisi subsistem lainnya. Dengan kata lain, fungsi agama dalam konteks sosiologis tidak mempersoalkan berdasarkan apa dan bagaimana isi ajaran dan doktrin keyakinannya, melainkan bagaimana ajaran agama dan keyakinan itu diimplementasikan dan terwujud dalam perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.

Elly M.Setiadi & Usman Kolip mendefinisikan agama sebagai berikut:

- a. Agama, secara mendasar dan umum, dapat didefinisikan sebagai seperang-kat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.
- b. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai sistem keyakinan yang dianut dan tindakan yang diwujudkan oleh kelompok masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakinisebagai gaib dan suci.
- c. Bagi para penganutnya, agama merupakan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati).

1. Peran Pranata Agama

Penduduk di Indonesia adalah masyarakat agamis, yang menganut berbagai agama. Beberapa agama yang diakui sebagai agama resmi Negara yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Dalam ajaran islam, peran agama ini sangat strategis. Mukti Ali sebagaimana dikutip Oyo Sunaryo Mukhlas mengemukakan peran agama dalam membangun manusia dengan peran: motivatif, kreatif, sublimatif, dan integratif.

- a. Agama sebagai peran motivatif

Agama sebagai peran motivatif, yaitu mendorong, mendasari, dan melandasi cita-cita serta amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Nurkholis Madjid mengidentikan konsep motivasi ini dengan istilah “niat”.

Niat ini merupakan syarat mutlak untuk melakukan usaha secara bertanggung jawab, sehingga usaha tidak hanya untung-untungan, asal jadi, tidak bergairah serta mudah menjadi optimis.

b. Agama sebagai peran kreatif

Agama sebagai peran kreatif, yaitu mendorong dan mengusung umat Islam yang tidak hanya melakukan kerja produktif saja, melainkan karya baru.

c. Agama sebagai peran sublimatif

Agama sebagai peran sublimatif, yaitu menguduskan segala amaliah umat Islam. Segala perbuatannya dipandang dalam kerangka ibadah kepada Allah.

d. Agama sebagai peran integrative

Agama sebagai peran integratif, yaitu dapat memadukan segala kegiatan umat Islam, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, sehingga terhindar dari bencana “kepribadian pecah” dan mampu menghadapi tantangan serta risiko kehidupan. Di sini solidaritas dan kohesitas lebih ditekankan untuk kebersamaan, simbiosis mutualistik, saling membantu dan menolong.

e. Kedisiplinan

Yang dimaksud dengan kedisiplinan tersebut adalah ketepatan dalam melaksanakan ibadah, baik salat lima waktu bagi umat Islam, pergi ke Gereja dalam hari Minggu untuk umat Kristen, dan lain-lain. Adalah umat beragama yang terbiasa disiplin pada saat menjalankan perintah agamanya. Maka sikap disiplin tersebut dibawa dalam kehidupan sehari-harinya.

f. Fungsi Hukum

Memberikan rule yang jelas terhadap lagu laku manusia akan urusan yang dianggap benar lalu hal-hal yang dianggap salah.

g. Pengendalian Diri

Salah satu yang diajarkan kepada umatnya ialah kesabaran. Kesabaran mempunyai guna yang sangat utama di mengendalikan hawa nafsu orang. Di dalam agama Islam banyak cara yang meraih dilakukan untuk melatih ulah kesabaran. Beberapa di antaranya adalah dengan berdzikir dan berpuasa untuk umat muslim. Jika setiap umat beragama dapat mengendalikan dirinya di hal

apapun maka gak akan ada lagi yang disebut korupsi, perkewalahiran, tawuran, dan lain-lain.

h. Kepekaan Sosial

Semua agama yang wujud di dunia ini gak hanya mengajarkan umatnya bagi selalu berhubungan dengan tuhan, mengajarkan untuk dadat menjalin hubungan yang harmonis dengan manusia lain serta lingkungannya. Contoh kepekaan sosial terhadap sesama adalah mendukung korban bencana alam, korban kerusuhan, dan lain-lain. Sedangkan contoh kepekaan sosial kepada lingkungan adalah tidak melepaskan sampah sembaranga, melakukan reboisasi, tidak melakukan penebangan hutan secara liar, dan lain-lain.

i. Fungsi Sosial

Sehubungan dengan fungsi hukum, aturan petunjuk juga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sosial manusia, adalah sebagai dasar aturan kesusilaan dalam masyarakat, misalnya di masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, perkawinan, kesenian, arsitektur bangunan, dan lain-lain.

j. Fungsi Transformatif

Agama dapat mendorong orang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih benar. Misalnya, dengan agama, umat manusia mampu menciptakan karya seni besar, seperti candi, masjid, dan bangunan-bangunan lain; penyebab timbulnya penjelajahan samudra di antaranya didorong oleh hasrat menyebarkan agama.

Keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu tentu memerlukan rambu-rambu agar tercipta iklim yang kondusif bagi penganut agama masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan suatu pranata sosial dan pranata keagamaan, yaitu norma dan sistem yang mengatur hubungan antar manusia, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan Tuhannya, Allah SWT, sehingga ketertiban lahiriyah dan ketentraman batiniyah dapat di wujudkan secara seimbang dan dengan sebaik-baik nya.

2. Fungsi Pranata Agama

Fungsi pokok pranata Agama adalah memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan tuhan. Fungsi lain memberikan dasar bagi perilaku ajeg (berpola) :

- a. Kepercayaan, Islam percaya ada Allah Swt, pada Kristen katolik dan Kristen portestan percaya adanya Tuhan yesus, agama Buddha percaya adanya adhi Buddha dan agama sinto percaya adanya dewi matahari amaterasu omikami.
- b. Simbol Agama, Agama memiliki berbagai simbol. Bagi umat islam dapat terlihat dari busana islam yang digunakan. Memakai peci putih adalah simbol bagi yang sudah manjalakan ibadah haji , bagi umat Kristen memakai jubah adalah simbol untuk pastor, pendeta dan para biarawan/barawati.
- c. Praktik Agama, Setiap agama mengenal praktik keagamaan seperti shalat (Islam) kebadian (Kristen), misa kudus (Katolik), dan bersemandi (Hindu).
- d. Pemeluk Agama, Tiap agama mempunyai pemeluk. Setiap pemeluk mengadakan pengelompokan sehingga menjadi komunitas, misalnya pengelompokan umat islam majelis taklim, muhammadiyah dan remaja mesjid, dan bagi Kristen katolik mempunyai komunitas mudika (muda mudi katolik) serta menurut agama masing-masing.
- e. Pengalaman Agama, Setiap pemeluk agama mempunyai hubungan pribadi dengan tuhan menurut agamanya masing-masing. Oleh karena itu setiap pribadi mempunyai pengalaman secara khusus yang disebut panggilan. Bagi umat islam panggilan berarti undangan untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, bagi umat Kristen panggilan berarti menanggapi tawaran tuhan , ada panggilan menjadi pastor, pendeta guru, dan sebagainya.

Fungsi lain dari Pranata Agama adalah sebagai berikut:

1. Pedoman hidup;
2. **Sumber kebenaran;**

3. Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan;
4. Tuntutan prinsip benar dan salah;
5. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama;
6. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya akan mendapat pahala, sekecil apa pun perbuatan tersebut;
7. Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan;
8. Pengungkapan estetika manusia cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan bagian dari jiwa manusia;
9. Pedoman untuk reaksi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui reaksi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat banyak contoh dari pranata agama. Baik itu dalam bentuk negative maupun positif. Contoh yang dapat kita lihat dari segi negative yaitu, banyaknya ditemukan masyarakat yang menghina agama orang lain contohnya penistaan agama. Sedangkan dari segi positif contohnya menghargai agama orang lain, dapat bekerja sama dengan masyarakat yang berbeda umat agama.

3. Peran Pranata Agama Dalam Masyarakat Modern

Kehidupan beragama dalam masyarakat tradisional lebih kuat dan terasa bila dibandingkan dengan kehidupan beragama masyarakat modern. Bentuk-bentuk ritual keagamaan yang berhubungan dengan kehidupan tidak pernah terlupakan dan kadang-kadang pelaksanaannya disertai dengan serangkaian upacara adat yang dianggap mempunyai makna tertentu. Peran keagamaan pada masyarakat modern relatif kurang nampak atau terasa dalam kehidupan sehari-hari bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan pada masyarakat tradisional. Hal ini disebabkan adanya cara berpikir yang rasional yang didasarkan pada kepentingan eksak. Memang masyarakat modern juga beragama, akan tetapi pada umumnya pusat kegiatannya hanya tampak di tempat-tempat beribadah.

Diluar tempat itu, kehidupan masyarakat lebih banyak dihabiskan di tempat lain misalnya berada pada kehidupan ekonomi, social dan politik. Cara kehidupan demikian cenderung mengarah pada hal yang bersifat keduniawian (secular trend) bertentangan dengan kehidupan warga masyarakat tradisional yang cenderung mengarah kepada hal yang bersifat keagamaan (religious trend).

B. Pranata Politik

Pranata politik berhubungan dengan Negara dan kekuasaan yang keduanya berintikan kekuasaan. Dengan demikian pranata politik dapat diartikan sebagai suatu system norma yang berisi peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan kekuasaan dan menyangkut tentang siapa, kapan, dan bagaimana memperoleh kekuasaan.

Pranata politik di Indonesia tersusun secara hierarki, yaitu :

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Ketetapan MPR
4. UU
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Keputusan Menteri
8. Peraturan Daerah

Pranata-pranata tersebut dibentuk oleh masyarakat Indonesia dengan jenjang kewenangannya masing-masing, dan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah Negara.

Menurut JW.Schoerl sebuah pranata politik berhubungan dengan hal-hal berikut:

- a. Peraturan

Peraturan bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya ketaatan terhadap tata tertib ini, hak dan kewajiban individu di dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dengan terpenuhinya hak dan

kewajiban warga masyarakat, maka kehidupan masyarakat berlangsung dengan damai.

b. Perselisihan

Pranata politik ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di masyarakat. Penyelesaian perselisihan dapat terlaksana dengan baik karena pranata politik dilengkapi dengan sanksi hukum yang tegas bagi siapa yang melanggarnya.

c. Pemimpin

Pranata politik berhubungan dengan tata cara pemilihan pemimpin. Pemimpin yang berwibawa akan dapat membuat masyarakat cenderung untuk patuh. Oleh karena itu, dalam pranata politik, pemilihan pemimpin menggunakan aturan-aturan yang ketat.

Sejak Adam dan Hawa mempunyai keturunan, dan keturunannya itu melipatganda, maka muka bumi ini mulai dipadati oleh manusia. Sebagai makhluk yang bersifat sosial, manusia hidup berkelompok pada daerah-daerah yang subur, berdasarkan keturunan, ras, etnisitas, agama, ataupun matapencaharian. Sepanjang masing-masing pihak yang hidup bersama tersebut dapat saling tenggangrasa (toleransi) dan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan hidup dapat mencukupi, sebanyak apapun manusia yang hidup bersama tidaklah menjadi masalah, masalah menjadi lain, kalau masing-masing yang hidup mendiami daerah-daerah tersebut mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama, sementara hal yang menjadi pemenuh kebutuhan atau kepentingan tersebut terbatas adanya, mereka akan terlibat persaingan, pertikaian, bahkan harus berperang untuk memperebutkannya.

Thomas Hobbes memberikan ilustrasi sederhana mengenai hal ini, jika ada dua orang membutuhkan hal yang sama, akan tetapi hanya satu orang yang akan memperolehnya, maka mereka akan saling bermusuhan –masing-masing pihak akan mengganggu dan menindas pihak lain untuk mencapai tujuannya, yaitu kelangsungan hidupnya. Sementara itu, pihak yang tertindas akan membalasnya sebab hal itu menyangkut hidup dan mati. Maka, perang tidak dapat dihindarkan.

Menyadari bahwa hidup bersama tanpa aturan akan bisa menjadi boomerang yang memusnahkan kelangsungan hidup manusia, maka lahirlah pranata politik. Dalam berbagai literature sosiologi, terdapat berbagai istilah yang

digunakan untuk menyebut pranata politik. McIver menyebutnya sebagai “negara”, Zanden menyebutnya sebagai “perilaku politik”, sedangkan Gillin dan Gillin menyebutnya institusi politik. Apapun istilahnya, pranata yang dimaksud mempunyai dua ciri utama, yaitu: (1) mempunyai kewenangan untuk menggunakan kekuatan fisik, dan (2) mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri (self sufficient).

Berdasarkan hal tersebut, pranata politik akan menyangkut masalah negara, pemerintahan, kekuasaan, partai politik, kebijakan, dan sebagainya. Hanya perlu ditekankan, istilah negara tidak sama dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah aparatnya negara yang melaksanakan fungsi-fungsi dan kekuasaan negara. Jadi, pemerintahan hanyalah salah satu unsur negara.

Pranata politik secara umum adalah upaya atau kegiatan partai politik sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki ciri khas tersendiri dan bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dengan bekal ilmu kenegaraan atau tata Negara.

Adapun menurut para ahli tentang pranata politik adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Neuman (1986) pranata politik, adalah upaya suatu organisasi politik untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan suatu golongan terhadap golongan lain yang memiliki satu pandangan berbeda.
- b. Menurut Friedrich (1978) pranata politik adalah upaya sekelompok manusia yang terorganisir secara labil untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dengan memberikan kemanfaatan ideal dan material.
- c. Menurut Aristoteles bahwa pranata politik sebagai organisasi yang paling berdaulat yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Terdapat dua poin penting dari pengertian pranata politik oleh Aristoteles bahwa pranata politik memiliki kewenangan atas menggunakan kekuatan fisik dan pranata politik mampu (capable of) memenuhi kebutuhan sendiri (self-sufficient).
- d. Menurut Sokau (1985) pranata politik adalah usaha sekelompok warga negara yang terorganisir dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu seringkali politik kaitkan dengan kekuasaan, padahal kenyataannya

tidak lah demikian. Politik adalah seni dalam kepemimpinan, atau dapat juga adalah cara untuk menentukan sebuah kebijakan tertentu. Dalam proses pencapaian tujuan kenegaraan, pemerintah mempunyai hak untuk memakai kekuasaannya sebagai pelaksana pemerintahan. Dalam mengemban tugas kenegaraan dan pelaksanaan kepemimpinannya, pemerintah melakukan berbagai suatu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dibentuk berbagai lembaga politik yang berhubungan dengan pemerintahan yakni lembaga eksekutif, legislatif.

1. Peran Pranata Politik

Pranata politik menyangkut masalah negara, pemerintahan, kekuasaan, partai politik, kebijakan, dan sebagainya. Hanya perlu ditekankan, istilah negara tidak sama dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah aparatnya negara yang melaksanakan fungsi-fungsi dan kekuasaan negara. Jadi, pemerintahan hanyalah salah satu unsur negara.

Peranan dari partai politik, antara lain :

a. Sebagai sarana komunikasi berpolitik.

Sarana di mana dalam kegiatan politik dapat menjadi sumber komunikasi antar pemerintah dengan rakyat dalam berbangsa dan bernegara. Sarana komunikasi politik ini dapat dilakukan melalui partai politik atau lembaga swadaya masyarakat.

b. Sebagai sarana sosialisasi berpolitik.

Sarana di mana dalam berpolitik dapat dilakukan sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik. Proses sosialisasi berpolitik diartikan sebagai proses bagi seseorang atau kelompok masyarakat untuk lebih mengenal, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh sarana sosialisasi pranata politik adalah organisasi profesi, keagamaan, lembaga pendidikan, dan keluarga.

c. Sebagai sarana rekrutmen politik.

Sarana di mana bidang politik dilakukan rekrutmen atau pengaderan yang dapat mencetak calon-calon pemimpin di masa depan. Peran ini dapat dilihat dari usahanya dalam membina sekelompok orang atau masyarakat yang berpotensi untuk menjadi kader anggota organisasi politik, dan organisasi masyarakat lainnya.

d. Sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat.

Sarana di mana dalam kegiatan politik dilakukan pemeliharaan ketertiban yang dijalankan dengan tidak memakai kekerasan dan merupakan pemaksa hukum dan dapat menyelesaikan konflik-konflik pada masyarakat dengan adil. Konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat memiliki dua muatan yaitu konflik fungsional (yang mengarah pada hal yang baik) dan konflik disfungsional (buruk) bagi suatu system.

2. Ciri-ciri Pranata Politik

Pranata politik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:

a. Adanya asosiasi politik yang dinamakan pemerintah yang aktif.

Maksudnya disini adalah bahwa dalam kegiatan politik terdapat perkumpulan yang memang tertuju pada kegiatan politik dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang berlandaskan pada demokrasi Pancasila.

b. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup secara bersama-sama atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama.

Maksudnya disini adalah bahwa dalam kegiatan politik, dalam rangka untuk menyelenggarakan kegiatan politik yang bebas dan aktif maka dibentuklah suatu kelompok atau komunitas sehingga kegiatan politik dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan cita-cita awal bangsa Indonesia merdeka.

c. Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama (umum), maksudnya disini adalah bahwa dalam kegiatan politik pemerintah wajib melaksanakan hak rakyat, karena demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka oleh

- karena itu untuk menjunjung tinggi demokrasi pemerintah wajib melaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan kedaulatan rakyat.
- d. Pemerintah diberi kewenangan untuk memonopoli penggunaan atau ancaman fisik. Maksudnya disini adalah bahwa dalam kegiatan politik pemerintah diberi kewenangan untuk memelihara ketertiban dan juga mencegah serangan dari luar negeri. Pemerintah juga memiliki hak prerogatif untuk memerintahkan TNI dan Polri untuk mengamankan negara dan ketertiban jika sewaktu-waktu ada serangan dari luar negeri dan juga adanya kejahatan yang mengancam pemimpin negara.
 - e. Pemerintah memiliki kewenangan tersebut hanya pada wilayah tertentu. Maksudnya disini adalah bahwa dalam kegiatan politik pemerintah memiliki kewenangan yang hanya pada wilayah tertentu, tentunya pemerintah memiliki maksud tertentu untuk meningkatkan pendapatan negara, mengamankan negara dari pihak luar.
3. Bentuk-bentuk Pranata Politik

Dalam mengemban tugas kenegaraan dan pelaksanaan kepemimpinannya, pemerintah melakukan berbagai suatu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dibentuk berbagai lembaga politik yang berhubungan dengan pemerintahan yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bentuk pranata politik terdiri dari bentuk suprastruktur dan infrastruktur politik.

Bentuk suprastruktur pranata politik dalam suatu negara secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Lembaga eksekutif

Lembaga ini merupakan lembaga yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden atau perdana menteri. Kekuasaan eksekutif menurut Soerjono Soekanto adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma hukum melalui wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan (dipimpin oleh presiden dan menteri-menteri), baik di tingkat pusat maupun daerah. Kekuasaan eksekutif ini melalui aparat-aparatnya, seperti polisi, hakim, jaksa, ABRI, pegawai negeri, dan lain-lain berperan sebagai penegak norma-norma hukum

dalam usaha pengendalian sosial warga masyarakat yang berperilaku menyimpang. Peranan kekuasaan eksekutif beserta lembaga dan aparat-aparatnya sebagai pranata politik sangat menentukan terhadap maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa, dan Negara.

b. Lembaga Yudikatif

Lembaga ini merupakan lembaga yang mengatur pelanggaran Undang-Undang yang ditangani oleh MA dan pengadilan dibawahnya. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga Mahkamah Agung (MA). Lembaga ini berperan sebagai alat pengendali sosial, yang pelaksanaannya dilakukan terhadap lembaga kekuasaan eksekutif. Lembaga ini mempunyai wewenang untuk menegur, menasihati, atau memberisaran-saran kepada pemerintah dalam kaitan pelaksanaan GBHN dan undang-undang hasil produk lembaga legislatif. Lembaga yudikatif ini bersifat independen, artinya kekuasaannya tidak dibatasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, tetapi dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari semua norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat/negara Indonesia.

c. Lembaga legislatif

Lembaga ini merupakan lembaga yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang yang dipegang oleh DPR dan MPR. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk membuat norma-norma (undang-undang) melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik DPR tingkat pusat maupun tingkat daerah. Para anggota DPR ini dipilih warga masyarakat secara demokratis melalui pemilihan umum.

Dengan adanya lembaga kekuasaan legislatif yang lebih tinggi kedudukannya dari lembaga kekuasaan eksekutif, menyebabkan kekuasaan eksekutif dapat dibatasi, terutama dalam masyarakat/negara yang menganut sistem politik (pemerintahan) demokrasi presidensial, seperti yang dianut di negara kita, bahwa pemerintah (presiden) bertanggung jawab terhadap DPR (parlemen). Sebaliknya dengan penyerahan tanggung jawab pelaksanaan GBHN dan undang-undang buatan DPR kepada lembaga eksekutif, berarti kekuasaan lembaga legislatif juga dibatasi karena tidak mempunyai wewenang

untuk melaksanakan pemerintahan atas dasar GBHN dan undang-undang yang dibuatnya tersebut. Jadi, jelaslah bahwa sekalipun kedudukan lembaga legislatif lebih tinggi dari lembaga eksekutif, tetapi tetap terbatas kekuasaannya dalam masyarakat, yakni hanya sebagai pembuat dan bukan pelaksana.

Sedangkan bentuk infrastruktur pranata politik adalah:

Partai politik, yaitu suatu lembaga yang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga control terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
2. Sebagai kekuatan penyeimbang kehidupan Negara
3. Sebagai lembaga tempat menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Fungsi Pranata Politik

Dengan adanya pranata politik tentunya mempunyai suatu tujuan, lalu apa sajakah tujuan dari pranata politik tersebut? dan bagaimanakah contohnya?, Berikut beberapa fungsi dan contoh dari pranata politik :

1. Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang

Presiden yang menjadi representasi dalam suatu negara mempunyai tugas untuk mengajukan rancangan suatu perundang-undangan (RUU) yang selanjutnya akan diajukan ke dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk selanjutnya dilakukan legislative.

Prosesi pembuatan undang-undang negara memperlihatkan peranan lembaga politik yang mengesahkan peraturan/ norma melalui undang-undang. Norma hukum yang sudah disahkan oleh undang-undang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas.

2. Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui

Pemerintah diharapkan bisa melaksanakan amanat undang-undang yang sudah disepakati oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam berbagai aspek undang-undang. Jadi, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang tersebut dengan cara mensosialisasikan undang-undang.

Sehingga pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi suatu undang-undang dan tentunya juga memberikan sanksi pada masyarakat yang

sudah melanggar undang-undang dan tentunya hukuman tersebut juga sudah diatur oleh undang-undang.

3. Menyelesaikan Konflik

Dalam kehidupan sosial tentunya manusia akan berhadapan dengan namanya sebuah konflik, baik konflik yang ringan maupun berat. Oleh karena itulah norma hukum ini diadakan supaya bisa mengatur masyarakat agar menjadi lebih rukun lagi dalam bermasyarakat.

4. Menyelenggarakan Pelayanan Umum

Demi untuk mencapai visi dan misi bangsa serta negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur maka banyak sekali hal yang harus dijalani. Salah satunya melakukan sebuah pembangunan diseluruh lapisan masyarakat, misalnya dengan meningkatkan layanan umum seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, angkutan umum, jalan raya, rekreasi dan lain lain.

5. Melindungi Warga Negara

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari dalam maupun negara asing, oleh sebab itu dalam perwujudanya maka didirikanlah sebuah sistem ketahanan dan keamanan rakyat semesta atau lebih sering disebut dengan HANKAMRATA. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bangsa Indonesia bisa terhidar dari serangan luar.

6. Mengusahakan kesejahteraan umum, artinya pranata politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat. Misalnya pengadaan bahan bakar, bahan makanan pokok, dan sebagainya.

7. Mengatur proses politik, artinya pranata politik mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan agar tidak mengancam keutuhan masyarakat. Misalnya pelaksanaan pemilu, pemilihan kepala daerah, dan sebagainya.

Dalam pranata politik terdapat struktur kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, pranata politik juga mempunyai fungsi tersembunyi sebagai salah satu kriteria untuk membuat stratifikasi

sosial. Setiap penguasa yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakat, demi stabilnya masyarakat, akan berusaha untuk mempertahankannya. Dengan adanya struktur kekuasaan dan kemungkinan-kemungkinan naik-turunnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain yang lebih tinggi atau rendah, pranata politik juga berfungsi tersembunyi sebagai saluran mobilitas sosial.

Pranata politik sebagai bagian dari pranata sosial, yaitu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur hubungan kekuasaan warga masyarakat sehingga keteraturan sosial tetap terpelihara dalam masyarakat. Pranata politik beserta lembaga-lembaga dan aparat-aparatnya kemunculannya menyertai dan mewarnai kehidupan warga masyarakat dalam melakukan hubungan-hubungan sosial dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pranata politik ini muncul karena adanya kepentingan dan tujuan warga masyarakat itu untuk mengatur, menertibkan, dan membangun warga masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya pembagian, pembatasan kekuasaan pada warga masyarakatnya agar antarwarga masyarakat itu tidak saling tindas, saling berkuasa, atau saling mengganggu, tetapi perlu kerja sama, saling membantu, dan saling melengkapi dalam memajukan kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam masyarakat/negara ada pembagian kekuasaan, yang terdiri atas: a. kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksana undang-undang), b. kekuasaan legislatif (kekuasaan pembuat undang-undang), dan c. kekuasaan yudikatif (kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang). Ketiga sistem pembagian kekuasaan ini disebut trias politika, yang dipelopori oleh seorang filsuf Yunani Kuno, Montesquieu.



Bab 6

Gender dan Kajian Tentang Perempuan

A. Pengertian Gender

Kata gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993: 4). Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed), 1989: 3).

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34). Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan

perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai, perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.

1. Kecenderungan Gender Terhadap Perempuan

Pada dasarnya, kesetaraan gender itu untuk laki-laki dan perempuan. Hanya saja kaum laki-laki lebih unggul dalam proses pengambilan keputusan, posisi penting dalam politik, pemerintahan maupun dalam keluarga.

2. Sifat, Peran, dan Ranah Berdasarkan Gender

Sifat gender adalah sifat dan perilaku yang diharapkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai, budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu.

Peran gender adalah apa yang harus, pantas dan tidak pantas dilakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai, budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu. Misalnya, laki-laki bekerja untuk mencari nafkah, pemimpin, direktur, presiden, sedangkan perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga (memasak, mencuci dan mengasuh anak), guru, perawat, sekretaris dan sejenisnya.

Ranah gender adalah ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan perannya. Ranah ini membedakan ranah domestik dan publik. Ranah domestik adalah wilayah keluarga misalnya dapur, sumur dan kasur, sedangkan wilayah publik adalah wilayah umum dimana pekerjaan produktif dan ekonomis seperti bekerja di kantor, pasar, mall, dan lainlain.

3. Pengertian dari Kesetaraan Gender

Untuk lebih memberikan pemahaman akan makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini sering juga disebut dengan istilah kesetaraan gender, maka menurut Rianingsih Djohani (1996:7) bahwa yang dimaksud dengan gender adalah : pembagian peran, kedudukan dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat”.

Contoh:

1. Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap tidak pantas;
2. Tugas utama laki-laki mengelola kebun, tugas perempuan hanya membantu;
3. Menjadi pemimpin masyarakat (lembaga adat, kepala desa, dsb) lebih pantas oleh laki-laki;
4. Kegiatan PKK dan program kesehatan keluarga, lebih pantas oleh perempuan.

Gender memiliki perbedaan bentuk antara satu masyarakat dengan masyarakat lain karena norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda.

Misalnya :

1. Pekerjaan rumah tangga di hampir semua masyarakat manapun dilakukan oleh perempuan; sedangkan di masyarakat perkotaan, mulai dianggap lumrah laki-laki dan perempuan membagi tugas rumah tangga karena perempuan juga bekerja mencari nafkah keluarga;
2. Menjadi tukang batu dianggap tidak pantas dilakukan oleh perempuan, tetapi di Bali perempuan biasa menjadi tukang batu;
3. Di kebanyakan masyarakat petani, bekerja kebun adalah tugas laki-laki, sedangkan di sejumlah masyarakat Irian, kerja kebun merupakan tugas utama perempuan, karena berburu adalah tugas utama laki-laki.

Gender berubah dari waktu ke waktu karena adanya perkembangan yang memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat tersebut. Misalnya :

1. Di Jawa Barat, sudah ada perempuan yang menjadi kepala desa karena meningkatnya pendidikan;
2. Di Sumba, laki-laki mulai membantu-bantu tugas perempuan di rumah tangga;
3. Di Indonesia, sekarang sudah mulai banyak perempuan menjadi dokter, insiyur, dan pengusaha.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan lebih menunjukkan pada pembagian tugas yang seimbang dan adil dari laki-laki dan perempuan. Adanya ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketidakadilan yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dan kehidupan sosial. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Atau dapat pula diartikan bahwa “kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki” (UN Women). Kesetaraan gender dapat juga diartikan sebagai upaya memberikan kerangka hukum bagi perempuan di lingkungan pekerjaan serta memberantas praktek diskriminasi terhadap perempuan.

4. Pentingnya Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang kesehatan misalnya, WHO (2010) menyatakan bahwa “Tidak ada seorangpun yang berhak sakit atau meninggal karena ketimpangan

gender”. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian akses bagi laki-laki maupun perempuan dalam pemberian layanan kesehatan. Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan untuk melihat bagaimana perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih berada pada angka 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (www.bps.go.id).

Selain itu juga jumlah perempuan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan dan melahirkan di fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat ketimpangan akses perempuan dan laki-laki dalam bidang kesehatan.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagaimana dinyatakan McKinsey and Company (2015), jika perempuan dan laki-laki memainkan peran yang sama dalam pasar tenaga kerja, maka pada tahun 2025 GDP global tahunan akan bertambah sebesar \$28triliun atau meningkat 26 persen.

5. Tujuan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat atau semua orang yang baik perempuan dan juga laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dengan masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu.

6. Pentingnya Kesetaraan Gender Pada Suatu Negara

Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan tetapi juga sangat penting dan relevan dari segi ekonomi. Tujuan 5 SD tentang mencapai

kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memiliki 5 target yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan
3. Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan
4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan
5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan juga ekonomi.

7. Ukuran Kesetaraan Gender Pada Indeks

1) IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek uruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

2) IPG (Indeks Pembangunan Gender)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan juga perempuan.

3) IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi serta juga kehidupan politiknya.

8. Keterkaitan Antara Kesetaraan Gender Dengan Pembangunan Manusia

1) Pembangunan Manusia Dan Pembangunan Gender Berjalan Searah

Selain meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara umum, kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga menjadi fokus pembangunan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap berbagai hal seperti kesehatan

pendidikan dan perekonomian. Pembangunan manusia dan pembangunan gender menjadi target pembangunan baik di tingkat nasional maupun global.

IPM dan IPG menjadi indikator dalam melihat capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender titik suatu daerah diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan kualitas hidup manusia namun juga mengurangi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, idealnya nya daerah dengan IPM yang tinggi akan mendorong pada pembangunan gender yang lebih baik.

2) Peningkatan Kualitas Perempuan Berdampak Pada Pemberdayaan

Pemberdayaan gender erat kaitannya dengan pembangunan gender. Pemberdayaan gender terjadi ketika perbaikan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi berhasil mendorong terwujudnya pemberdayaan (Cinar, 2018). Idealnya, peningkatan pembangunan gender akan menciptakan keseimbangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan.

Selama ini, perempuan cenderung Tertinggal di berbagai peran seperti ekonomi Tenaga Kerja dan pengambilan keputusan yang disebabkan oleh mengakarnya budaya patriarki. Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki Sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan Property.

Seiring dengan meningkatnya kualitas kemampuan perempuan antarwaktu, yang ditandai dengan peningkatan peningkatan IPG, pemberdayaan yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan diharapkan dapat terwujud.

9. Undang-undang Mengenai Kesetaraan Gender

Pada tahun 1967 perserikatan bangsa-bangsa telah mengeluarkan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut.

Pada tanggal 18 desember Tahun 1979 majelis umum perserikatan bangsa-bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945,

maka pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi sedunia dasawarsa perserikatan bangsa-bangsa bagi wanita di Copenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah wah Anda tangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 desember 1979 pada waktu majelis umum perserikatan bangsa-bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha usaha internasional dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam konvensi ini tidak akan memengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

10. Kesetaraan Sebagai Sebuah Tujuan

1) Meningkatkan Kualitas Perempuan Dalam Bidang

Pembangunan

Berdasarkan data statistik penduduk jumlah perempuan di Indonesia sebanyak 50,3% dari total penduduk titik hal ini berarti di Indonesia jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki titik dengan jumlah perempuan yang demikian besar maka potensi perempuan perlu di lebih diberdayakan sebagai subjek maupun objek pembangunan bangsa. Peranan strategis perempuan dalam menyukseskan pembangunan bangsa dapat dilakukan melalui :

- a. Peranan perempuan dalam keluarga, perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa.
 - b. Peranan perempuan dalam pendidikan, jumlah perempuan yang demikian besar merupakan aset dan problematika di bidang Ketenagakerjaan. Dengan mengelola potensi perempuan melalui bidang pendidikan dan pelatihan maka tenaga kerja perempuan akan semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa.
 - c. Peranan perempuan dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Di sektor ini perempuan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui berbagai jalur baik kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik.
 - d. Peranan perempuan dalam bidang pelestarian lingkungan, kerusakan lingkungan yang semakin parah karena proses industrialisasi maupun pembalakan liar perlu proses reboisasi dan perawatan lingkungan secara intensif. Dalam hal ini para perempuan lah yang memiliki potensi yang besar untuk berperan serta dalam penataan dan pelestarian lingkungan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Perempuan Dalam Bidang Politik

Hingga saat ini hanya ada sekitar 18% anggota parlemen perempuan di seluruh dunia dan ini hampir sama dengan yang ada di negara kita. Secara kuantitatif, jumlah perempuan di Indonesia hampir seimbang dengan jumlah laki-laki. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk badan perencanaan pembangunan nasional, Badan Pusat Statistik mengatakan jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 131, 88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Meski jumlahnya hampir setara, namun sampai saat ini masih ada kesenjangan gender dan kurang terpenuhinya hak bagi perempuan dan anak perempuan. Hal ini juga tidak serta merta menjamin perempuan memiliki peran dan posisi yang sama dengan lakilaki.

Dan dengan kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik. Upaya tersebut antara lain tercermin melalui lahirnya undang-undang partai politik, undang-undang tentang pemilu yang didalamnya memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendirian, dalam kepengurusan partai politik dan dalam pengajuan sebagai calon anggota legislatif dimana hal ini merupakan langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan. Munculnya undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan dan proses politik baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih.

11. Pembangunan Gender Di Indonesia : Meningkatkan Tapi Lambat

Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, tidak merinci menurut jenis kelamin. Oleh sebab itu, IPM masih belum menjelaskan disparitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang rinci menurut gender, UNDP merumuskan sebuah metode penghitungan indeks pembangunan gender (IPG). Seiring dengan penggunaan metode baru di perhitungan IPM pada tahun 2010, terjadi perubahan penghitungan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan data Human Development Report (HDR), pada tahun 2017 nilai IPG dunia berada di tingkat 94,2 poin. Dengan nilai IPG yang berada di bawah 100, dapat disimpulkan bahwa secara global pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan pembangunan perempuan. Nilai IPG tertinggi dicapai oleh Latvia dengan nilai sebesar (102,97), sedangkan terendah dicapai oleh Yaman dengan nilai sebesar (42,54). Latvia adalah satu dari enam negara di dunia yang sepenuhnya menjamin kesetaraan hukum antara perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan dan bisnis. Sedangkan hal ini berkebalikan dengan keadaan perempuan di Yaman.

Budaya di negara ini membatasi peran wanita dalam berbagai hal, termasuk dalam pendidikan dan pekerjaan.

Indonesia sendiri nilai IPG-nya sebesar (93,22) poin, masih berada di bawah rata-rata nilai dunia (94,12). Dengan nilai IPG yang sebesar (93,22) poin ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar.

Pada level ASEAN angka IPG di Indonesia sendiri berada di peringkat ke-9 dari sepuluh negara dan termasuk satu dari tiga negara ASEAN dengan nilai IPG di bawah rata-rata dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan pembangunan perempuan dan laki-laki di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya, bahkan masih jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya, bahkan masih jauh dibawah Malaysia (97,55) dan Singapura (98,20) yang posisinya sangat berdekatan dengan negara Indonesia. Negara dengan IPG tertinggi di ASEAN adalah Vietnam dengan nilai sebesar (100,53) dan terendah adalah Kamboja dengan nilai sebesar (91,44), sedangkan yang nilainya mendekati 100 adalah Thailand (99,61) dan Filipina (100,03).

Salah satu hal yang memengaruhi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adalah dalam hal ekonomi yang salah satunya adalah dalam hal perbedaan pendapatan yang diterima. Komponen penyusun IPM yang merefleksikan keadaan perekonomian diwakili oleh PNB perkapita. Pada level ASEAN, nilai PNB perkapita tertinggi dicapai oleh Singapura baik untuk PNB perkapita laki-laki maupun PNB perempuan, sedangkan PNB perkapita terendah dicapai oleh Kamboja, baik PNB perkapita laki-laki maupun PNB perkapita perempuan, sedangkan PNB perkapita perempuan. Indonesia menduduki peringkat ke lima untuk PNB perkapita laki-laki dan peringkat ke enam untuk PNB perkapita perempuan, dengan masing-masing bernilai 14.385 (2011 ppp \$) dan 7.259 (2011 ppp \$).

Nilai PNB Indonesia berada di bawah rata-rata global baik untuk laki-laki maupun perempuan, dimana PNB rata-rata dunia adalah 19.525 (2011 ppp \$) untuk laki-laki dan 10.986 (2011 ppp \$) untuk perempuan.

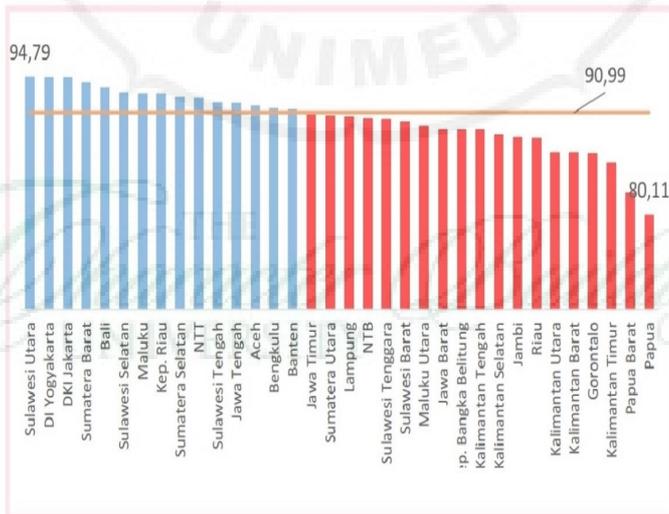
Kesenjangan pencapaian dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari perbedaan pendapatan laki-laki dan perempuan. Kesenjangan tersebut dapat dilihat melalui rasio PNB perkapita antara laki-laki dan perempuan. Jika rasio PNB mendekati angka 1, maka kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dari sisi ekonomi semakin kecil begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data dari HDR, Ratarata rasio PNB perempuan dan PNB laki-laki berada di angka (0,56) yang

menunjukkan bahwa kesenjangan antara pendapatan perempuan dan laki-laki di tingkat global masih cukup besar.

Rasio PNB antara perempuan dengan laki-laki di Indonesia adalah sebesar (0,51) terpaut (0,06) di bawah rata-rata dunia. Nilai rasio PNB yang masih jauh di bawah satu juga menunjukkan bahwa kesenjangan antara pendapatan perempuan dan laki-laki di Indonesia masih cukup besar, dimana pendapatan laki-laki jauh di atas perempuan. Pada level ASEAN rasio PNB Indonesia bahkan menduduki urutan ke sepuluh (terakhir), terpaut (0,33) poin di bandingkan Vietnam yang jauh berada di urutan pertama dengan rasio PNB sebesar (0,84) poin.

12. Ketimpangan Pembangunan Gender Antarwilayah

Pada kasus Indonesia, perbandingan pembangunan di wilayah timur (KTI) dan barat (KBI) memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi potensi wilayah, sumber daya manusia, infrastruktur, budaya, dan berbagai karakteristik lainnya, dimana wilayah Barat lebih maju dibandingkan wilayah Timur.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 6.1: Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi 2018

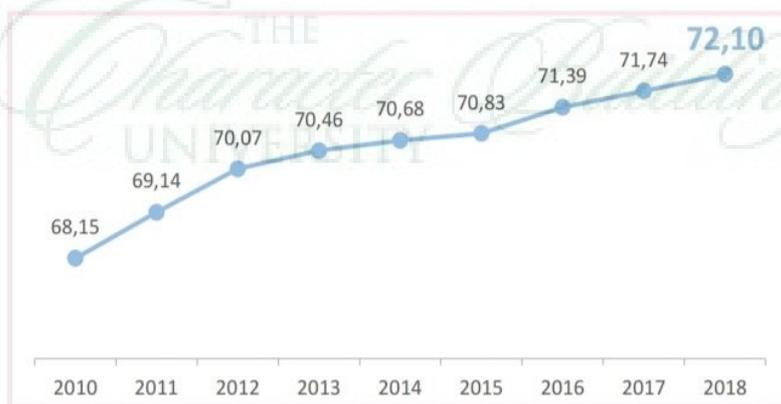
Terjadi ketimpangan pembangunan yang berbeda antara wilayah bagian timur (KTI) dan barat (KBI). Dari data di atas terdapat bahwa provinsi Sulawesi Utara menempati posisi terbesar yaitu (94,79) sedangkan IPG terendah dicapai provinsi Papua dengan nilai IPG sebesar (80,11).

Dari data di atas timbul pertanyaan mengapa wilayah barat lebih maju di bandingkan wilayah timur? Jadi, ketimpangan yang terjadi antara dua wilayah ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah akses pembangunan di wilayah timur yang relatif lebih sulit untuk dijangkau dan masih terkonsentrasinya ke sumber daya manusia yang berkualitas di daerah barat. Di satu sisi daerah KTI (timur) sebenarnya sangat kaya akan sumber daya alam, tetapi kondisi ini belum ditinjau dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencukupi sehingga sumber daya alam yang ada belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

13. Kondisi Pemberdayaan Gender Di Indonesia

Dalam menilai sudah sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, di gunakan sebuah indeks komposit, yaitu indeks pemberdayaan gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi, indikator ini merupakan adopsi dari gender empowerment measure (GEM) yang disusun oleh UNDP.

14. Data Perkembangan indeks pemberdayaan gender (IDG), 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemberdayaan gender di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2018, IDG Indonesia berada pada level (72,10). Meningkat (0,36) poin atau tumbuh 0,50 % dibandingkan tahun 2017.

15. Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2017 dan 2018, 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data di atas peningkatan IDG tahun 2018 terutama terjadi karena kenaikan dua komponen yakni persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional meningkat dari 46,31 pada tahun 2017, menjadi 47,02 pada tahun 2018. Sedangkan sumbangan pendapatan perempuan meningkat dari 36,62 menjadi 36,70. Pertumbuhan IDG pada periode tahun 2017-2018 cenderung lambat dibandingkan dengan pertumbuhan selama 8 tahun terakhir. Meski demikian, capaian ini tetap menjadi sinyal positif adanya perbaikan keadaan pemberdayaan gender di Indonesia.

B. Kajian Tentang Perempuan

1. Gerakan Feminisme

Secara etimologis istilah feminisme berasal dari Bahasa latin yaitu femina yang berarti perempuan. Kata tersebut mengadopsi dan digunakan oleh berbagai Bahasa didunia. Dalam Bahasa Perancis kata femme digunakan untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial (gender) dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male (laki-laki) dan female (perempuan) dalam arti biologis yang berarti sex/jenis kelamin. Dalam hal ini istilah feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial kaum femininis.

Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi karena setiap gerakan feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan, namun jika dilihat secara umum, feminisme menurut KBBI adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.

Feminisme menyangkut bagaimana memosisikan subjek perempuan di dalam masyarakat. Selama ini perempuan telah diposisikan inferior di dalam masyarakat. Perempuan dianggap sebagai *The Other* yang relasinya selalu menunggu untuk didefinisi dan dimaknai. Identitas perempuan selalu dilekatkan oleh konstruksi sosial, begitu pula di dalam konsep modern, perempuan selalu menjadi subjek yang berlawanan dengan subjek laki-laki. Asumsi perempuan sebagai *the other* ditunjukkan ketika perempuan dianggap tidak berasio dan dibatasi aksesnya terhadap hak politik di ruang public. Hal ini menyebabkan dibentuknya gerakan perempuan untuk kesetaraan hak politik, perempuan, dan ekonomi. Di sini pula dimulainya penyebaran kesadaran pembebasan perempuan.

2. Gelombang Feminisme

Gelombang feminisme dapat dilacak perjalanannya dengan faktor kelahirannya dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Lahirnya gerakan feminisme tidak lepas dari tingkat pendidikan, kesadaran, kelas sosial, sosio kultural, dan sebagainya. Lahirnya gerakan feminisme berasal dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasikan, tidak hanya itu gerakan ini muncul karena dalam sistem

masyarakat patriarki, kaum laki-laki mendominasi di berbagai aspek dan adanya pensubordinasian perlakuan, perlakuan seperti ini yang menimbulkan perempuan berkumpul dan membuat aksi sehingga melahirkan gerakan feminisme.

Feminisme secara global terbagi atas tiga tahap, yaitu feminisme gelombang pertama (*first wave feminisme*) dari abad 18 sampai ke pra tahun 1960, feminisme gelombang kedua (*second wave feminisme*) adalah tahun 1960 dan feminisme gelombang ketiga atau yang disebut dengan *postfeminisme*.

Gerakan feminisme pada gelombang pertama dimulai dengan karya Mary Wollstonecraft yang berjudul *Vindication of the Rights of Woman* yang merupakan karya pertama yang secara terang-terangan berteriak kepada perempuan-perempuan kelas menengah, khususnya para ibu, sebagai kelas yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Di situ dia menekankan perlunya membuat perempuan berfikir rasional, hingga nalar perempuan menjadi lebih terdidik. Ia tidak mempertimbangkan hilangnya peran perempuan di wilayah domestik, dan tuntutannya yang paling radikal adalah hak pilih. Ia menginginkan perempuan mempersiapkan diri agar bisa mandiri dalam segi ekonomi, memberikan kebebasan dan martabatnya, bukan mengandalkan kemampuan dalam memikat suami yang mapan.

Secara umum, tahun 1850-an memperlihatkan kebangkitan aktivitas feminis, dan menjadi decade paling penting pada abad ke-19 bagi perempuan era Victoria. Sebuah kasus oleh Caroline Norton, membantu meningkatkan perhatian yang memang sudah lama diberikan terhadap kedudukan sah seorang perempuan yang sudah menikah. Sementara itu, perkembangan jumlah perempuan lajang kelas menengah yang mencari kemandirian ekonomi sebagai alternatif dari pernikahan memunculkan perhatian terhadap pilihan pekerjaan mereka yang terbatas.

Gerakan feminisme dalam bidang pendidikan terlihat pada tahun 1860-an dan 1870-an melalui usaha-usaha Emily Davies (1830-1922) dengan mendirikan sekolah perempuan di Hitchin pada tahun 1869 yang terletak di jalan menuju Cambridge. Kemudian menyusul Universitas Girton (1873) dan Newnham (1875) di Cambridge, dan Universitas Lady Margaret Hall (1878) dan Universitas Somerville (1879) di Oxford. Sekolah medis London School of Medicine for Women (sekolah Farmasi London untuk perempuan) didirikan pada tahun 1874 oleh Sophia Jex-Blake.

Dalam menggerakkan roda feminisme pada gelombang pertama, pencapaian penting yang lain bagi perempuan adalah kesempatan yang baru dalam pekerjaan umum dan administrasi. Pekerjaan dalam bidang administrasi merupakan perluasan area yang penting pada tahun 1860-an, khususnya dalam pemerintahan seperti kantor pos, dewan sekolah dan hukum. Prestasi gerakan feminisme yang lain adalah tentang hak pilih yang diperolehnya pada tahun 1918, namun pada saat itu, hak pilih ini hanya berlaku bagi perempuan yang berusia di atas tiga puluh tahun. Barulah pada tahun 1928 perempuan mempunyai hak pilih yang sama seperti laki-laki.

Setelah beberapa tahun lamanya feminisme sempat tenggelam, gerakan feminisme pada gelombang dua dimulai dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963 di Amerika Serikat. Buku ini ternyata berdampak luas, lebih-lebih setelah Betty Friedan membantuk organisasi wanita bernama *National Organization for Woman (NOW)* pada tahun 1966 gemanya kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundangan, tulisan Betty Friedan berhasil mendorong dikeluarkannya *Equal Pay Right (1963)* sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan *Equal Right Act (1964)* dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang.

Di tahun 1967 gerakan feminisme membentuk *Student for a Democratic Society (SDS)* yang mengadakan konvensi nasional di Ann Arbor kemudian dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama, dari sinilah mulai muncul kelompok feminisme radikal dengan membentuk *Women's Liberation Workshop* yang lebih dikenal dengan singkatan *Women's Lib*. *Women's Lib* mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki dalam masyarakat kapitalis terutama di Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan yang dijajah dan penjajah. Di tahun 1968 kelompok ini secara terbuka memprotes diadakannya *Miss America Pageant* di Atlantic City yang mereka anggap sebagai pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi tubuh perempuan. Gema pembebasan kaum perempuan ini kemudian mendapat sambutan di mana-mana di seluruh dunia.

Pada tahun 1970 Juliet Mitchel mengatakan, di Universitas Ruskin kaum feminis merasa mempunyai satu tujuan dan sepaham tentang feminisme yaitu "Pembebasan Perempuan". Ada empat tujuan yang dirumuskan dalam pertemuan tersebut yaitu: kesetaraan gaji, kesetaraan pendidikan dan

kesempatan kerja, 24 jam perawatan anak, serta kontrasepsi dan aborsi gratis sesuai tuntutan.

Menurut Juliet Mitchel, di Amerika pada tahun 1971, The Black Movement (Gerakan Kulit Hitam) mungkin menjadi inspirasi terbesar bagi Women's Liberation. Lebih-lebih perempuan kulit hitam yang dikecewakan oleh gerakan seksisme The Black Movement pada tahun 1960-an, aktif dalam pembentukan kelompok feminisme radikal yang pertama. Pada tahun 1969, Caestine Ware, mendirikan feminisme radikal yang pertama. Pada tahun 1969, Caestine Ware, mendirikan feminisme radikal New York bersama dengan Shulamith Firestone dan Anne Koedt. Pada tahun 1970 A Historical and Critical Essay for Black Women (Sebuah Esai Histori dan Kritis untuk perempuan Kulit Hitam) yang ditulis oleh Patricia Haden, Donna Middleton dan Patricia Robinson. Lesline Tanner menulis dengan judul Voices from Women's Liberation.

Pada tahun yang sama, pemikiran Frances Beale Double Jeopardy diterbitkan dalam buku Morgan Sisterhood is Powerfull. Buku ini mendeskripsikan tentang beban ganda mengenai ras dan gender yang dihadapi perempuan. Beale membedakan apa yang disebut sebagai perjuangan hidup mati untuk emansipasi total dan gerakan pembebasan perempuan kulit putih yang merupakan kelas menengah.

Kedudukan perempuan kaum lesbian pada tahun 1970-an menjadi salah satu yang juga diperjuangkan. Seperti perempuan kulit hitam, perempuan lesbi juga aktif dalam gerakan feminisme radikal sejak awal gerakannya. Para feminis radikal menengarai adanya aspek patologis (abnormal) pada label lesbian dalam kebijakan seksual seluruh perempuan. Dalam The Woman Identified Woman, kelompok radikal lesbian menyatakan bahwa seorang lesbian merupakan wujud kemarahan perempuan yang memuncak hingga titik leddak. Sering dimulai pada usia yang sangat muda, seorang lesbian bertindak sesuai dengan dorongan alaminya untuk menjadi manusia yang lebih utuh dan lebih bebas daripada masyarakatnya, mestinya mereka diberi kebebasan untuk itu.

Pada feminisme gelombang kedua ini banyak tokoh yang muncul menyampaikan pendapatnya dalam berbagai media, salah satunya adalah media tulisan. Media ini sebagai bentuk ekspresi bagi mereka dalam menyoroti kedudukan perempuan di dalam masyarakat yang cenderung masih dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Di Prancis muncul istilah *l'écriture féminine* yang merupakan dari feminisme kontemporer dan salah

satu tokoh perempuan yang turut memelopori *l'écriture féminine* di Prancis adalah Simone de Beauvoir, dengan karyanya yang berjudul *Le Deuxième Sexe*. Karya ini menandai pembaharuan dalam perkembangan feminisme di Prancis pada pertengahan abad kedua puluh, yang didukung juga oleh munculnya gerak-gerakan feminisme di berbagai belahan Eropa, termasuk Perancis pada tahun 1960-an dan revolusi seksual yang terjadi di negara-negara Barat.

Gerakan feminisme gelombang dua ini banyak membahas persoalan perempuan seperti kondisi inferioritas dan ketertindasan perempuan di tengah masyarakat. Hal ini mengenai seksualitas dan kebebasan perempuan atas tubuhnya juga banyak dibahas dalam gelombang ini karena berkaitan dengan dominasi laki-laki atas perempuan.

Berbagai kritik terhadap universalisme dalam feminisme gelombang kedua mendorong terjadinya pendefinisian kembali berbagai konsep dalam feminisme pada akhir tahun 1980an. Menurut Brooks (1997: 8), setidaknya ada tiga hal yang mendorong terjadinya reartikulasi konsep-konsep feminisme. Pertama, dari dalam feminisme sendiri yang mulai melihat bahwa konsep mereka bersifat rasis dan etnosentris yang hanya mewakili perempuan kulit putih kelas menengah dan memarginalkan perempuan dari kelompok etnis dan kelas lainnya. Kedua, feminis gelombang dianggap belum cukup menyuarakan isu "sexual difference". Sementara itu, di luar feminisme berkembang teori-teori postmodernisme, poststrukturalisme dan postkolonialisme yang kemudian beririsan dengan perkembangan feminisme.

Dikotomi antara feminisme gelombang ketiga dan postfeminisme dalam perkembangan feminisme pasca gelombang kedua merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dialami mengenai penamaan perkembangan feminisme pasca 1970an. Jika keduanya dianggap sebagai perkembangan feminisme yang berbeda, maka keduanya merupakan perkembangan yang berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan. Jika keduanya dianggap perkembangan yang sama, ada usaha-usaha definitive dari beberapa feminis yang mendefinisikan diri mereka sebagai feminis gelombang ketiga dan atau sebaliknya postfeminist. Lebih jauh, kedua istilah tidak hanya sering dimaknai secara bertentangan, keduanya juga memiliki banyak definisi yang terkadang saling tumpang tindih dan saling bertentangan.

Gamble (2006) melihat feminisme gelombang ketiga sebagai reaksi perempuan kulit berwarna terhadap dominasi perempuan kulit putih dalam

feminisme gelombang kedua dan menolak asumsi bahwa penindasan terhadap perempuan bersifat seragam dan universal. Lebih jauh, feminisme gelombang ketiga juga terlibat berbagai aktivitas turun ke jalan. Gamble menyerukan penggunaan istilah feminisme gelombang ketiga dan menolak penggunaan istilah postfeminisme karena implikasi negatif yang melekat pada makna postfeminisme.

Tong (2009) mendefinisikan feminisme gelombang ketiga sebagai perkembangan feminisme yang dimulai pada 1990an yang mendapat pengaruh dari feminisme-feminisme sebelumnya. Feminisme ini, lanjut Tong, memiliki rumusan agenda feminisme yang berbeda dari feminisme pendahulunya karena feminisme gelombang ketiga merayakan perbedaan (2009: 271). Berbeda dengan Gamble yang menentang istilah postfeminisme, Tong bahkan menolak untuk menyebut istilah postfeminisme dan memilih menggunakan istilah feminisme multikultural.

Shelley Budgeon (2011a) melihat feminisme gelombang ketiga sebagai feminisme yang sangat dipengaruhi oleh budaya populer. Hal ini bertentangan dengan pendapat Tasker dan Negra serta pendapat Faludi di atas yang melihat postfeminisme sebagai feminisme yang merangkul budaya populer. Bagi Budgeon, feminisme gelombang ketiga melihat budaya populer sebagai objek kajian kritis dan menolak oposisi biner yang memarginalkan budaya populer (2011a: 280). Feminisme gelombang ketiga merupakan perkembangan feminisme yang mendekonstruksi dan mengevaluasi kembali feminisme sebelumnya agar dapat terus berkembang dan memfasilitasi perempuan pasca feminisme tahun 1970an (Budgeon, 2011b: 4).

Pada akhirnya, usaha untuk membedakan postfeminisme dan feminisme gelombang ketiga dianggap sia-sia karena menurut Gamble, "any attempt to differentiate between third wave feminisme and postfeminisme may be achieving nothing more than a little juggling with semantics" (2006: 44). Menurut Genz dan Brabon, perbedaan antara postfeminisme dengan feminisme gelombang ketiga fenomena yang tak terhindarkan dari kehidupan sosial budaya masyarakat Barat yang rentan terhadap kontradiksi (2009: 162). Meski pendapat ini cenderung menggaris bawahi feminisme gelombang ketiga sebagai perkembangan yang didominasi dunia Barat, namun kesadaran feminisme untuk mengakui perbedaan dan merangkul kemajemukan menjadi modal sendiri bagi perempuan non-Barat untuk mengembangkan feminisme dengan keyakinan bahwa feminisme pasca gelombang kedua berkomitmen untuk merangkul aliran-aliran feminis yang berbeda.

3. Aliran dalam Feminisme

Meskipun para feminis memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan terhadap kaum perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan serta target dan bentuk perjuangan mereka. Perbedaan tersebut mengakibatkan lahirnya beberapa ideologi atau aliran dalam pemikiran di kalangan feminis, hal tersebut mengakibatkan lahirnya beberapa ideologi atau aliran feminis.

1) Feminis Liberal

Feminisme liberal memandang prasangka jender sebagai persoalan ketidakacuhan. Oleh sebab itu, sikap tak acuh itu dapat dihilangkan dengan memberlakukan undang-undang anti diskriminasi terhadap individu-individu yang terkait dan dengan mempermosikan sikap-sikap anti seksis. Akibatnya, bagi kaum feminis, ini adalah perang yang kelak dapat dimenangkan dengan pendidikan kembali. Karya penulis sosiologi yang penting seperti Ann Oakley (1944) di mana diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan ditunjukkan melalui pengkajian empiris yang sistematis, seringkali digunakan untuk mendukung proyek semacam ini. Teori feminis yang lain menggunakan cara pandang yang lebih struktural tentang penindasan terhadap kaum perempuan, tidak memosisikannya dalam pengabaian individual, melainkan dalam cara berpikir dan hidup dalam institusi.

2) Feminisme Marxis

Menurut Marxis feminis, subordinasi perempuan melayani kebutuhan akan kapitalisme. Dalam hubungan ekonomi dan karakteristik gagasan dari mode kapitalisme produksi yang kita seharusnya mencari struktur ketidaksetaraan yang secara tidak adil menghambat kehidupan perempuan, kebalikan dari kehidupan laki-laki yang serba menikmati keuntungan dan kelebihan. Solusi bagi masalah penindasan terhadap kaum perempuan itu terletak pada penghancuran kapitalisme.

Di bawah kondisi kapitalisme, perempuan hidup dalam keluarga, sebagai istri dan ibu. Dalam keluarga ini, perempuan merupakan sumber tenaga kerja domestic yang tak dibayar, yang pekerjaan mereka itu sangat penting bagi kapitalisme karena menjadi penghasil komoditi dalam industri. Jadi baik memerikan pelayanan domestic untuk melestarikan pekerja laki-laki yang juga

adalah suami mereka, maupun melahirkan dan membesarkan anak-anak yang kelak menjadi tenaga kerja generasi baru, perempuan sebagai istri dan sebagai ibu penting sekali bagi kapitalisme—semuanya tanpa bayaran. Oleh karena itu jauh lebih menguntungkan bagi kapitalisme kalau mempunyai tenaga kerja domestik perempuan yang tak dibayar daripada membayar lebih besar tenaga kerja laki-laki dan kemudian membeli pelayanan domestik pula di pasar.

Juga sebagai akibat dari kenormalan keluarga inti di bawah kapitalisme, ketika perempuan memasuki tenaga kerja, karena mereka dipandang tergantung secara ekonomi pada suami mereka, mereka diberi upah rendah, status rendah, dan bekerja sebagian waktu. Pekerjaan mereka dipandang sekunder dan pelengkap saja bagi penghasilan suami, sehingga ganjaran mereka juga pelengkap saja – upah perempuan yang berkeluarga tak perlu sama dengan upah pekerja yang membujang. Oleh sebab itu, perempuan berkeluarga adalah pekerja semi-proletariat, secara ekonomi jauh kurang beruntung daripada kelas pekerja.

Sekali lagi, karena ketergantungan ekonomi kaum perempuan pada suami mereka, perempuan sebagai istri membentuk “bala tentara tenaga kerja cadangan”, yang sewaktu-waktu dapat digunakan di pasar kerja bilamana diperlukan, tetapi pekerjaan permanen jauh dari perempuan. Sebagai akibatnya, perempuan adalah pekerja marginal, tidak hanya memperoleh upah yang jauh lebih buruk daripada laki-laki yang dapat keluar-masuk pasaran kerja jika kebutuhan meningkat. Contoh klasik adalah selama Perang Dunia Kedua, ketika tenaga kerja laki-laki jauh berkurang, prasangka terhadap perempuan sementara hilang dan kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi oleh perempuan. Sekonyong-konyong perempuan dibutuhkan di lapangan industri, dan semua pengalaman yang men diskriminasi perempuan, yang menyingkirkan mereka dari lapangan kerja, dilupakan orang. Ketika perang usai, ideologi dan legitimasi terhadap perempuan kembali lagi seperti semula.

3) Feminisme Sosialis

Sebuah faham yang berpendapat “Tak Ada Sosialisme tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme”. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuangan untuk memerangnya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

4) Feminisme Radikal

Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultus seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianism), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik.

Pendekatan feminisme radikal adalah apa saja yang berhubungan dengan laki-laki adalah negative dan menindas, penganut aliran ini juga menolak adanya institusi keluarga, baik secara teoritis maupun praktis.

5) Feminisme Anarkis

Aliran ini beranggapan bahwa lebih bersifat pada paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-laki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

6) Feminisme Postmodern

Ide posmo ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial. Postmodern menggali persoalan aliansi perempuan seksual, psikologis, dan sastra dengan bertumpu pada Bahasa sebagai sebuah sistem. Aliran ini memberi gambaran perbedaan antara laki-laki dan perempuan haruslah diterima dan dipelihara. Mereka menganggap bahwa masyarakat telah diatur untuk saling berhubungan diantara keduanya. Lebih jelasnya aliran ini menolak adanya otoritas.

7) Feminisme Nordic

Kaum feminis Nordic dalam menganalisis sebuah negara sangat berbeda dengan pandangan feminis Marxis maupun radikal. Nordic yang lebih menganalisis Feminisme bernegara atau berpolitik dari praktek-praktek yang bersifat mikro. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan “harus bertemanan dengan negara” karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara.

4. Gerakan Feminisme di Indonesia

1) Sejarah Kolonial (akhir abad 19 awal abad 20)

Di berbagai penjuru Indonesia kita jumpai banyak tokoh terkemuka yang tampil membela hak rakyat. Perhatian pokok mereka tidak semata-mata membela kaumnya saja tapi pada perjuangan bersenjata melawan Belanda seperti dilakukan oleh Cut Meutia dari Aceh, Roro Gusik di Jawa sebagai istri Untung Surapati, di Maluku Martha Tiahahu membantu Pattimura, di Sulawesi Selatan Emmy Saellan giat dalam perlawananann melawan Wolter Monginsidi.

- Tahun 1879-1904

Sejarah feminisme ketika zaman kolonial telah dipelopori oleh RA Kartini. Ia muncul akhir abad ke 20 (1879- 1904). Ia diperlakukan tidak adil oleh orantuanya dengan dipingit tidak seperti saudara laki-lakinya yang disekolahkan di Universitas Leiden negeri Belanda. Ia merasa terhina oleh adanya perkawinan permaduan (poligami). Ia kemudian mempelopori

dibukanya sekolah untuk mendidik wanita .Setelah itu lahirlah tokoh feminisme di Jawa Barat yakni Dewi Sartika.

- Tahun 1912

Organisasi perempuan yang pertama adalah Poetri Mardika yang lahir tahun 1912. Organisasi ini memiliki hubungan dengan dengan Organisasi Nasional pertama Boedi Oetomo (1908). Setelah Poetri Mardika berdiri, muncullah perkumpulan perempuan lainnya bernama Putri Sejati dan Wanita Utama. Selanjutnya Gerakan Pembaharuan Islam Muhammadiyah yang terbentuk tahun 1917 telah melahirkan organisasi wanita Aisyiah pada tahun 1920 dan kemudian diikuti oleh organisasi perempuan kaum katolik, dan protestan. Demikian pula di Maluku, Minahasa dan Minangkabau. Gerakan organisasi Aisyiah ini memiliki isue sentral agar perempuan mendapat pendidikan yang baik dan perbaikan kondisi poligini. Sedangkan organisasi perempuan kaum katolik dan protestan menyuarkan anti poligami.

- Tahun 1920

Muncullah Organisasi Sarekat Rakyat yang menyuarkan peningkatan upah dan kondisi kerja yang baik bagi kaum perempuan. Disusul kemudian oleh lahirnya organisai lainnya yang memperjuangkan perlunya pendidikan bagi kaum perempuan, menentang perkawinan anak-anak, permaduan serta perdagangan perempuan dan anak-anak.

- Tahun 1928-1930

Marak tumbuh berbagai organisasi perempuan. Pada tahun 1928 muncullah 30 organisasi, diantaranya Persatoean Perempuan Indonesia (PPI) yang menyuarkan reformasi pendidikan dan reformasi perkawinan. PPI kemudian namanya diganti menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang menyuarkan penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Organisasi Istri Sedar (1930) masih tetap menyuarkan anti poligami dan perceraian. Organisasi perempuan berkembang pesat pada tahun 1930-an.

2) Masa Pendudukan Jepang

Pada masa inipun telah dibentuk organisasi Fujinkai, yang memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan berorientasi pada pekerjaan sosial. Motivasi mendirikan organisasi ini adalah sematamata memihak Jepang untuk

kemenangan Jepang. Anggotanya terdiri dari istri pegawai negeri serta kegiatan dalam hirarki sejalan dengan kegiatan suami.

- Masa Belanda 1946-1949

Kembali Kongres Wanita Indonesia, menyuarkan upah yang sama, perbaikan hukum perkawinan serta esensi pendidikan untuk perempuan. Wanita Indonesia harus menyokong Indonesia Merdeka, bergabung dengan pasukan bersenjata dan ikut perang gerilya. Belanda dikalahkan pada tahun 1949.

3) Pasca Kemerdekaan - Orde Lama • Tahun 1950

Organisasi wanita berangsur-angsur hancur, disamping itu muncullah GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) sebagai kelanjutan dari Istri Sedar. Organisasi ini menyuarkan : sukseskan pemilu, anti perkosaan, peningkatan kesadaran perempuan tani, berantas buta huruf, hukuman berat bagi pemerkosa dan penculikan, kegiatan sosek bagi kaum perempuan, pendidikan masalah politik, kesehatan, dan monogami. Pada dasarnya organisasi ini menyokong kampanye politik terpenting yang dilakukan oleh PKI. Anggota organisasi ini terdiri dari lapisan menengah ke bawah dan kelas buruh.

- Tahun 1955

Muncul Organisasi Perempuan Islam dan Nasionalis, serta berbagai kegiatan yang terikat pada partai politik dan gerakan keagamaan dalam bentuk Balai-balai Perempuan, Bank-bank Perempuan, Surau Perempuan, Organisasi Perempuan serta Majalah Perempuan. Selain itu, tahun 1954 lahir pula organisasi PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia).

4) Masa Orde baru

Pada era ini organisasi masa mengalami pengekan hingga tahun 1968. Tahun 1966 hingga 1970 terjadi pembersihan PKI. Satusatunya organisasi yang hidup adalah Perwari. Kemudian 1978 Perwari dilebur kedalam Golkar. Pada tahun inilah hilang organisasi wanita yang bersifat independen, akan tetapi lahir beberapa organisasi besar seperti : Golkar, Dharma Wanita (istri PNS), Dharma Pertiwi (Istri yang suaminya bekerja di Angkatan Bersenjata) serta organisasi PKK.

5) Era Reformasi

Dalam era reformasi, munculnya berbagai organisasi wanita yang membangkitkan kembali para reformis wanita seperti tahun 1930-an yang tidak saja membela kaumnya sendiri, melainkan juga membela dan memikirkan nasib masyarakat marjinal, berbagai organisasi LSM yang membela rakyat kecil antara lain Wardah Hafiz, kelompok perempuan yang menamakan Suara Ibu Peduli yang membela hak anak.

5. Feminisme Dalam Media Massa

Dalam hubungannya dengan kehidupan sosial manusia, pengaruh media massa juga terasa pada kehidupan sosial perempuan. Stigma dan stereotip yang terbentuk di masyarakat mengenai perempuan sedikit banyak dipengaruhi oleh media. Media menyajikan citra perempuan secara arbitrer atau sewenang-wenang, seringkali tanpa memikirkan dampak yang bisa timbul dari citra yang dibangun tersebut. Citra perempuan yang dibangun dalam media disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku bisnis dan industri yang berada di belakang layar. Seringkali perempuan dijadikan objek agar tujuan industri tercapai, misalnya rating yang tinggi. Perempuan dijadikan sebagai objek melalui cara yang bervariasi. Cara yang paling ampuh dan paling sering digunakan adalah dengan melakukan eksploitasi berlebihan terhadap tubuh perempuan.

Eksploitasi tubuh perempuan yang divisualisasikan dalam bentuk konten media seolah-olah menjadikan tubuh perempuan sebagai alat tukar dengan keuntungan pelaku industri. Tubuh perempuan yang diekspos oleh media menjadikan perempuan sebagai objek yang bisa diperjualbelikan, dengan timbal balik berupa rating, laba industri, peningkatan pengguna media massa dan seterusnya.

6. Strategi Feminisme di Indonesia

Untuk dapat merealisasikan aspirasi dan partisipasi dalam pembangunan, diperlukan berbagai strategi untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :

- a Wanita turut menyerukan perbaikan ekonomi skala nasional yang dapat segera menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Perlu penggalangan semua potensi baik laki-laki maupun wanita dalam pembangunan negara dalam menghadapi era globalisasi berdasarkan “mitra

- kesejajaran”. Kemiskinan dan pengangguran merupakan potensi mundurnya kualitas bangsa.
- b Galakkan pengembangan dan peningkatan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta berbagai pelatihan harus berlandaskan iman dan taqwa yang memancarkan syiar Islam. Canangkan pendidikan seumur hidup (long life education) yang bersifat terbuka.
 - c Dialog secara luas mengenai wanita dan kewanitaan dikaji dari (Qur’an dan Hadits) dituntut keikhlasan pria muslim terhadap eksistensi wanitanya yang dijabarkan dalam berbagai masukan/pertimbangan terhadap kaum perempuan yang berkiprah dalam pembangunan agar tercipta umat yang maslahat.
 - d Meningkatkan supremasi hukum dengan melengkapi peraturan yang belum mencapai sasaran, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memberikan sanksi terhadap para pelanggar hukum yang setimpal demi kesejahteraan rohani, jasmani, dunia dan akhirat. (5) Dirikan infrastruktur yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keamanan, kenyamanan bagi wanita bekerja baik di lokasi kerja maupun di tempat permukimannya
 - e Bagi wanita melakukan kegiatan di luar rumah harus mempertimbangkan prasyarat sebagai berikut:
 - Mengkaji potensi, hambatan, peluang serta ancaman, termasuk kesepakatan suami.
 - Utamakan tugas domestik.
 - Pilih pekerjaan yang memiliki konflik fisik dan sosial seminimal mungkin. x Memiliki ketahanan fisik dan mental yang kuat, kesehatan rohani dan jasmani merupakan syarat prima.
 - Organisasi wanita harus membuat konsep manajemen bekerja paruh waktu yang kini telah berlaku di berbagai negara benua Amerika dan Eropa, sehingga perempuan punya keleluasaan bekerja sambil mengurus rumah tangga serta kodrat kewanitaan sebagai ibu dan istri tetap terjaga.

Munculnya berbagai permasalahan feminisme disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut:

a Kondisi Politik

Perempuan belum terwakili secara proporsional dalam posisi politik strategis. Jumlah wanita yang menduduki jabatan eselon I dan II departemen hanya 5,5% atau 843 atau 15.332 orang³. Hal ini dapat disebabkan oleh sosialisasi keluarga yang menanamkan bahwa pendidikan politik itu keras, jahat, dunia laki-laki, penuh persaingan tidak sehat, tidak tepat bagi perempuan. Aktif dalam pendidikan politik perlu kesediaan waktu tanpa batas.

b Kondisi Sosial Ekonomi

Masalah utama yang dihadapi adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Saat ini perempuan Indonesia memiliki peran ganda, disatu sisi sebagai ibu rumah tangga dan disisi lainnya sebagai wanita karier yang ternyata belum diimbangi oleh perubahan infrastruktur dan tata nilai nilai religius yang memadai. Arus peran ganda ini merupakan konsekuensi logis dari hadirnya industrialisasi dan urbanisasi serta kondisi ekonomi negara yang ada dalam krisis berkepanjangan.

c Masalah yang Berkaitan Dengan Aspek Ideologis Dan Psikologis.

Masalah ini terutama dihadapi oleh wanita yang berkiprah di bidang politik, yang meliputi peran tradisional, kurangnya kepercayaan, peran media massa. Peran tradisional perempuan dalam dunia politik menuntut perubahan pola emosi, cara memandang sesuatu serta berfikir sebagai proses dalam memutuskan sesuatu hal.



THE
Character Building
UNIVERSITY

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan : Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta : (Prenada Media Group, 2008), h. 221.
- Adonis, Tito. 1993. Perkawinan Adat Batak di Kota Besar. Jakarta : Departemen Pendidikan Kebudayaan.
- Anggraini, Lolita. 2005. Prilaku Seks Bebas Masyarakat Pedesaan. Padang : Skripsi. Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- Anita, Putri. Rahman, dkk. 2019. Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. Padang : Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 3. Nomor 6.
- Anthony Giddens, Masyarakat Post Tradisional, Yogyakarta : IRCiSoD, 2003
- Ariyanik, Siti. 2012. Fenomena Kenakaln Remaja di Desa Wonorejo Kabupaten Situbondo. Jember : Jurnal Entitas Sosiologi. Volume 1. Nomor 2.
- Barker, Chris. 2005. Cultural Studies. Teori dan Praktik. Yogyakarta : Bentang
- Basrowi. 2016. Pengantar sosial. Bogor : Ghalua Indonesia
- Budgeon. S. 2011a. Third-Wave Feminism and the Politics of Gender in Late Modernity. New Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan.
- Gamble, S. 2006. "Postfeminism" dalam The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism. Editor Sarah Gamble. London and New York: Routledge.

- Genz S. dan B. Brabon. 2009. *Postfeminism: Cultural Text and Theories*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Gunarsa, S.D, dan Gunarsa, Y.S.D. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Horton, Paul. 1987. *Pengertian Seks Bebas*. Halaman 147. Jakarta: wacana.
- Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*. 1991. Pustaka al-Kautsar: Jakarta.
- Irwan Abdullah, *Seks, Gender, Dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta : 2001
- Jalal, Fasli. 2014. *Optimalisasi Pemanfaatan Bonus Demografi*. Kuliah Umum Universitas Udayana : Bali
- Jones, P., Bradbury, L., & Boutillier, S. L. (2016). *Pengantar Teori-teori Sosial*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia.
- Julia Suryakusuma, *Agama, Seks Dan Kekuasaan*, Depok : Komunitas Bambu, 2012
- Kartono, K. 1981. *Teori Perubahan Sosial*. Jakarta : Wacana.
- Kartono, K. 1988. *Psikologi Pemuda*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kartono, K. 1997. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartono, K. 2005. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Pemuda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khairudin, H. 1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty.
- Kusmanto Thohir Yuli, dkk. 2018. *Struktur dan Sistem Sosial Aras Wacanan dan praksis*. Semarang: Universitas Walisong. Isnn 2503-3166. Vol 2. No 1
- Mansour Fakh, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Insiste, 2008
- Mery, Ramadani. Fitri, Yuliani (2015, April) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*.
- Michael, Davids. 2014. *Sosiologi*. makalah.
- Michel Foucault, *Sejarah Seksualitas ; Seks Dan Kekuasaan*, Jakarta : Gramedia, 1997
- Mochamad, Syawie. (2011) *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*. Vol. 16 No. 3

- Nasikun. 2013. Sistem Sosial Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Noviyanti, Ririn. 2020. Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 20 (2) : 705-709.
- Pasaribu, Debora Maria Paramita. dkk. 2017. Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan. *Jurnal Hukum Diponegoro*. 6 (2) : 1-19.
- Pasaribu, Maniur. 2008. Pergeseran Nilai Perkawinan Adat Batak Toba dan Perkembangannya di Perantauan: Suatu Tinjauan Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 11 (2) : 749 -768.
- Postfeminism and ‘New’ Femininities” dalam *New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity* editor Rosalind Gill dan Christina Scharff. Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan. 2011.
- Purwaningsih. 2010. *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: Aplrin
- Putriningsih Nediyan, Sugiyarta. 2012. Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor. *Psikologi Ilmiah*. 4 (3) : 1-6
- Rahmawati, Dewi, Nani Yuniar, dan Cece Suriani Ismail. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Kos-Kosan Di Kelurahan Lalolara Tahun 2016. *JIMKESMAS*, 2(5), 3
- Rahmawati, Nur Dina, Dkk. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019*
- Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman, Seksualitas di Era Global*, Yogyakarta : LkiS, 2005
- Rochadi, Kintoko. 2019. Studi Kasus Perilaku Beresiko Remaja Kota Medan (Pola Makan, Aktivitas Fisik, Konsumsi Alkohol dan Narkoba Serta Perilaku Seksual). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 7(1), 10-11
- Ruswanto. 2009. *Sosiologi*. Jakarta :CV. Mefi Caraka
- Sari Ratna, Soni, dkk. Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding KS : Riset & PKM*. 3 (1). 14-18.
- Sarwono, S.W. 1988. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: N.V Bulan

- Siti Azisah, dkk. *Kotekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*. UIN Alaudin Makassar
- Situasi Terkini perkembangan Coronavirus Disease (Covid-19) 25 November 2020 Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI. Covid19.Kemkes.go.id
- Sri sumiati, Eliana. 2016. *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Sumara, Dadan. Sahadi, Humaedi, dkk. *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*. Padjadjaran: *Jurnal Penelitian dan PPM*. Volume.4. Nomor 2.
- Suwastini, N. K. (2013). *Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis* . *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris* , 198-208.
- Tong, R. 2009. *Tong, Rosmarie. 2009. Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. 3rd Edition. Colorado: Westview Press
- Verdian Nendra Dimas Pratama, *Jurnal Promkes, Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*, Vol. 1, No. 2 Desember 2013, h.147.
- Wartono. 2015. *Pranata Sosial Keagamaan Dalam Lingkungan Keluarga Muslim*. *Jurnal Pendidikan Islam*
- Wolf, Naomi. *Gegar Gender*. 1997. Pustaka Semesta Press: Yogyakarta.

Biodata Penulis



Dr. Tappil Rambe, S.Pd, M.Si, Lahir di Simundol pada tanggal 08 Desember 1978. Merupakan anak ke-3 dari pasangan Alm. Tongku Bosar Rambe dan Almh. Nurbaina Ritonga. Lulusan S1 Pendidikan Sejarah Unimed tahun 2005, Lulusan S2 Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan tahun 2011, dan Lulusan S3 Ilmu-ilmu Sosial Universitas Airlangga tahun 2018. Saat ini menjadi Dosen di Universitas Negeri Medan dengan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I (bidang Akademik) Fakultas Ilmu Sosial Unimed.

Aktif menulis diberbagai jurnal baik jurnal nasional dan internasional sesuai dengan bidang keilmuan. Adapun karya-karya tulis yang telah dimuat adalah, *Settling the Conflicts of Land Property between Cultivators and Non-Cultivators in Farm Ownership in North Sumatera*, Volume 63 Issue 2s 2020 *Journal Solid State Technology*. Analisis Wacana Materi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (Pdri) Dalam Pembelajaran Sejarah Di Sma, Volume 5 Nomor 1 2020 *Jurnal Puteri Hijau*. Implementasi Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara Pada SMK Tamansiswa di Kota Tebing Tinggi, Volume 4 Nomor 1, Januari 2019 *Jurnal Puteri Hijau*. Dampak Kebijakan Revolusi Hijau Pemerintahan Orde Baru di Kabupaten Tapanuli, Volume 3 Nomor 2, Juli 2018 *Jurnal Puteri Hijau*. *The Beginning of Ownership and Plot Conflict of Ramunia Plantation Village: Between Plot of Custom and State*, Vol. 5 No. 11/2052-6350 (Print) 2052-6369 (Online)/2017 *European-American Journals (EAJ)*

Selain itu, juga aktif menjadi diberbagai forum-forum ilmiah baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Menjadi narasumber di TVRI Sumut, RRI Medan, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara, Pemda Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pemda Kabupaten Serdang Bedagai, Pemda Kabupaten Asahan, dan Badan Informasi Geospasial. Dalam forum konferensi internasional sebagai presenter di antaranya, 2nd International Conference on

Social Sciences and Intedisciplinary Studies (ICSSIS 2019), *Uang Kebon and Colonial Power Relations in East Sumatra Plantation*, 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018), *Mapping and Handling of Communal Land Conflict at Northern Sumatera*.

Aktif juga menulis artikel di media massa salah satunya adalah koran *Harian Waspada*, beberapa artikel yang dimuat adalah, *Harian Umum Nasional Waspada*, pada hari Kamis, tanggal 21 April Nomor: 25267, Kartini : Antara Kontroversi versus Emansipasi. *Harian Umum Nasional Waspada*, pada hari Senin, tanggal 16 Mei Nomor: 25290, Peziarahan Reformasi. *Harian Umum Nasional Waspada*, bulan Oktober, *Membangun Ingatan Bersama*. Selanjutnya karya buku yang dihasilkan adalah, *Sejarah Politik dan Kekuasaan “Islam, Nasionalisme dan Komunisme dalam Pusaran Kekuasaan di Indonesia dan Gagasan di Pinggir Danau*.



Taufik Hidayat, S.Pd., M.Si., lahir di Stabat pada tanggal 26 Juni 1986. Merupakan Putra Bungsu (Anak ke 5) dari pasangan H. Ali Badri dan Hj. Amanah. Lulusan S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan Tahun 2009, dan Lulusan S2 Antropologi Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Medan Tahun 2015. Saat ini menjadi Guru Sejarah Indonesia di SMA Negeri 6 Binjai, Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan (IKAPENSU) periode 2019-2023 dan founder channel Youtube Binjai Young Stars.

Aktif menulis dalam bidang Ilmu Kependidikan, Sejarah dan Antropologi. Adapun karya-karya tulisnya, yakni *Cara Belajar Sejarah Lebih Menyenangkan: Belajar Asik Sejarah Melalui Instagram dan Youtube*, Ombak (2021); *Cerita Inspiratif Pendamping Guru Penggerak: Layar Tancap Kereta Penggerak*, CV Jejak (2021); *Pancasila Untuk Generasi Millennial Menuju Indonesia Emas 2045*, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP (2019); *Para Pengeja Sejarah: Cerita Inspiratif untuk Mengerti Sejarah Indonesia*, Farha Pustaka (2019); *Pelangi Bukit Barisan: Pengabdian Menuju Generasi Emas 2045*, Gerhana Publishing (2018); *Pelaku-Pelaku Utama dalam Bisnis Kelapa Sawit Di Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan Sumatera Utara*, Program Studi Antropologi Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Medan (2014); *Hasil Emas*

Perkebunan Sawit dan Penghisapan Terhadap Ekosistem Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang, Publikasi Jurnal Strukturasi Antropologi Sosial Pascasarjana Unimed Vol. 1 No. 1 Januari - Juni 2014 (2014); Sejarah Indonesia 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra Langsa (2013); Sejarah Industri, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (2012); Penggunaan Tutar Perempuan Untuk Mengetahui Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual Terhadap Cara Bertahan Perempuan Aceh Pada Masa Daerah Operasi Militer (DOM), Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan (2012); The Role of Islamic of Jam'iyah Muhammadiyah Tanjung Pura Langkat As An Islamic Education Institution Since of The Year of 1912 to 2009, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (2009) dan; Merdeka Belajar Menuju Generasi Emas 2045: Sejarah, Hakikat dan Prinsip Dasar Pendidikan Indonesia, Jurnal Polisi : Edisi Ke 68 Tahun Ke IV, Agustus – September 2020 (2020), dan;

Selain itu, juga aktif dalam pengembangan organisasi profesi kependidikan dan sosial kemasyarakatan, antara lain: Anggota Biro Kelautan dan Perikanan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Utara (2019-2023); Kepala Departemen Kerjasama Dalam dan Luar Daerah Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Sumatera Utara (2019-2022); Koordinator Bidang Pengembangan Program dan Organisasi Asosiasi Peneliti Sumatera Utara APSU (2017-2018); Kepala Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi MGMP Sejarah Provinsi Sumatera Utara (2016-2019); Anggota Dewan Pendidikan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kabupaten Langkat (2015-2019); Ketua MGMP Sejarah SMA Kota Binjai (2015-2017); Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Periode (2008-2009); dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Stabat Periode (2003-2004).

Penulis dapat dihubungi melalui: HP/WA 081375242956

Email: taufikhidayat661@guru.sma.belajar.id

Instagram: [@taufik_ok_ali](https://www.instagram.com/taufik_ok_ali)

Facebook: Taufik OK Ali

Youtube: <https://youtube.com/c/BINJAIYOUNGSTARS>



THE
Character Building
UNIVERSITY

SOSIOLOGI

DARI RUANG KELAS

Sosiologi dari Ruang Kelas ini, terdiri dari beberapa bab pembahasan yang memfokuskan terhadap ide-ide perilaku sosial dalam melihat berbagai dinamika perilaku manusia, dan dibahas secara terkini, berdasarkan fenomena yang ada, diantaranya: Permasalahan Dalam Kehidupan Sehari-hari, Konsep Dasar dan Implementasi Keluarga dan Perkawinan dalam Masyarakat Modern, Seksualitas dan Masyarakat Modern di Indonesia, Sistem Sosial dan Perilaku Menyimpang, Pranata Agama dan Pranata Politik, Gender dan Kajian Tentang Perempuan.

Semua materi kajian tersebut, penulis rangkum sebagai suatu penyajian yang terkini dengan melihat perkembangan masyarakat, baik secara tradisional maupun modern. Karya ini sangat diharapkan mampu menjadi referensi bagi kaum akademisi dan praktisi sosial, untuk dapat merangkum sebagian kajian kontemporer sebagai wawasan lokal dan nasional, dalam menyikapi Bonus Demografi 2025-2035 untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

THE
Character Building
UNIVERSITY



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-342-320-5

